

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
TERHADAP CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA
SIBOLGA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi
(M.I.Kom) Pada Bidang Ilmu Komunikasi*

Oleh:

JAMILUDDIN. Z
NPM: 1920040021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **JAMILUDDIN Z**
NPM : **1920010021**
Program Studi : **Magister Ilmu Komunikasi**
Judul Tesis : **STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA SIBOLGA**

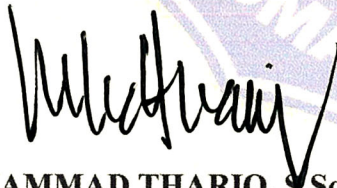
Pengesahan Tesis

Medan, 28 November 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



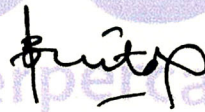
Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom

Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D

PENGESAHAN

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
TERHADAP CALON KEPALA DAERAH
PADA PILKADA KOTA SIBOLGA**

JAMILUDDIN Z

NPM : 1920010021

Progran Studi : Magister Ilmu Komunikasi

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom) Pada Hari Senin, Tanggal 28 November 2022”

Panitia Penguji

1. **Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D**
Ketua

1. 

2. **Dr. YAN HENDRA, M.Si**
Anggota

2. 

3. **Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si**
Anggota

3. 

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA SIBOLGA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 28 November 2022

Penulis



JAMILUDDIN Z
NPM : 1920010021

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini merupakan buat mengenali data serta memperoleh informasi tentang strategi komunikasi politik yang digunakan Partai Golkar dalam tingkatkan partisipasi politik warga terhadap Calon Kepala Wilayah pada Pilkada Kota Sibolga. Dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif langsung kelapangan ialah dengan melaksanakan wawancara, observasi serta riset dokumentasi guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Sebaliknya pendekatan teori yang dipergunakan merupakan teori komunikasi politik. Peneliti berupaya buat menggambarkan serta mendeskripsikan kenyataan, sehingga bisa ditafsirkan gimana strategi komunikasi politik yang digunakan Partai Golkar dalam tingkatkan partisipasi politik warga terhadap Calon Kepala Wilayah pada Pilkada Kota Sibolga. Hasil penelitian menampilkan kalau Partai Golkar sudah banyak membuat strategi-strategi yang digunakan buat tingkatkan partisipasi politik warga dalam memenangkan Pilkada Kota Sibolga, dimana strategi- strategi tersebut sangat bervariasi, salah satunya lewat kegiatan- kegiatan sosial politik kemasyarakatan. Strategi ini ialah strategi yang sangat universal digunakan oleh Paslon Kepala Derah ataupun Partai Politik yang lain. Dengan tujuan supaya khalayak/ pemilih bisa mengidentifikasi siapa Paslon Kepala Wilayah yang hendak diseleksi dalam Pilkada Kota Sibolga 2020. Sehingga periset merumuskan kalau terdapat strategi yang digunakan oleh Partai Golkar dalam memenangkan Pilkada Kota Sibolga. Strategi yang digunakan mulai dari melaksanakan aktivitas sosial politik kemasyarakatan, pemasangan baliho, spanduk, mempublikasikan lewat media sosial serta media cetak.

Kata Kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Partisipasi Warga pada Pilkada Kota Sibolga.

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA SIBOLGA

ABSTRACT.

The purpose of this research is to identify the data and obtain information about the political communication strategy used by the Golkar Party in increasing the political participation of citizens towards the Regional Head Candidates in the Sibolga City Pilkada. In this study using a direct qualitative approach to the field, namely by conducting interviews, observations and documentation research in order to obtain the necessary information. On the other hand, the theoretical approach used is the theory of political communication. The researcher tries to describe and describe the reality, so that it can be interpreted how the political communication strategy used by the Golkar Party in increasing the political participation of citizens towards the Regional Head Candidate at the Sibolga City Election. The results of the study show that the Golkar Party has made many strategies that are used to increase citizens' political participation in winning the Sibolga City Election, where these strategies are very varied, one of which is through social and political activities. This strategy is a very universal strategy used by the Regional Head Paslon or other political parties. With the aim that the public/voters can identify who the Regional Head Paslon will be selected in the 2020 Sibolga City Election. So the researchers formulate that there are many strategies used by the Golkar Party in winning the Sibolga City Pilkada. The strategies used are starting from carrying out social and political activities for the community, installing billboards, banners, publishing through social media and print media.

Keywords:

Strategy, Political Communication, Citizen Participation in the Sibolga City Election.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II URAIAN TEORITIS	13
2.1 Komunikasi Politik.....	13
2.1.1 Komponen Komunikasi Politik.....	19
2.1.2 Bentuk Komunikasi Politik.....	19
2.1.3 Fungsi Komunikasi Politik.....	21
2.1.4 Jenis Komunikasi Politik.....	21
2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Politik.....	22
2.1.6 Manfaat Mempelajari Komunikasi Politik.....	22
2.2 Strategi Politik.....	23
2.2.1 Tahapan – Tahapan Strategi Komunikasi Politik.....	24
2.2.2 Elemen – Elemen Strategi Komunikasi Politik.....	26

2.2.3 Faktor – Faktor Dari Proses Strategi Politik	27
2.3 Partisipasi Politik	30
2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik	30
2.3.2 Faktor – Faktor Partisipasi Politik	32
2.3.3 Tipologi Partisipasi Politik	33
2.3.4 Bentuk Partisipasi Politik	35
2.3.5 Konfigurasi Pemilih	38
2.3.6 Teori Behavioralisme	39
2.3.7 Teori Pilihan Rasional	40
2.4 Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU)	41
2.4.1 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU)	42
2.5 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	45
2.5.1 Latar Belakang Berdirinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) ..	46
2.5.2 Tugas, Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)	49
2.6 Kajian Penelitian Yang Relevan dan Jurnal	54
BAB III METODOOGI PENEITIAN	59
3.1 Metode Penelitian	59
3.2 Kerangka Pemikiran	60
3.3 Kategorisasi	62
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	63
3.5 Informan	63

3.6	Tekhnik Pengumpulan Data	64
3.7	Teknik Analisis Data.....	65
3.8	Keabsahan Data.....	66
3.9	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	70
3.9.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	70
3.9.2	Sejarah Singkat Partai Golkar.....	70
3.9.3	Visi, Misi dan Tujuan Partai Golkar	73
3.9.4	Struktur Organisasi DPD II Partai Golkar Kota Sibolga.....	74
3.9.5	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Masing – Masing Jabatan DPD II Partai Golkar Kota Sibolga.....	75
BAB IV	HASIPENEITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
4.1	Hasil Penelitian.....	90
4.1.1	Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga	91
4.1.2	Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kepada Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Sibolga	99
4.2	Pembahasan.....	117
4.2.1	Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Sibolga	117
4.2.2	Analisis Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pada Pilkada Kota Sibolga	134

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	145
5.1 Kesimpulan.....	145
5.2 Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	60
Gambar 3.8 Struktur Organisasi DPD II Partai Golkar Kota Sibolga.....	75
Gambar 4.1 Strategi Komunikasi Politik.....	134
Gambar 4.2 Proses Komunikasi Politik.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Pelaksanaan Pilkada Di SUMUT Tahun 2020.....	2
Tabel 1.2 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota SIBOLGA.....	7
Tabel 3.1 Kategorisasi.....	62
Tabel 4.1 Daftar Kandidat Resmi.....	92
Tabel 4.2 Hasil Presentasi Presepsi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.....	93
.....	
Tabel 4.3 Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan.....	99
Tabel 4.4 Data Jumlah Suara Pada Pilkada Kota Sibolga 2020.....	116

BAB I

PENDAHUUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika pertumbuhan warga yang majemuk memanglah sudah menuntut kenaikan kedudukan, guna, serta tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional selaku fasilitas partisipasi politik dalam upaya mewujudkan cita- cita nasional bangsa Indonesia dalam melindungi serta memelihara keutuhan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, partai selaku bagian dari pergerakan demokrasi sepatutnya bisa membagikan andil yang sangat besar untuk kemajuan bangsa. Serta dibutuhkan pemahaman dari partai buat membangun pemahaman politik yang kolektif di warga. Paling utama perihal yang butuh menemukan atensi partai politik dalam mengalami Pemilu/ Pilkada. Hendak namun kasus yang kerap terjalin dikala Pemilu ataupun Pilkada salah satunya merupakan Politik Duit (Money Politic). Money Politics yang diartikan memiliki penafsiran ialah aksi membagi- bagi duit untuk selaku kepunyaan partai ataupun individu buat membeli suara warga. Dalam sudut pandang hukum pidana, tindak pidana politik duit diatur dalam pasal 523 ayat[1] hingga dengan ayat[3]. UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ialah pada dikala kampanye, masa tenang serta dikala pemungutan suara. Meski terdapatnya undang- undang yang hendak menjerat untuk para pelakon serta menerima politik duit tetapi senantiasa saja peristiwa politik duit masih saja terjalin, perihal ini diakibatkan sebab proses suap- menyuap yang ialah konvensi dari 2 belah pihak baik

dari regu berhasil calon ataupun saudara calon pejabat ataupun pemilih hendak
mendatangkan

keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak saling bekerja sama dalam menutupi tindakan tersebut.

Tabel 1.1

Kasus Pada Pelaksanaan PILKADA di Sumatera Utara Tahun 2020

No.	Nama Kasus	Jumah Kasus
1.	Money Politic	23 Kasus
2.	Mencobos lebih dari 1 kali	140 Kasus

Sumber: Kapolda Sumatera Utara 2020

Tidak hanya itu pula berkaitan dengan keyakinan masyarakat pada demokrasi serta masa depan politik sesuatu Negeri. Lewat Pemilu serta Pilkada warga diajarkan gimana proses politik serta persaingan politik itu terjalin.(Nimmo, 2010: 13- 14) Politik ialah suatu proses panjang yang memiliki tujuan yang mau dicapai, begitu pula suatu komunikasi merupakan suatu proses pertukaran data yang memiliki dampak baik, serta komunikasi politik jadi sangat berarti buat dikaji sebab ialah suatu komunikasi yang memiliki tujuan politik dengan kata lain komunikasi poitik ialah proses komunikasi yang bisa ataupun berpotensi mengendalikan manusia buat melaksanakan suatu dibawah keadaan yang di mau oleh komunikator serta suatu strategi komunikasi politik diperlukan selaku metode penyampaian pesan supaya efisien serta efektif.

Salah satu guna dari partai politik merupakan melaksanakan komunikasi politik yang baik supaya apa yang di mau para elit politik yang hendak di sampaikan pada khalayak (warga) tersampaikan dengan baik cocok dengan tujuan. Namun tidak seluruh komunikasi politik berjalan dengan baik, adakalanya apa yang dikomunikasikan tidak cocok dengan tujuannya, hambatan inilah yang dikurangi ataupun diduga supaya tidak teralu mempengaruhi terhadap

partai politik maupun elit politiknya. Dalam proses politik, komunikasi politik ialah perihal yang berarti, paling utama selaku jembatan buat mengantarkan pesan- pesan. Komunikasi politik dimaknai selaku prilaku ataupun aktivitas komunikasi lewat media massa yang bertabiat politik, memiliki akibat politik serta mempengaruhi terhadap prilaku politik (Dahlan, 2010: 98). Minimnya komunikasi politik antar elit politik dengan warga hendak membatasi tujuan politik itu sendiri serta apa yang di harapkan tidak dapat tercapai. Pesan hendak hingga dengan baik bila komunikator dapat menyampaikannya dengan baik terhadap komunikan mereka. Oleh sebab itu, para pemimpin serta para komunikator butuh menguasai serta meyempurnakan keahlian komunikasi mereka. Jadi dalam perihal ini, komunikasi politik sangatlah berarti serta mendukung buat suatu proses politik supaya memperoleh sokongan serta citra yang baik dari warga serta yang terutama dalam suatu komunikasi politik merupakan strategi komunikasi politik yang sudah direncanakan selaku jalur tersampainya pesan politik dari aktor politik terhadap warga universal.

Komunikasi politik berlangsung dalam konteks organisasi dan suasana politik. Seperti yang dikatakan Muleer (2013), komunikasi politik didefinisikan sebagai suatu kejadian yang bersifat politis ketika ditekankan oleh kejadian tersebut. Di sisi lain, bagi mereka yang lebih menekankan pada penggunaan komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi politik diartikan sebagai komunikasi di dalam dan antar sistem dengan menggunakan lingkungannya. Ada hubungan penting antara komunikasi dan pencapaian tujuan politik, dan Graber (2011) mengakui bahwa beberapa kegiatan komunikasi politik adalah permainan kata-kata. Bagi Nimmo (2010): “Politisi sebagai komunikator politik memainkan posisi sosial manual dan secara manual menurun dalam membentuk opini

publik. Politisi dan politisi berbicara atas nama organisasi dan kedutaan. Politisi harus mengusulkan dan/atau melindungi objek kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Dengan kata lain, komunikator politik dikelompokkan bersama sampai politisi mencari pengaruh melalui komunikasi. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena mereka berhasil terlibat dalam dialog yang menarik dengan pemilih dan elit politik. Tidak hanya itu, hal ini juga tergantung pada efektivitas komunikasi Anda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam komunikasi politik selalu ada proses pertukaran pesan yang diusahakan oleh komunikator politik.

Dalam mencapai sesuatu kekuasaan butuh terdapatnya strategi sebab strategi ialah perlengkapan buat menggapai tujuan bersumber pada bagi Marrus(2012: 31) strategi didefinisikan selaku sesuatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, diiringi penataan sesuatu metode ataupun upaya gimana supaya tujuan tersebut bisa dicapai. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, serta aksi yang wajib dicoba oleh sesuatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi serta memenangkan persaingan, paling utama organisasi wajib mempunyai keunggulan kompetitif. Bagi Onong (2011: 84) melaporkan“ strategi komunikasi ialah panduan dari perencanaan komunikasi (communication panning) serta manajemen(communications management) buat menggapai sesuatu tujuan. Buat menggapai tujuan tersebut strategi komunikasi wajib bisa menampilkan gimana operasionalnya secara taktis wajib dicoba, dalam makna kata kalau pendekatan(approach) dapat berbeda sewaktu- waktu bergantung dari suasana serta keadaan”. Dalam strategi komunikasi kedudukan komunikator sangatlah

berarti supaya bisa menciptakan komunikasi yang efisien hingga wajib memahami khalayak, penataan pesan penentuan metode mengantarkan pesan serta memilah media.

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik di kota Sibolga tidak akan jauh berbeda dengan strategi komunikasi partai politik di daerah / kota lain yang sedang melakukan praktik politik, dan perkembangan komunikasi politik di kota Sibolga juga tidak akan bisa terlepas dari sejarah panjang perkembangan komunikasi politik di Indonesia, dan perkembangan komunikasi politik tidak bisa lepas begitu saja setidaknya dari kerangka dasar ilmu komunikasi yang menurut Laswel adalah siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa. Tetapi Nimmo memodifikasi sedikit ungkapan asweagar dapat tercapainya tujuan kita daam menganalisis komunikasi politik dengan merubah ungkapan “kepada siapa” diganti “dengan siapa” yang menurut Nimmo bahwa proses komunikasi itu tidak linear tetapi sirkular. Dan sebagai pengingat, Nimmo membuat perubahan kecil dalam rangkaian pertanyaan itu: siapa mengatakan apa dengan saluran apa dengan (bukan kepada) siapa dengan akibat apa. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada, adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi masyarakat menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Memilih dalam kampanye pemilihan umum adalah bentuk partisipasi yang terkenal. Partisipasi merupakan hal yang penting dan sentral dalam kehidupan politik dalam pembangunan demokrasi. Sebagai sebuah sistem politik, tentunya bertujuan untuk memberikan masyarakat seluas-luasnya forum partisipasi atau keterlibatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Hultington dan Nelson,

dikutip oleh Choisin (2017: 151), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Lebih lanjut, sebagaimana dikutip oleh Cholisin (2017: 150), Raman Surbakti memberikan definisi sederhana tentang partisipasi politik sebagai bentuk partisipasi dalam segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi.

Dan sejak saat politik itu berangsur, strategi komunikasi politik yang dibangun oleh tim sukses kandidat akan menjadi penting untuk kesuksesan pilkada, dan para calon kepala daerah yang akan memperebutkan puncak tertinggi sebagai pimpinan kota Sibolga akan bersaing ketat untuk pencapaian tujuan mereka, bentuk - bentuk dan media komunikasi politik menjadi cara dalam mendapatkan partisipan atau dukungan dari daerah pemilihan para calon kepala daerah kota sibolga. Karena dengan cara demikian pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui siapa para calon kepala daerah mereka yang akan menjadi pemimpin mereka dan sebagai pemimpin yang menjadi panutan, harapan dan untuk menjadi penyambung aspirasi rakyat di pemerintahan setidaknya 5 tahun mendatang. Beberapa partai besar mengusung calon mereka masing - masing agar bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah, ada juga pasangan dari jalur independent yang siap ikut bersaing memperebutkan jabatan tertinggi di kota Sibolga. Pada saat pelaksanaan pilkada 2020 lalu terdapat beberapa partai besar yang ikut memantapkan jalannya pilkada Kota Sibolga, salah satunya adalah Partai GOLKAR adalah suatu partai besar yang ikut serta dalam mengusung calon kepala daerah bersama dengan beberapa partai besar lainnya dalam pesta demokrasi ini karena Partai Golkar mengarahkan arah politiknya demi terbangunnya kesejahteraan rakyat dengan nilai-nilai dan doktrin Pancasila

yang sudah menjadi acuan dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat. Partai Golkar melaksanakan fungsi sebagai sebuah partai politik modern: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, merekrut kader yang berkualitas melalui sistem merit yang dipilih oleh rakyat untuk jabatan politik atau publik. Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang interaktif dan partisipatif yang membantu mendengarkan beragam gagasan, aspirasi dan kritik dari masyarakat. Hal ini menjadikan Partai Golkar sebagai salah satu partai yang memperoleh suara cukup banyak pada Pilkada 2020 di kota Sibolga. Partai Golkar mendukung Bapak Baadin Nur Tanjung dan Bapak Eddi Polo Sitangan (Abadi) untuk menghadiri Sibolga Pilkada 2020. Sibolga.

Tabel 1.2

Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sibolga Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Wali Kota & Wakil Wali Kota	Partai Pengusung
1.	Jamal & Partas	NASDEM, PERINDO, GERINDRA, DEMOKRAT, PKS
2.	Bahdin & Edi	GOLKAR, PDIP, PBB
3.	Sulham & Edward	Independent

Sumber: KPUD Kota Sibolga 2020

Persaingan antar partai politik untuk memperebutkan pasangan calon walikota dan wakil walikota berarti mereka menggunakan strategi komunikasi politik yang sangat berbeda. Kegiatan politik biasanya dilakukan oleh para pemimpin daerah Paslon di depan partai politik dan pilcadas yang merupakan bagian dari tim sukses. Misalnya, mereka

memimpin debat politik, menjalankan kampanye untuk menampilkan calon pemimpin daerah, dan mengomunikasikan visi, misi, dan program mereka. Kegiatan berlangsung ketika ia terpilih menjadi pemimpin daerah. Kajian ini juga membahas bentuk-bentuk komunikasi politik dengan publik, dan penggunaan media massa dan sosial sebagai sarana penyampaian pesan politik kepada publik. Serta beberapa cara yang biasa dilakukan partai politik untuk meningkatkan partisipasi publik: kepentingan publik untuk kemajuan, demokrasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedua, praktik pendidikan politik di depan umum, yaitu transmisi pemahaman politik. Peran ini dapat dimainkan oleh partai politik dan jaringannya, bekerja sama dengan lembaga demokrasi lainnya seperti KPU dan masyarakat sipil, untuk membangun dan memulihkan ikatan sosial (dan emosional) dengan komunitas pemilih meningkat. Ketiga, mengontrol partisipasi pemilih yang rentan, seperti pemilih pemula, pemilih pemula, pemilih lama, pemilih yang kurang akses informasi dan mungkin abstain. Keempat, pemilihan aktor yang memiliki peluang paling besar untuk memobilisasi pemilih, yaitu mereka yang tertarik untuk memilih. Dalam konteks ini, partai politik dapat menggunakan jaringan dengan unsur bipartisan untuk memobilisasi massa pemilih.

Artinya, strategi komunikasi politik masing-masing tim pemenangan pasangan Walikota/Wakil Walikota. Tergantung pada afiliasi partai (ideologi partai) dan sistem politik daerah masing-masing, tim sukses pasangan sukses merumuskan berbagai strategi dan bentuk komunikasi politik untuk meminta dukungan dan suara dari komunitas mereka. ketika Sibolga mengadakan pemilihan kota 2020 tahun lalu. Ada beberapa pasangan calon walikota dan wakil walikota dari beberapa partai besar yang mengikuti pemanasan Pilkada

Kota Sibolga, seperti NASDEM, PERINDO, GERINDRA, DEMOKRAT, PKS, GOKAR, PDIP, Partai Politik PBB, dan beberapa Partai Politik We memiliki walikota dan calon walikota. Yakni, pasangan calon Jamal dan Parthas, Pasangan Bahdin dan Eddie, serta Pasangan Sulham dan Edward. Semua suara yang masuk terdiri dari seluruh RT, RW Kota Sibolga dan dihitung suara sah dan tidak sah. Pada Pilkada Kota Sibolga 2020, jumlah suara sah sebanyak 51.327 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 499, sehingga total suara menjadi 51.826. Seluruh Pilkada RT, RW di Kota Sibolga pada tahun 2020 akan memiliki suara campuran, dengan jumlah suara laki-laki sebanyak 31.573 suara, perempuan sebanyak 32.756 suara, dan suara sebanyak 64.329 suara.

Berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan secara serentak, pemenang Pilkada Kota Sibolga 2020 yakni Paslon Jamal & Partas dengan perolehan suara terbanyak 27.494 suara diperebutkan oleh Paslon Bahdin & Edi dengan total perolehan suara 13.848. Dalam hal ini, kajian difokuskan pada bagaimana strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh partai GOKAR meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada kota Sibolga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini setidaknya strategi komunikasi politik yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Partai Golkar digunakan untuk menciptakan citra positif calon yang akan diusung untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan bagaimana kaitannya dengan dan menjadi walikota, Wakil Walikota. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul: **“Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Sibolga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sumber pada latar balik permasalahan di atas, hingga rumusan permasalahan riset merupakan selaku berikut:

Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Tingkatkan Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada Kota Sibolga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam riset ini merupakan:

Buat mendapatkan data tentang strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Partai Golkar dalam tingkatkan partisipasi politik warga pada Calon Kepala Wilayah dalam Pilkada Kota Sibolga.

1.4 Manfaat Penelitian

Khasiat penelitian ini terdiri pada 3 aspek:

- a. Aspek teoritis, riset ini bertujuan buat menaikkan pengetahuan dan bisa tingkatkan pengetahuan untuk periset menimpa strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam tingkatkan partisipasi politik warga terhadap Calon Kepala Wilayah pada Pilkada Kota Sibolga.
- b. Aspek akademis, hasil riset ini diharapkan bisa memperkaya khasanah riset serta sumber teks tentang strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam tingkatkan partisipasi politik warga terhadap Calon Kepala Wilayah pada Pilkada Kota Sibolga.

- Buat disumbangkan kepada Magister Ilmu Komunikasi, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- c. Aspek instan, riset ini diharapkan sanggup jadi rujukan pemikiran serta masukan yang membangun terpaut dalam membuat kebijakan serta komunikasi politik dalam kenaikan partisipasi politik warga pada Pilkada Kota Sibolga.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tersebut yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menarangkan tentang Latar Balik Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Riset, Metodologi Riset serta Sistematika Penyusunan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini mangulas tentang definisi Komunikasi Politik, Konsep Komunikasi Politik, Konsep Strategi Komunikasi Politik, Strategi Politik, Partisipasi Politik, BAWASLU, KPU serta Kajian Riset Yang Relevan serta Harian.

BAB III : METODE PENEITIAN

Dalam bab ini menarangkan Tata cara Riset, Kerangka Pemikiran, Definisi Konsep, Kategorisasi, Subjek serta Objek Riset, Informan, Metode Pengumpulan Informasi, Metode Analisis Informasi, Keabsahan Informasi, Deskripsi Posisi Riset.

BAB IV : HASIL PENELITIAN SERTA PEMBAHASAN

Dalam bab ini menarangkan Hasil Riset serta Ulasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menarangkan Kesimpulan serta Anjuran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi Politik

Komunikasi politik menekuni mata rantai antara komunikasi serta politik ataupun jembatan metodologis antara disiplin komunikasi serta politik. Tetapi bila disimak dari bermacam literatur, komunikasi politik sudah jadi kajian tertentu semenjak diakui oleh organisasi ilmiah International Communication Association bersama divisi lain, semacam divisi sistem data, komunikasi antar individu, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi intruksional serta komunikasi kesehatan. (Ardianto serta Q- Anees, 2017: 35) Komunikasi politik ialah kegiatan pesan orang- orang yang melaksanakan aktivitas politik, dalam wujud pengaruhi serta menstimulus orang lain buat melaksanakan aktivitas politik, baik pada tingkatan ikatan antar suprastruktur serta infrastruktur. Pesan itu berlangsung buat menjajaki pergantian serta pertumbuhan data yang di idamkan daam warga. Si aktor ataupun komunikator politik serta dapat pula diucap sekalian partisipan politik bisa paham kalau isi, tujuan serta kemauan pesan politik yang di informasikan merupakan buat pengaruhi serta membentuk opini publik. Para ahli teori ilmu politik dan ilmu komunikasi berusaha memberikan interpretasi tentang apa itu komunikasi politik. Interpretasi sulit ditemukan karena dipengaruhi oleh bidang keilmuan yang melatarbelakanginya (Harun dan Sumarno, 2016: 2). Namun, pemanfaatan tenaga ahli yang optimal telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk memperkaya literatur

ilmiah, terutama yang berkaitan dengan komunikasi politik. Littejohn (2013: 75): menyatakan.

Aksioma ini menekankan bahwa kita terus mempengaruhi pendapat orang lain, suka atau tidak suka. Aksioma ini juga menekankan bahwa setiap tindakan yang terjadi secara inheren dapat menimbulkan komunikasi. Kedua, setiap obrolan berisi dua pesan singkat, satu terkait dengan saat dua lainnya berhubungan, masing-masing terkait dengan kencana, dan kebetulan Juga, masing-masing memiliki lebih banyak komentar tentang kencana mereka. Ikatan percakapan yang merangsang seringkali bersifat non-verbal dan merupakan logam komunikasi yang diorganisasikan ke dalam pola-pola yang bermakna oleh Ini disebut pengelompokan. Tingkat interaksi seperti kalimat tidak dapat dipahami sebagai satu set elemen diskrit. Untuk diterima, mereka harus dikelompokkan bersama. Keempat, manusia menggunakan kode digital dan analog. Hubungan antara sifat dan petunjuk sebenarnya opsional. Kelima, aksioma komunikasi berkaitan dengan koordinasi atau penggantian pesan dalam interaksi. Aksioma ini menyatakan bahwa komunikator dapat bereaksi dengan cara yang sama atau berbeda. Suatu ikatan dikatakan simetris jika dua komunikator dalam ikatan tersebut memiliki sikap yang sama dan perbedaan di antara keduanya minimal. Namun, rasio tanggapan komunikator dioptimalkan, sehingga dikatakan memiliki ikatan yang baik komomententer.

” Pengaruh uraian teori tersebut, orang hendak cenderung memandang komunikasi politik pada konteks sistem transmisi pesan pada dikala terbentuknya perebutan kekuasaan.

Ali(2009: 30) berkata kalau:

“Suatu indikasi yang terjalin akibat kesalahpahaman terhadap indikasi politik yang acap kali ditafsirkan selaku kekuasaan dengan demikian komunikasi politik pula ditatap selaku politicamean(perlengkapan poitik) buat menggapai tujuan kekuasaan.” Bila pemikiran terhadap komunikasi politik didalami lebih lanjut, Nimmo(2010: 8) berkata kalau:

“ komunikasi politik merupakan metode seorang bertukar simbol, perkata yang dituliskan serta diucapkan, foto, gerakan, perilaku badan, perangai serta baju.” Kesimpulannya orang hendak paham Effendy(2009: 277) menarangkan kalau:

“Komunikasi politik ialah sesuatu kegiatan pertukaran pesan yang dicoba seorang, kelompok orang, ataupun sesuatu lembaga dalam upaya mendapatkan kewenangan buat membela rakyat, baik dalam guna selaku pelaksana pemerintahan ataupun selaku anggota suatu struktur sosial warga, serta bisa pengaruhi sesuatu kebijakan sistem kekuasaan ataupun pemerintah dalam bermacam komponen.” Terdapat 2 perihal yang butuh dicermati oleh aktor politik dalam penyampaian pesan, terlebih mengalami politik, Nimmo(2010: 36) mengatakan kalau:

“Awal, ada juru bicara untuk kepentingan yang terorganisasi. Pada biasanya orang ini tidak memegang maupun mencita- citakan jabatan pada pemerintahan; dalam perihal ini komunikator tersebut tidak semacam politikus- politikus yang membuat politik menjadikan lapangan kerjanya. Juru bicara ini umumnya pula bukan professional dalam komunikasi. Tetapi dia lumayan ikut serta dalam politik ataupun dalam komunikasi sehingga bisa diucap aktivis politik serta semi professional dalam komunikasi politik. Kedua, jaringan interpersonal termasuk komentator, komunikator politik yang paling penting. Sejumlah

penelitian telah menunjukkan bahwa banyak warga negara yang dihadapkan dengan keputusan bermotivasi politik (misalnya, ketika memilih kandidat mana yang akan dipilih) mencari nasihat dari mereka yang menghormati mereka. Saya di sini. 'Pemimpin komentar' adalah seseorang yang dimintai petunjuk atau data. Komunikasi politik menunjukkan bahwa: Pertama dan terutama, aktor politik adalah bidang studi dalam komunikasi politik, sehingga setiap kali data yang bersifat moral atau material ditransmisikan, kita membutuhkan aktor yang tidak memperhitungkan keuntungan. Kedua, distribusi data dapat ditingkatkan dengan membuka jaringan data antarpribadi kepada tokoh-tokoh berpengaruh sebagai simbol politik dalam masyarakat. Pesan komunikasi politik dapat mencakup tujuan dengan mengamati berbagai pola politik dalam masyarakat.

Burgoon (2012: 748) menyatakan bahwa pandangan lain adalah bahwa komunikasi politik dipandang sebagai atribut pesan. Dengan kata lain, aktivitas pribadi dalam ruang politik mempengaruhi perilaku komunikatif. Media berita yang digunakan harus mampu atau mampu mencapai kompetensi berupa komunikasi politik. Jangkauan media yang digunakan berkorelasi positif dengan aspek lain dari komunikasi politik. Pemikiran teoritis ini melihat politik sebagai alat yang dibutuhkan oleh semua masyarakat untuk menjelaskan sikap yang berkembang dan tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada individu, kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, sikap politik individu, sebagaimana tertanam dalam pesan politik yang disampaikan oleh media massa, mempengaruhi konstituen yang berbeda dari populasi. Apabila dimengerti pemikiran tersebut, yang mengacu pada hasil riset terhadap siaran iklan tv dalam komunikasi politik, Stamm(2010: 56) menarangkan kalau:

“Sedangkan kita mengutamakan akibat politik dari iklan calon perdebatan yang ditayangkan lewat tv, bagi Robinson yang terlihat dari pergantian merupakan waktu tayang, jaringan tv dari 5 menit jadi 30 menit selaku format yang secara mendasar mengganti proses komunikasi politik di Amerika Serikat. Bagaimanakah dengan mengganti audiens buat data politik. Audiens dalam pemberitaan tv lebih banyak(dari pada audiens media cetak) berasal dari orang- orang yang pendidikannya kurang serta secara politik dari anggota pemilih yang kurang efisien. Orang ini, merupakan lebih peka terhadap pengaruh media.” Pemikiran ini menggambarkan kalau pengaruh media elektronik selaku fasilitas komunikasi politik terhadap sikap dalam warga.

Ada sebagian pendekatan komunikasi politik ialah:

1. Pendekatan Proses. Bagi pendekatan ini kalau totalitas yang terdapat di dunia ini ialah hasil sesuatu proses. Spenger(nama Asi Oswald Spenger fisuf sejarah serta politik Jerman. Dalam 2 jilid karya utama Spenger, *Der Untergang des Abendandes*, Spenger berkomentar kalau kunci sejarah yakni hukum warga serta peradaban yang mencuat serta tenggelam dalam siklus kesekian) serta Toynbee(nama Asi Arnod Joseph Toynbee sejarawan Inggris yang populer lewat bukunya yang bertajuk *A Study of History*, berisi tentang penyelidikan secara sejarah tentang asal usul, pertumbuhan, serta kehancuran peradaban besar) mengemukakan kalau kenyataan sosial ialah sesuatu siklus yang memiliki pola- pola ulangan buat jatuh bangunnya peradaban. Pendekatan ini bisa dikatakan buat menguasai sosialisasi politik serta kebijakan publik.
2. Pendekatan Jadwal Setting. Pendekatan ini dibesarkan oleh Maxwe C. McCombs, seseorang prof periset pesan berita pula selaku direktur pusat riset komunikasi

Universitas Syracuse USA, serta Donald. Shaw, seseorang prof jurnalistik dari Universitas North Carolina. Pendekatan jadwal setting diawali dengan anggapan media massa menyaring kabar, postingan, ataupun tulisan yang hendak ditayangkan. Pilih ini dicoba oleh mereka yang diucap selaku gatekeeper, ialah mereka para wartawan, pimpinan redaksi, serta penyunting foto. Dari gatekeeper inilah yang memastikan kabar apa yang wajib dilansir serta apa yang wajib dirahasiakan.

Dalam aplikasi proses komunikasi politik kerap hadapi 4 distorsi.

1. Distorsi bahasa selaku "topeng"; terdapat euphemism(penghalusan kata); bahasa yang menunjukkan suatu lain dari yang dimaksudkan ataupun berbeda dengan suasana sesungguhnya, dapat diucap semacam diungkapkan Ben Anderson(1966)," bahasa topeng".
2. Distorsi bahasa selaku "proyek upa"; upa selaku suatu yang dimanipulasikan; upa bisa diciptakan serta direncanakan bukan cuma atas satu orang, melainkan atas puluhan apalagi ratusan juta orang.
3. Distorsi bahasa selaku "representasi"; terjalin apabila kita melukiskan suatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh, cerminan kurang baik kalangan Muslimin serta orang-orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa selaku "pandangan hidup". Terdapat 2 perspektif yang cenderung menyebarkan distoris pandangan hidup. Awal, perspektif yang mengidentikkan aktivitas politik selaku hak istimewa sekelompok orang/ dominasi politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang sekedar menekankan tujuan paling tinggi sesuatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini cuma menitikberatkan pada tujuan

paling tinggi suatu sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sebetulnya dikehendaki rakyat.

Dalam melaksanakan komunikasi politik ada pola komunikasi politik ialah:

- a) Top Down, ialah komunikasi politik dari pemimpin kepada konstituennya.
- b) Horizontal, ialah komunikasi politik yang terjalin antara orang dengan orang serta kelompok dengan kelompok.
- c) Resmi, ialah komunikasi politik lewat jalur- jalur organisasi resmi.
- d) Informal, ialah komunikasi politik lewat pertemuan ataupun tatap muka, tidak menjajaki prosedur ataupun jalur- jalur organisasi.

2.1.1 Komponen Komunikasi Politik

Bagi Nimmo (1978) ada komponen– komponen dalam komunikasi politik

- a) Komunikator Politik, ialah yang berfungsi selaku sumber penyampaian pesan politik.
- b) Pesan Komunikasi Politik, ialah statment isi pesan ataupun data politik.
- c) Media Komunikasi Politik, ialah media ataupun perlengkapan berbicara politik.
- d) Sasaran ataupun Sasaran Komunikasi Politik, ialah penerima ataupun data politik.

2.1.2 Bentuk Komunikasi Politik

Beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor politik adalah:

1. Retorika politik, yakni seni manipulatif atau teknik persuasi politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicaraan dengan pendengar melalui pidato.

2. Agitasi politik, yaitu upaya menggerakkan masyarakat, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang atau membangkitkan sentimen publik.
3. Propaganda politik, yaitu, upaya berulang yang direncanakan secara sistematis untuk membujuk orang, khalayak, atau negara untuk terlibat dalam kegiatan tertentu atas kemauan mereka sendiri tanpa paksaan atau paksaan oleh komunikasi kepentingan politik.
4. Kebijakan Humas, yaitu tugas melayani publik dengan membawa berbagai isu menjadi perhatian publik.
5. Lobi Politik. Ini adalah kegiatan komunikasi oleh politisi, politisi, pejabat dan pemimpin organisasi.
6. Kampanye politik, yaitu segala upaya terorganisir dan kampanye politik yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih, selalu mengacu pada kampanye dalam pemilihan umum.
7. Pemasaran Politik. yaitu semua kegiatan yang direncanakan secara strategis dan taktis yang bertujuan untuk menyampaikan makna politik kepada pemilih untuk mensukseskan calon atau partai politik, dan menggunakan teknik pemasaran untuk melakukan semua kegiatan politik.
8. Political branding, yaitu semua pengalaman, aktivitas, dan faktor psikologis yang terlibat dalam menciptakan brand politik yang unggul, unik, menarik, dan mampu memengaruhi benak konsumen politik.
9. Kajian politik, kajian ilmiah yang membahas komunikasi politik secara keseluruhan.

2.1.3 Fungsi Komunikasi Politik

Menurut Nair (2003), komunikasi politik memiliki lima fungsi dasar yakni :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang fakta politik yang terjadi.
2. Mendidik masyarakat tentang arti dan pentingnya fakta politik baru.
3. Menawarkan dirinya sebagai platform politik untuk menangani isu-isu politik.
4. Publikasi kepada pemerintah dan badan politik.
5. Saluran advokasi yang membantu lembaga politik dalam mempromosikan kebijakan dan program mereka.

2.1.4 Jenis Komunikasi Politik

1. Komunikasi Digital

Kehadiran era digital dan perkembangan komunikasi di media sosial mempengaruhi efektifitas komunikasi politik. Hal ini terutama berlaku untuk komunikasi politik digital. Seperti yang terjadi di Indonesia, masyarakat kini bisa mengirimkan pesan dan kritik langsung kepada politisi melalui media sosial. Komunikasi politik digital juga dapat mendistribusikan pesan secara bebas dan bertanggung jawab dalam skala besar melalui media sosial, menyampaikan pandangan, kebijakan, dan kinerja pemimpin.

2. Komunikasi Politik Pers

Pers menggunakan komunikasi politik sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan sekaligus menyediakannya bagi publik. Hal ini terutama berlaku untuk pers Indonesia. Eksistensi sejarah pers di Indonesia terkait dengan eksistensi gerakan-gerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan nasional dan hajat hidup orang banyak.

Kedua jenis media dan komunikasi politik pers memiliki dampak yang signifikan terhadap opini publik karena sifat media digital dan pers.

2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Politik

- a. Alam. Adanya perbedaan letak geografis dapat mempengaruhi berbagai komunikasi politik. Masyarakat pesisir yang memiliki bahasa komunikasi politik berbeda dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan atau pemerintahan
- b. Teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi politik juga mengalami perubahan. Akibatnya, komunikasi politik juga akan mengalami perubahan yang lebih besar dari sebelumnya.
- c. Secara ekonomi, sisi ekonomi suatu negara mempengaruhi goncangan politik dan kehidupan masyarakat. Seperti halnya perubahan dan perubahan komunikasi politik yang terjadi di masyarakat.
- d. Secara sosial budaya, faktor ini meliputi pendidikan dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan dan budaya dapat mempengaruhi komunikasi politik, dan seringkali berubah sesuai dengan budaya dan pendidikan yang ada.

2.1.6 Manfaat Mempelajari Komunikasi Politik

Manfaat mempelajari komunikasi politik adalah:

- 1) Memahami cara para aktor politik berbicara agar tidak terjadi salah paham (kesalahpahaman) ketika memaknai berita politik.
- 2) Bukan disebabkan oleh berita atau masalah penggunaan bahasa komunikasi politik.

- 3) Sebagai praktisi, kita dapat menjadikannya sebagai kajian interdisipliner ilmu, secara tepat dan benar dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Memahami, duduk dan menyikapi secara tepat isu-isu politik yang berkembang di Indonesia dan dunia.

2.2 Strategi Politik

Dalam pemilihan umum, dicari strategi politik dari pihak terkait dan partai peserta pemilihan umum. Strategi politik adalah rencana sistematis yang dijalankan untuk mencapai tujuan memenangkan arena politik. Strategi politik ini memungkinkan partai politik untuk memenangkan setiap momen perebutan kekuasaan. Strategi politik adalah seperti apa proses komunikasi yang diinginkan dalam memenangkan pertarungan politik, baik melalui partai politik maupun secara langsung melalui calon kepala daerah yang memiliki kekuatan dan pengaruh terbesar di tengah masyarakat sebagai pemilih (Abdullah 2018). . Tapi strategi politik memerlukan strategi komunikasi politik, karena operasi taktis dalam politik dilakukan melalui komunikasi. Perencanaan taktis lebih mudah dan lebih cepat ketika strategi jelas dan disepakati. Oleh karena itu, gagasan tentang strategi itu sendiri berada di garis depan, bahkan diprioritaskan ketika mempertimbangkan strategi komunikasi politik.

Oleh karena itu, peran strategi komunikasi politik sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan partisipasi dalam perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum. Strategi komunikasi politik tidak hanya menjadi faktor penentu kemenangan politik pesaing, tetapi juga dapat mempengaruhi perolehan suara suatu partai. Strategi komunikasi

politik dapat menawarkan keuntungan dalam membangun dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas dan koherensi. Namun, strategi komunikasi politik juga harus mampu memperoleh dukungan politik dan publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika politisi dapat menerapkan strategi komunikasi politik yang terstruktur dengan baik dan terstruktur dengan baik, mereka akan dapat menjalankan strategi politik dengan baik dan memenangkan suara dalam pemilihan umum.

2.2.1 Tahapan Strategi Komunikasi Politik

Perencanaan atau strategi komunikasi kebijakan yang digagas Gregory (Venus, 2009) memiliki beberapa tahapan, antara lain:

1. Analisis Masalah. Langkah pertama dalam setiap strategi komunikasi politik adalah analisis masalah. Ketika menganalisis suatu masalah, diperlukan identifikasi yang jelas, dan agar dapat diidentifikasi dengan jelas, analisis masalah harus sistematis atau terstruktur. Analisis masalah juga mencakup pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah. Ini harus menjadi dokumen faktual dan harus diperiksa secara teratur setiap saat.
2. Penetapan tujuan (perencanaan). Penetapan tujuan harus logis dan realistis. H. Mereka tidak dapat dilihat ketika mereka ditemukan. Menetapkan tujuan ini juga merupakan elemen dari proses perencanaan komunikasi politik. Nah, tujuan ini termasuk mengkomunikasikan pesan dalam bentuk pemahaman baru dan ideologi

baru, meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, membentuk persepsi, menyeimbangkan pendapat, dan mendorong orang untuk melakukan apa yang telah mereka rencanakan.

3. Segmentasi dan identifikasi sasaran atau sasaran. Ketika satu atau lebih tujuan tersegmentasi dan diidentifikasi, proses perencanaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih sengaja, atau sesuai dengan rencana masa depan. Saat mengidentifikasi tujuan, Anda perlu mengetahui beberapa tujuan tingkat, termasuk tujuan tingkat 1, tujuan tingkat 2, dan seterusnya, yang selaras dengan tujuan untuk merencanakan strategi komunikasi politik.
4. Tentukan pesan. Mendefinisikan pesan Anda sangat penting ketika merencanakan komunikasi politik.
5. Kembangkan strategi dan taktik, karena pesan komunikasi politik merupakan sarana atau wahana untuk memaksa sasaran mengikuti keinginan penyampai pesan atau komunikator berbagai program komunikasi politik untuk pada akhirnya mencapai tujuan. Pendekatan komprehensif yang digunakan dalam komunikasi politik, lebih dikenal dengan Strategy atau Guild Principles atau Great Ideals. Penentuan taktik ini tergantung pada bagaimana komunikator mengarahkan maksud dan tujuannya. Semakin kompleks dan spesifik tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka semakin kreatif dan beragam taktik yang digunakan. Di sinilah komunikator politik perlu kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan inovatif.
6. Alokasi Waktu dan Sumber Dana. Komunikasi politik tentunya dilakukan dalam waktu yang tidak menentu atau kapan saja. Bahkan ada kalanya waktu tersebut

ditentukan oleh pihak luar partai yaitu Panwasu. Ada juga yang ditentukan sendiri oleh partai itu sendiri. Pengalokasian dana dan operasionalnya ini didasari secara efektif dan efisien.

7. Evaluasi. Evaluasi ini merupakan fase akhir atau fase setelah implementasi strategi dan berperan penting dalam perencanaan komunikasi kebijakan. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk mengimplementasikan strategi komunikasi politik selanjutnya, sehingga evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan sistematis.

2.2.2 Elemen Strategi Komunikasi Politik

Berikut beberapa unsur strategi komunikasi politik:

1. Maksud dan Tujuan. Tujuan adalah hasil yang paling penting dan diharapkan dari setiap strategi komunikasi politik. Sedangkan tujuan adalah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dengan mengingat hal ini, Anda harus mempertimbangkan tujuan Anda.
2. Publikasi. Publik di sini adalah suatu objek yang dijadikan tujuan atau sasaran yang bersifat umum. Meskipun publik ini bersifat umum, namun harus dispesifikasikan secara khusus untuk menghindari istilah umum seperti masyarakat umum dan masyarakat umum. Setelah Anda menetapkan target, Anda perlu memprioritaskan dan membuat daftar publik.
3. Strategi. Strategi adalah cara paling dasar untuk melakukan sesuatu. Strategi ini bersifat umum, tetapi dengan kata lain pendekatan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

4. Taktik. Taktik ini merupakan media atau alat yang khusus digunakan untuk menyampaikan apa yang disebut dengan pesan yang ditargetkan. Tujuan taktik adalah untuk mengkomunikasikan perubahan dalam manajemen.
5. Anggaran dan waktu. Seperti biasa dalam ilmu politik, harus ada rencana yang disusun sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
6. Evaluasi. Penilaian ini diperlukan untuk menentukan keberhasilan rencana strategis komunikasi politik. Oleh karena itu, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari rencana yang telah disusun sebelumnya, Anda dapat mengembangkan strategi komunikasi politik yang lebih baik di masa depan dengan belajar dari kelemahan dan mempertahankan atau memperbaiki kekuatan.

2.2.3 Faktor-Faktor Dari Proses Strategi Politik

Faktor-faktor dalam proses strategi politik meliputi:

a. Komunikator Politik (Who)

Sosiolog J.D Haoran (Nimmo, 2010: 29) menyatakan bahwa komunikasi terjadi dalam matriks sosial. Konteks di mana komunikasi dimulai, berkembang dan berlanjut merupakan bagian integral dari sistem sosial ini. Komunikasi massa, sebagai organisasi yang sensitif dan penting dalam jaringan sosial, merespon berbagai kendala dengan menolak dan memilih semua informasi yang ada dalam sistem sosial tertentu. , berperan besar dalam masyarakat, terutama dalam proses opini publik. Seorang komunikator dapat dianalisis seperti itu. Ini berarti memberinya martabat manusia melalui sikapnya terhadap penonton dan publik. Leonard W. Doob (Nimmo, 2010: 30) mengatakan: Tiga kategori

diidentifikasi: politisi (bertindak sebagai komunikator politik), komunikator politik profesional, dan aktivis (komunikator paruh waktu).

b. Pesan Politik (Sag was)

Pesan adalah konten komunikasi yang dikemas atau disusun sebagai informasi konten politik dan disampaikan kepada khalayak melalui media, baik media massa maupun media sosial. Pesan politik merupakan salah satu elemen kunci dalam komunikasi politik dan disampaikan dari komunikator kepada komunikan dalam berbagai bentuk verbal dan non-verbal. Komunikasi politik sebenarnya membutuhkan saluran untuk menyampaikan pesan, tetapi saluran komunikasi politik meliputi: Penggunaan media massa di media cetak dan elektronik serta media sosial. Banyak politisi adalah politisi atau orang yang tertarik menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan mereka dan mempengaruhi massa. Siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa, sebagaimana dijelaskan dalam paradigma. Paradigma ini menyatakan bahwa unsur-unsur komunikasi berlaku untuk semua proses komunikasi, bahkan komunikasi politik. Komunikasi politik selalu berkaitan dengan pesan politik dan aktor politik.

c. Saluran atau Media Politik (In Wich Chanael)

Semakin kompleks dan spesifik tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, semakin kreatif taktik yang digunakan. Di sinilah komunikator politik perlu kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan inovatif. Dengan adanya konvergensi media memberikan

dampak dan pengaruh yang besar terhadap khalayak. Konvergensi media merupakan perpaduan antara media massa dan teknologi digital. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh konvergensi media adalah: Komunikasi interaktif memungkinkan pengguna untuk membuat komentar dan saran yang lebih aktif tentang informasi dan konten yang disediakan.

d. Target atau Tujuan Kebijakan (Audiens)

Grup target adalah peran sementara di mana penerima pesan memulai pengiriman pesan berikutnya. Pada saat itu, pihak yang menjadi khalayak telah mengubah peran komunikator. Dalam komunikasi politik, khalayak yang menerima pesan politik adalah khalayak politik. Khalayak, masyarakat luas atau publik, yang menerima, menafsirkan, dan terpengaruh oleh berita, informasi, atau pesan yang mengandung segala bentuk konten politik, oleh karena itu, adalah khalayak politik. Pendengar politik juga dapat memvariasikan peran mereka sebagai komunikator politik dalam situasi dan kepentingan tertentu.

e. Pengaruh Atau Efek (*what effect*)

Dampak dari strategi komunikasi politik yang digunakan oleh para calon dapat dengan cepat mempengaruhi khalayak. Misalnya, seseorang memilih kandidat berdasarkan dampak/dampaknya terhadap strategi komunikasi politik yang digunakannya. Khalayak cenderung memilih calon anggota parlemen karena mereka tanpa disadari dihadapkan pada berbagai jenis kampanye. Pendapat lain menyebutkan

bahwa “strategi komunikasi politik sebagai proses dimana komunikasi massa termasuk dalam komunikasi antar pribadi dan elemen-elemen di dalam proses komunikasi politik yang terjadi mempunyai dampak - terhadap perilaku politik” (Susanto 2014). Ada dua bentuk strategi komunikasi politik, yaitu: Pertama, strategi komunikasi politik yang cenderung mengambil (membentuk) posisi horizontal. Dalam hal ini posisi antara komunikator politik dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling memberi dan menerima) sehingga terjadi sharing, bentuk strategi semacam ini merupakan refleksi nilai-nilai demokratis. Kedua, strategi komunikasi politik yang cenderung membentuk pola linier. Arus komunikasi (informasi) satu arah cenderung vertikal (top down). Bentuk semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan kepemimpinan otoriter).

2.3 Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin pars (artinya bagian) dan capere (artinya ikut serta dalam kegiatan politik dan kegiatan pemerintahan). Jika digabungkan, artinya "berpartisipasi". Partisipasi dalam bahasa Inggris berarti partisipasi atau peran. Partisipasi berarti ikut serta dalam kegiatan politik atau kegiatan negara (Suharno, 2004: 102-103). Partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempengaruhi dan dipengaruhi kehidupan warga negara. Warga negara berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Dengan demikian, menurut Huntington dan Nelson, dikutip oleh Cholisin (2017: 151), partisipasi

politik dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertindak sebagai individu dan bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Lebih lanjut, sebagaimana dikutip oleh Cholisin (2017: 150), Raman Surbakti memberikan definisi sederhana tentang partisipasi politik sebagai bentuk partisipasi dalam segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan warga negara biasa.

Menurut Miriam Budiardjo (dalam Cholisin 2017: 150), partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, mempengaruhi kebijakan publik (ketertiban dan kesusilaan masyarakat) secara langsung maupun tidak langsung melalui pemilihan kepala negara. Kegiatan tersebut meliputi tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, dan menghubungi pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Jadi umumnya mengikuti bahwa dalam demokrasi semakin banyak peserta semakin baik. Dari sisi implementasi, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara memahami isu-isu politik dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dipandang sebagai pertanda buruk, karena dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian banyak warga negara terhadap urusan negara (Miriam Budiardjo, 2009: 369). Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan individu atau kelompok dalam menentukan atau membentuk kebijakan pemerintah. Dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan cara konvensional atau non-konvensional,

atau bahkan dengan paksaan, dalam menentukan sikap terhadap kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2.3.2 Faktor - faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik tentunya merupakan suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Raman, Surbakti (2012: 140) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi derajat partisipasi politik seseorang. Pertama, kesadaran politik pemerintah (sistem politik). Di sisi lain, menurut Mibrath, mengutip Michael Rush dan Althof (2009: 168) yakni:

- 1) Partisipasinya sendiri diberikan berbagai alasan. Mibrath menjelaskan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap impuls politik melalui kontak pribadi, organisasi dan media massa mempengaruhi partisipasi dalam aktivisme politik.
- 2) Tentang karakteristik sosial seseorang. Status ekonomi, suku, usia, jenis kelamin, pandangan dunia (agama), dll. Karakter pribadi berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang relatif besar terhadap partisipasi politik.
- 3) Ringkaslah jenis dan sistem pesta di mana orang tersebut tinggal. Bagi mereka yang hidup di negara demokrasi, massa cenderung terlibat dalam politik karena partai politik cenderung mencari dukungan rakyat dan memperjuangkan kepentingan massa.
- 4) Ada perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang mempengaruhi kepribadian individu dan perbedaan perilaku. Perbedaan regional juga mendorong perbedaan dalam aksi dan partisipasi politik. Tingkat partisipasi pemilih pemula sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ada banyak pertimbangan mengenai penggunaan hak suara. Melihat visi dan misi kandidat yang baik dari samping, tetapi tidak ada jaminan begitu seorang kandidat terpilih. Selain itu, calon penyandang dana dan calon yang diusung partai yang dianggap pemilih baru menurut kriteria dipilih dalam bentuk kredensial. Dalam perilaku memilih yang rasional, pemilih mendasarkan pilihannya pada isu politik dan calon yang diajukan, serta kebijakan yang dianggap menguntungkan bagi mereka dan yang akan diterima calon pilihannya jika terpilih. Pemilih rasional tidak hanya berpartisipasi secara pasif, mereka aktif dan berkehendak bebas.

2.3.3 Tipologi Partisipasi Politik

Jenis Partisipasi Politik A. Rahman H.I (2017: 288) menyatakan bahwa jenis partisipasi sebagai suatu kegiatan secara umum dikategorikan sebagai:

- a) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada kinerja dalam arti hanya mengikuti peraturan negara, menerima dan melaksanakan semua keputusan negara.
- c) Golongan kulit putih (Golput) atau golongan apatis percaya bahwa sistem politik yang ada menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Mibrath dan Goeyang, dikutip oleh Cholisin (2017: 152), mengelompokkan partisipasi politik ke dalam beberapa kategori.
 - 1) Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
 - 2) Partisipasi politik dari mereka yang berpartisipasi setidaknya dalam pemilihan umum.

- 3) Keterlibatan Politik Gladiator Orang-orang yang terlibat aktif dalam proses politik: komunikator, pakar antarpribadi, partai dan juru kampanye, dan aktivis komunitas.
- 4) Partisipasi Politik Kritik terhadap orang-orang yang berpartisipasi secara tidak konvensional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa arah partisipasi politik aktif didasarkan pada input dan output politik. Meskipun partisipasi pasif hanya dalam masalah. Juga diyakini bahwa orang-orang di lembaga politik yang ada dipandang menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan, yang mengarah pada partisipasi politik yang acuh tak acuh. Pillbox voting adalah bentuk partisipasi dalam politik mapan. Kegiatan ini hanya mencakup pemungutan suara, tetapi juga mencakup slogan kampanye, pekerjaan penjangkauan pemilu, bantuan tempat pemungutan suara, dan banyak lagi.

Di sisi lain, dikutip oleh A. Rahman H.I. (2017: 289), partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi peserta menjadi enam tingkatan. pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima ide, sikap, dan informasi lain dan menyampaikannya kepada orang lain), anggota masyarakat, dan kelompok terpinggirkan (orang yang memiliki sedikit kontak dengan sistem politik). , dan kelompok terisolasi (mereka yang jarang terlibat dalam politik). Partisipasi politik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah aktor: individu dan kolektif. Individu adalah seseorang yang menulis surat kepada pemerintah dengan klaim atau keluhan. Partisipasi kolektif, di sisi lain, mengacu pada kegiatan warga negara yang juga mempengaruhi otoritas, seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

2.3.4 Bentuk Partisipasi Poitik

Bentuk partisipasi politik dalam Cholisin (2017: 153) mengacu pada derajat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik didefinisikan sebagai partisipasi aktif, partisipasi pasif depresif (indifference), partisipasi ekstremis, empat jenis partisipasi radikal). Partisipasi pasif Partisipasi aktif, ialah warga dengan pemahaman politik yang besar serta keyakinan yang besar kepada pemerintah, sepatutnya mempunyai pemahaman politik yang rendah serta keyakinan yang rendah kepada pemerintah., kala pemahaman sangat rendah namun keyakinan pada pemerintah sangat besar, partisipasi ini dikatakan tidak aktif(pasif). Aktivitas politik konvensional serta non- konvensional, tercantum yang bisa jadi sah(petisi) ataupun ilegal(metode kekerasan ataupun revolusioner) membedakan antara bermacam wujud partisipasi politik yang terjalin di bermacam negeri. Aku dapat melaksanakannya. Wujud serta frekuensi partisipasi politik bisa digunakan selaku dimensi stabilitas institusi politik, keutuhan kehidupan politik, serta kepuasan ataupun ketidakpuasan masyarakat negeri.

Bentuk- bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Amond yang dilansir oleh Mohtar Masoed (2011: 57- 58) bisa dibedakan jadi 2 wujud: partisipasi politik konvensional serta partisipasi politik non- konvensional. Rincian wujud partisipasi politik konvensional serta nonkonvensional.

1) Partisipasi Politik Tradisional

- a) Pemungutan Suara ataupun Pemungutan Suara
- b) Debat Politik
- c) Kampanye Pemilu

- d) Pembuatan serta Partisipasi dalam Kelompok Kepentingan
 - e) Komunikasi Individu dengan Pejabat Politik ataupun Administratif
- 2) Partisipasi Politik Non Tradisional
- a) Pengajuan petisi
 - b) Demonstrasi
 - c) Bentrokan
 - d) Pemogokan
 - e) Kekerasan politik terhadap properti: Vandalisme, pengeboman, serta pembakaran
 - f) Kekerasan politik terhadap rakyat: Penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

David F. Roft serta Frank, setelah itu dilansir oleh A Rahman H. I(2017: 286), memakai wujud partisipasi sipil berbasis keseriusan. Intensitas terendah sebagai pengamat, intensitas sedang sebagai peserta, dan intensitas tertinggi sebagai 30 peserta. Ketika intensitas aktivitas masyarakat disamakan dengan aktivitas politik, maka terbentuklah piramida partisipasi politik.

1. Ketertarikan pada proyek sosial. Dan kelompok di puncak piramida adalah kelompok aktivis. Anggota kelompok ini relatif sedikit penduduknya dan merupakan pejabat penuh waktu partai, pemimpin partai, atau kelompok kepentingan.
2. Bentuk partisipasi pemuda adalah demonstrasi, pemogokan dan protes. Metode yang umum digunakan oleh pemilih muda untuk berpartisipasi dalam civil engagement adalah dengan bergabung dengan salah satu partai politik lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye dan berpartisipasi dalam debat politik lokal. Karakteristik

utama pemilih baru, atau pendorong partisipasi pemilih, adalah tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat umum. Serta partisipasi dalam dinamika aksi politik.

3. Perilaku memilih. Perilaku memilih adalah seperangkat kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (Cholisin 2004: 126). Sedangkan menurut Prihatmoko (2018: 46), perilaku memilih adalah partisipasi warga negara dalam pemilu sebagai rangkaian keputusan.
4. Aksi politik. Menurut Raman Surbakti (2012: 131), aksi politik secara umum dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan keputusan publik. Di sisi lain, menurut Sudijono Sastroadmodjo (2013: 3), tindakan politik adalah kegiatan bersama di mana masyarakat melalui proses memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaan.
5. Tindakan politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, pedoman untuk mencapai tujuan tersebut, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan penguasa mengatur kehidupan sosial. Ada tiga analisis untuk melakukan penelitian tentang perilaku politik yakni:
 - a. Aktor politik individu meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan warga negara biasa.
 - b. Agresi secara kolektif mencakup aktor individu seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga negara.

- c. Apa yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik, yaitu tipe kepribadian otoriter, Machiavest, dan demokratis.

Sebagai hasil dari pendekatan di atas, dibangun sebuah model untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik individu sebagai berikut.

- a) Sistem politik, ekonomi, budaya dan media.
- b) Lingkungan sosial

2.3.5 Konfigurasi Pemilih

Konfigurasi Pemilih Firmanzah (2008: 119) Pertama, pemilih yang rasional ditandai dengan kurang memperhatikan ideologi kandidat dan lebih menekankan pada kompetensi kandidat dalam rencana kerja. Kedua, pemilih kritis merupakan kombinasi dari orientasi tinggi dan kompetensi seorang kandidat pada isu-isu lokal, yaitu orientasi ideologis yang tinggi. Para pemilih inilah yang akan mendasarkan pemilihan pada nilai-nilai ideologis mereka dan mengkritik kebijakan pemerintah setelah menjabat. Ketiga, pemilih tradisional memiliki ideologi yang begitu tinggi sehingga mereka tidak benar-benar melihat politik kandidat sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam pemilu. Pemilih tradisional adalah pemilih yang biasanya dimobilisasi pada saat pemilu (Rohrschneider, 2012: 367). Pemilih ini ditandai dengan loyalitas yang tinggi. Berorientasi pemecahan masalah kebijakan, pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih rendah, pemilih tradisional. Dan keempat, para pemilih yang kandidatnya secara ideologis tidak cukup tinggi untuk membuat kebijakan mereka penting. Dari kelompok pemilih ini muncul sekelompok orang kulit putih (golput) yang enggan memilih (Fimanzah, 2008: 121-123).

2.3.6 Teori Behavioralisme

Teori behavioris ini berfokus pada perilaku politik individu, menekankan sejauh mana pengetahuan politik berperan dalam mempengaruhi perilaku politik (Nasiwan, 2010: 33). Behavioris berusaha menjelaskan perilaku manusia dalam aktivitas politik. Teori sistem umum juga diyakini mendasari munculnya teori behavioris. Teori ini berpandangan bahwa motivasi utama perilaku atau perilaku politik manusia adalah keinginan untuk melipatgandakan kegunaan sesuatu yang bernilai (Nasiwan, 2010: -34). David Easton dalam Nasiwan (2010: 37) mengungkapkan model psikologis yang berusaha memahami perilaku yang menghambat proses belajar dengan menggunakan variabel-variabel seperti:

1. Bentuk mencoba untuk mendapatkan akses ke kekuasaan).
2. Ada semacam dorongan yang membuat kita berusaha keras untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan.
3. Variabel orang semacam genetika, umur, tipe kelamin Keadaan visual yang memastikan gimana orang memandang kesempatan dalam wujud aksi). Sikap psikologis berarti kalau proses belajar, uraian, anggapan, serta simbolisme terjalin dalam sikap politik manusia, bersama dengan atensi, tujuan, serta motivasi. Tingkatan sosialisasi berikutnya merupakan kedewasaan, yang tercermin dalam citra diri serta harga diri, mempunyai karakter yang positif, serta orang berusia cenderung lebih ideologis serta berperan defensif. Mereka berteman dengan orang-orang yang beranggapan sama, kelompok, gerakan, ataupun orang-orang yang kadang-kadang

menyimpang dari seluruh pandangan hidup. David E. Apter dalam Nasiwan(2010: 39) mencantumkan sebagian model sosialisasi:

- a) Model penumpukan, terus menjadi seseorang orang bisa menguasai bermacam pengetahuan serta ilmu tentang apa yang dianut(konteks politik), terus menjadi bertambahah harapan orang tersebut terhadap kedudukan politik.
- b) Model alih antar individu, memproyeksikan kekuasaan yang ada pada orang yang dinilai mempunyai kesepadanan dalam pemaknaan kekuasaan tersebut, walaupun tidak bisa dikatakan sama sedikitpun terlebih sebanding, misalnya seseorang anak menguasai kekuasaan seseorang presiden yang dilihatnya di tv selaku kekuasaan yang proporsional dengan keberkuasaan bapaknya.
- c) Model identifikasi, Pengambian perilaku yang seragam dengan figur berarti serta lebih tua. Contoh seseorang anak mempunyai kecenderungan ikut memilah serta menunjang partai politik yang jadi opsi orang tuanya.
- d) Model pertumbuhan kognitif. Uraian konseptual selaku proses berfikir anak buat memperluas cakrawala berfikir serta tingkatan tingkatan kognisi anak menimpa pemahaman hendak jaringan isu- isu serta politik, supaya tidak terjalin proses indoktrinasi semata.

2.3.7 Teori Pilihan Rasional

Seperti yang dikatakan James S. Coeman (dalam George Ritzer, 2017: 394), teori rasional pada dasarnya didasarkan pada gagasan bahwa perilaku manusia jelas mengarah pada tujuan, dan tujuan ditentukan oleh nilai atau pilihan yang jelas dalam pemikirannya. Teori Coeman memiliki dua elemen utama: aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah

sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikendalikan oleh seorang aktor. Teori rasional berfokus pada aktor. Menurut George Litzer (2017: 394), aktor dipandang sebagai orang yang memiliki tujuan atau maksud. Artinya aktor memiliki tujuan untuk mencapai tujuannya, dan mereka juga memiliki nilai dan pilihan. Teori ini tidak mempertimbangkan apa itu seleksi atau apa itu pemilihan sumber agen. Adalah penting bahwa aktor melakukan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Menurut Cholisin (2017-155), pilihan rasional adalah aktivitas memilih sebagai produk kurasi keuntungan dan kerugian. Tidak hanya "biaya" pemungutan suara, dan kemungkinan pemungutan suara akan mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga berbagai alternatif dalam bentuk opsi dipertimbangkan. Jika teori rasional ini relevan dengan pemilih pemula, pemilih pemula sebagai aktor di ruang publik memiliki tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Tujuan bervariasi - ketidakpedulian, kepedulian terhadap keuntungan pribadi, menanggapi protes terhadap calon potensial yang tidak setuju dengan pemerintah atau pilihan mereka.

2.4 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawasul sesuai dengan Bab 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Anggota DPR. Bawasul memiliki 5 anggota. Anggota Bawaslu terdiri dari profesional non-partai yang memenuhi syarat untuk

melakukan pengawasan. Anggota Bawasul dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Direktur Eksekutif Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2.4.1 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemilihan parlemen dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanganan pelanggaran untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Ini termasuk:
 - a) Pengawasan persiapan pemilihan parlemen. Ini termasuk: Menetapkan jadwal untuk setiap fase pemilihan federal.
 - b) Perencanaan Pengadaan Logistik oleh KPU.
 - c) Menetapkan daerah pemilihan Dewan Rakyat Nasional dan Dewan Rakyat kabupaten/kota dan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan regulasi.
 - d) Sosialisasi Pemilu Federal. 6) Melaksanakan tugas pengawasan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 2) Penetapan peserta pemilihan Pemilu;
- 3) Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil Presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peaksanaan kampanye;
- 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan pemilu di TPS;
- 7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
- 9) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- 11) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
- 12) Pelaksanaan putusan DKPP; dan
- 13) Proses penetapan hasil Pemilihan pemilu.

2. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
3. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
4. Memantau pelaksanaan keputusan kecurangan pemilu.
5. Evaluasi Pengawasan Pemilu; dan
6. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berwenang:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu.
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, meninjau laporan dan temuan, dan membuat rekomendasi kepada pihak berwenang.
3. Penyelesaian sengketa pemilu
4. Pembentukan Bawasul provinsi. contoh Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawasul Negara.
5. Melaksanakan kekuasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bawaslu berkewajiban:

- a) Tidak diskriminatif dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

- b) Memberi nasihat dan mengawasi pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu di semua tingkatan.
- c) Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran penegakan peraturan perundang-undangan Pemilu.
- d) Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, tergantung pada tahapan pemilihan umum federal.
- e) Kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan peraturan lainnya.

2.5 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan negara dan dapat dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dalam negara kesatuan republik, dan secara adil. Pancasila dan Komisi Pemilihan Umum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga pemilihan nasional yang permanen dan independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU akan tetap menjalankan tugasnya dan tidak akan terpengaruh oleh partai politik manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemilihan umum federal. KPU berkedudukan di ibu kota negara

Republik Indonesia, KPU provinsi di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing didukung oleh sekretariat. KPU memiliki 7 anggota. Hingga 5 KPU per negara bagian. dan KPU Kabupaten/Kota maksimal 5 pemain. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota dan menjadi anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh anggota dari antara anggota. Seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhitungkan proporsi perempuan paling sedikit 30% (30%). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Provinsi/DPR adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal sumpah/janji.

2.5.1 Latar belakang Berdirinya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pimpinan serta anggota KPU dikala ini ialah anggota KPU periode ke- 6 yang dibangun semenjak reformasi 1998. KPU awal(1999- 2001) dibangun dengan Keputusan Presiden Nomor. pemerintah serta partai politik. KPU awal dinaikan oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua(2001- 2007) dibangun dengan Keputusan Presiden No 10 Tahun 2001 serta terdiri dari 11 faktor akademik serta SM. KPU kedua diluncurkan pada 11 April 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid(Gus Dur). KPU III(2007- 2012) dibangun bersumber pada Keputusan Presiden No 101/ P/ 2007 serta ditetapkan pada 23 Oktober 2007 oleh 7 anggota KPU provinsi, akademisi, periset, serta pejabat pemerintah. Terdiri dari anggota, kecuali Syamsulbahri, mereka tidak dinaikan oleh presiden sebab

permasalahan hukum. Menyikapi Pemilu Legislatif 2009, citra KPU butuh diganti supaya bisa berperan secara efisien serta memfasilitasi terselenggaranya pemilu yang jujur serta adil.

Penyelenggaraan pemilu yang jujur serta adil ialah aspek berarti dalam memilah wakil rakyat yang lebih sanggup serta sanggup mengantarkan aspirasinya. Selaku anggota KPU, integritas moral sangat berarti untuk aku selaku penyelenggara pemilu. Tidak cuma jadi motor penggerak di balik KPU, namun pula dijalankan oleh orang-orang yang jujur serta adil, yang membuat KPU terus menjadi kredibel di mata publik. Cuma 3 tahun sehabis berakhirnya pemilu parlemen 2004, pemerintah serta DPR berpikiran buat tingkatkan mutu pemilu parlemen, tercantum penyelenggara. Selaku penyelenggara pemilu, KPU bertabiat independen serta nonpartisan. Buat itu, Undang- Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disusun serta disahkan bersama Pemerintah atas prakarsa DPR- RI. Lebih dahulu, keberadaan penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22- E UUD 1945 serta UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan DPR, DPD, serta DPRD, dan Undang- Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden. serta Wakil Presiden disertakan. Presiden. Sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, penyelenggara pemilihan universal dicoba oleh Komisi Pemilihan Universal yang permanen serta independen di segala negara.

Watak kebangsaannya mencerminkan kalau ruang lingkup serta tanggung jawab KPU selaku penyelenggara pemilihan universal meliputi segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. KPU sudah menampilkan ketangguhannya selaku organisasi yang senantiasa melaksanakan tugasnya walaupun masa jabatannya terbatas. Independensi ini

membenarkan KPU tidak terbawa- bawa oleh partai politik manapun dalam menyelenggarakan pemilihan parlemen federal. Pergantian Berarti atas Undang- Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Tercantum di dalamnya peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wilayah serta badan- badan penyelenggara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah. Hak seleksi umum buat presiden serta wakil presiden. Pemilihan universal kepala wilayah serta wakil kepala wilayah yang lebih dahulu diatur dalam sebagian peraturan perundang- undangan, setelah itu disempurnakan secara lebih komprehensif dalam satu undang- undang.

Bagi Undang- Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/ Kota diatur selaku penyelenggara pemilu senantiasa, serta Bawasur selaku lembaga pengawas pemilu. KPU melakukan tugasnya cocok dengan peraturan perundang- undangan serta bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilihan universal serta tugas- tugas yang lain. KPU mengantarkan laporan kepada Pimpinan DPR. Undang- Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pula mengendalikan status komisi pemilu, antara lain PPK, PPS, KPPS, serta PPN, dan penyelenggara spesial pemilu, KPPSN. KPU memainkan kedudukan kunci dalam penerapan seluruh tahapan pemilihan parlemen terpaut dengan pengawasan penerapan pemilihan parlemen langsung, umum, leluasa, rahasia, jujur serta adil. Menyusun serta menetapkan kode etik penyelenggara pemilu terpaut terwujudnya KPU serta Bawasul yang berintegritas serta kredibel selaku penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan KPU, KPU Negeri, serta Bawasul sudah dibangun buat mempraktikkan

Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu dalam UU Nomor. 12 Tahun 2003.

2.5.2 Tugas dan Kewenangan KPU

Tugas KPU sebagaimana diatur pada Pasal 12 Undang- Undang No 7 Tahun 2017 menimpa Pemilihan Universal, ialah:

- 1) Merancang kegiatan& ketentuan serta tetapkan jadwal
- 2) Menyusun atur kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSN, serta KPPSN
- 3) Menyusun Peraturan KPU buat tiap tahapan Pemilu
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengatur, memantau segala tahapan Pemilu
- 5) Menerima catatan Pemilih bersumber pada KPU Provinsi
- 6) Memutakhirkan informasi Pemilih bagi informasi Pemilu terakhir memakai mencermati informasi kependudukan yang disiapkan serta diserahkan pada Pemerintah serta menetapkannya jadi catatan Pemilih
- 7) Membuat liputan program serta sertifikat rekapitulasi output penghitungan bunyi serta wajib menyerahkannya pada saksi Partisipan Pemilu serta Bawaslu
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, serta Pendamping Calon terpilih serta menghasilkan liputan acaranya
- 9) Menindaklanjuti memakai lekas vonis Bawaslu atas penemuan serta laporan terdapatnya dugaan pelanggaran ataupun konkurensi Pemilu
- 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu ataupun yang berkaitan memakai tugas& kewenangan KPU pada rakyat

- 11) Melaksanakan evaluasi serta menghasilkan laporan tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- 12) Melakukan tugas lain pada Penyelenggaraan Pemilu sinkron memakai syarat peraturan perundang-undangan Berikutnya dalam Pasal 13, KPU memiliki wewenang jadi berikut:
 - a) Menetapkan atur kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPN, serta KPPSN
 - b) Menetapkan Peraturan KPU buat tiap tahapan Pemilu
 - c) Menetapkan Partisipan Pemilu
 - d) Menetapkan serta mengumumkan output rekapitulasi penghitungan bunyi taraf nasional bagi output rekapitulasi penghitungan bunyi pada KPU Provinsi buat Pemilu Presiden, wapres serta buat Pemilu DPR serta output rekapitulasi penghitungan bunyi pada tiap KPU Provinsi buat Pemilu anggota DPD memakai menghasilkan liputan program penghitungan bunyi serta sertifikat output penghitungan bunyi
 - e) Menerbitkan keputusan KPU buat mengesahkan Pemilu lalu mengumumkannya
 - f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota buat setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - g) Menetapkan baku dan kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan
 - h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPN

- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPN
- j) Menjatuhkan hukuman administratif atau menonaktifkan interim anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPN, anggota KPPSN dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung menurut putusan Bawaslu atau ketentuan perundang - undangan
- k) Menetapkan tempat kerja akuntan publik buat mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
- l) Melaksanakan kewenangan lain pada Penyelenggaraan Pemilu sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Tugas KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Universal, ialah:

- a) Merancang program serta anggaran dan menetapkan jadwal
- b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSN, serta KPPSN
- c) Menyusun Peraturan KPU buat tiap tahapan Pemilu
- d) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengatur, serta memantau seluruh tahapan Pemilu
- e) Menerima catatan Pemilih dari KPU Provinsi

- f) Memutakhirkan informasi Pemilih bersumber pada informasi Pemilu terakhir dengan mencermati informasi kependudukan yang disiapkan serta diserahkan oleh Pemerintah serta menetapkannya selaku catatan Pemilih
- g) Membuat kabar kegiatan serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan harus menyerahkannya kepada saksi Partisipan Pemilu serta Bawaslu
- h) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, serta Pendamping Calon terpilih dan membuat kabar acaranya
- i) Menindaklanjuti dengan lekas vonis Bawaslu atas penemuan serta laporan terdapatnya dugaan pelanggaran ataupun sengketa Pemilu
- j) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu serta/ ataupun yang berkaitan dengan tugas serta wewenang KPU kepada masyarakat
- k) Melaksanakan penilaian serta membuat laporan tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- l) Melakukan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan

Berikutnya pada Pasal 13, KPU mempunyai kewenangan selaku berikut:

- a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPN, serta KPPSN
- b) Menetapkan Peraturan KPU buat tiap tahapan Pemilu
- c) Menetapkan Partisipan Pemilu
- d) Menetapkan serta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkatan nasional bersumber pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi buat Pemilu Presiden serta Wakil Presiden serta buat Pemilu DPR dan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di tiap KPU Provinsi buat Pemilu anggota DPD dengan membuat kabar kegiatan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara

- e) Menerbitkan keputusan KPU buat mengesahkan Pemilu serta mengumumkannya
- f) Menetapkan serta mengumumkan perolehan jumlah sofa anggota DPR, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/ kota buat tiap partai politik Partisipan Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota
- g) Menetapkan standar dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan
- h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, serta PPN
- i) Mengangkat, membina, serta memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota, serta anggota PPN
- j) Menjatuhkan sanksi administratif serta/ ataupun menonaktifkan sedangkan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota, anggota PPN, anggota KPPSN serta Sekretaris Jenderal KPU yang teruji melaksanakan aksi yang menyebabkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang lagi berlangsung bersumber pada vonis Bawaslu serta/ ataupun syarat perundang- undangan
- k) Menetapkan kantor akuntan publik buat mengaudit dana Kampanye Pemilu serta mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
- l) Melakukan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan.

2.6 Kajian Penelitian Yang Relevan dan Jurnal

Terdapat sebagian literatur riset yang relevan yang bisa digunakan selaku rujukan buat merendahkan prinsip- prinsip kebaruan dari riset yang terdapat.

a. Kajian Aditya Putra(2020)

Kajian Aditya Putra(2020) judul:``Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Tingkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pendaatang baru(Riset Permasalahan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare). Tingkatan partisipasi politik anak muda di Indonesia, spesialnya di kota Pare- Pare, relatif rendah. Perihal ini jadi perkara dikala mencoblos pada Pilkada serentak 2019. Ini ialah pemilu awal di Indonesia yang menyelenggarakan pemilu parlemen serta eksekutif secara berteepatan. Oleh sebab itu, parpol baru, spesialnya yang spesial menysasar segmen pemilih pendaatang baru semacam Partai Solidaritas Indonesia, butuh mempunyai strategi komunikasi politik yang inovatif serta kreatif buat menarik pemilih baru. Hasil analisis riset menampilkan kalau Partai Solidaritas Indonesia di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan tingkatkan partisipasi politik pemilih baru, serta perolehan suara calon anggota parlemen Partai Solidaritas Indonesia di Kota Parepare dipengaruhi oleh komunikator, pesan, saluran, komunikasi, serta dampak umpan balik. Secara universal bisa dikatakan kalau upaya Partai Solidaritas Indonesia memenangkan suara di kota Parepare pada Pilkada serentak 2019 kandas sebab mengalami hambatan baik di dalam partai(internal) ataupun eksternal(eksternal).). Tetapi, kedatangan partai ini secara spesial sudah menolong tingkatkan partisipasi politik kelompok pemuda serta pemilih baru di kota Parepare.

b. Kajian Lailatul Faiza(2019)

Kajian Lailatul Faiza(2019), judul:“ Pks Politik Strategi Komunikasi dalam Pemilihan Universal(Pemilu) Kota Pekanbaru 2019”. Pemilu merupakan metode buat memilah wakil rakyat, serta keberadaan pemilu merupakan mekanisme politik buat merekrut serta memilah mereka yang duduk di tubuh perwakilan. Pemilu ialah salah satu karakteristik sistem politik yang demokratis. Pemilu tidak terlepas dari partai politik serta politisi, salah satunya merupakan Partai Keadilan Sejahtera(PKS). PKS, dulu bernama Partai Keadilan(PK), didirikan pada 20 April 2002 di Jakarta. Partai- partai politik serta politisi berlomba- lomba merebut suara paling banyak, paling utama buat duduk di sofa legislatif DPRD Kota Pekanbaru, supaya sukses muncul di parlemen serta mewakili rakyat. Tujuan riset ini merupakan buat mengenali serta mendeskripsikan strategi komunikasi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) dalam tingkatkan perolehan suara pada Pemilihan Universal(Pilkada) Kota Pekanbaru 2019. Tata cara pengumpulan informasi dalam riset ini merupakan tata cara wawancara serta dokumentasi. Maksudnya, mereduksi informasi, memilah yang sangat berarti, menyajikan informasi dalam wujud deskripsi pendek, bagan, ikatan antar jenis serta menarik kesimpulan dan anjuran. Bersumber pada hasil riset serta ulasan, strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera(PKS) buat tingkatkan perolehan suara pada pemilihan universal(pemilu) 2019 di Kota Pekanbaru merupakan kepribadian serta kelembagaan, menghasilkan kohesi serta Membangun konsensus.

c. Kajian Yati dan Said Nuwrun Thasimmim (2019)

Kajian Haryati Yati serta Said Nuwrun Thasimmim(2019), judul:“ Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Karimun 2019- 2024 Riset ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan tingkatan partisipasi serta keyakinan publik dalam pemilihan perwakilan nasional oleh partai politik. Ketidakpedulian warga terhadap pemilu mencerminkan perilaku Golput, tetapi realitasnya Partai Golkar sehabis Partai Demokrat. 8 dari 30 parpol 14 30. 955 suara ataupun 26, 6 sofa dalam pemilihan universal yang diselenggarakan serentak. Memenangkan Pilkada Kabupaten Karimun 2019- 2024 dalam strategi komunikasi politik Partai Golkar. Riset ini dicoba di Kabupaten Karimun. Selaku informan ataupun responden dalam riset ini merupakan pengurus DPD Partai Golkar, Tubuh Pemenangan Pemilu(BAPILU) Partai Golkar serta Calon legislatif Partai Golkar yang terpilih. Teori yang periset pakai dalam riset ini merupakan teori strategi komunikasi Harold D asweyang melaporkan kalau metode yang terbaik buat menerangkan aktivitas komunikasi ataupun metode buat menggambarkan dengan pas suatu aksi komunikasi iaah menanggapi persoalan“ World Health Organization Says What In Which Channel To Whom With What Effect(siapa berkata apa dengan metode apa kepada siapa dengan dampak gimana) Dalam riset ini periset memakai tipe riset kualitatif deskriptif, dimana data- data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan merujuk pada teori- teori yang relevan dengan riset ini yang berikutnya diinterpretasikan serta dipaparkan dalam hasil riset. Hasil periset yang sudah periset jalani menampilkan kalau strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Kabupaten Karimun dalam pemilu legislatif periode 2019- 2024 dengan strategi yang digunakan membentuk lembaga

kaderisasi dengan membagikan pelatihan pembelajaran politik, penyampaian program-program partai dengan melaksanakan pertemuan tatap muka dengan melaksanakan komunikasi 2 arah, dan melakukan aktivitas yang memegang warga serta menguatkan konsolidasi internal ataupun eksternal partai. Melaksanakan kampanye dengan media cetak, sosial media, dengan mengadakan kampanye dialogis terbuka dengan pendekatan tokoh-tokoh lokal, mengangkat isu- isu ekonomi kerakyatan.

d. Kajian Dikhorir Afnan(2017)

Kajian Dikhorir Afnan(2017) Judul:“ Strategi Komunikasi Politik Regu Berhasil di Pilkada Kabupaten Kuningan” Strategi komunikasi politik butuh dianalisis. Strategi ini tidak cuma memastikan kemenangan politik pesaing, namun pula pengaruhi perolehan suara partai. Strategi ini menawarkan banyak keuntungan lewat aktivitas taktis yang bisa membangun serta menghasilkan kekuatan lewat kontinuitas serta konsistensi. Riset ini bertujuan buat mengenali strategi komunikasi regu berhasil yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Subyek riset ini merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan periode 2004- 2009 serta 2009- 2014. Tata cara riset yang digunakan merupakan tata cara kualitatif dengan tradisi riset permasalahan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan penulis dicoba oleh sukarelawan mahasiswa dari Kementerian Ilmu Sosial UMC, dengan memakai wawancara mendalam, riset dokumen, serta riset kepustakaan. Secara universal, kesimpulan riset ini menampilkan kalau zonasi konstitutif memainkan kedudukan yang sangat berarti dalam kelayakan kandidat buat

posisi kepemimpinan wilayah. Oleh sebab itu, kedudukan regu pemenangan dalam membimbing para calon buat berhasil dalam pemilihan universal sangat berarti.

e. **Kajian Ridho Satrio Hutomo(2014)**

Kajian Ridho Satrio Hutomo(2014), judul:“ Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Dalam Perjuangan Mobilisasi Pilkada Kota Semarang Tahun 2014”. Riset ini bertujuan buat mengenali strategi komunikasi politik suatu partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI- Perjuangan) Kota Semarang. Pemilu 2014 di kota Semarang menunjukkan sebagian fenomena unik terpaat perjuangan PDI. Kota Semarang mempunyai pimpinan partai PDI- P, tetapi kandas menang pada 2009 serta saat ini unggul dengan skor lumayan besar. PDI- Perjuangan dahulu meraup untung lumayan besar pada 2004.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan jurnal:

Persamaan dari kelima kajian di atas adalah bahwa partai politik menggunakan komunikasi politik, seperti komunitas, untuk memperkuat integrasi internal dan eksternalnya. B. Melakukan kampanye dengan mendidik warga, memberikan pelatihan, dan menawarkan program partai. Untuk mencapai hasil terbaik dengan beberapa strategi komunikasi politik, sejalan dengan tujuan memenangkan pemilihan umum dan Pilkada yang diadakan di seluruh Indonesia dan sejalan dengan tujuan meningkatkan kehadiran politisi, Melakukan kampanye dialog terbuka oleh Partai melalui media, media sosial. Partai politik juga mempengaruhi kebijakan partisipasi di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

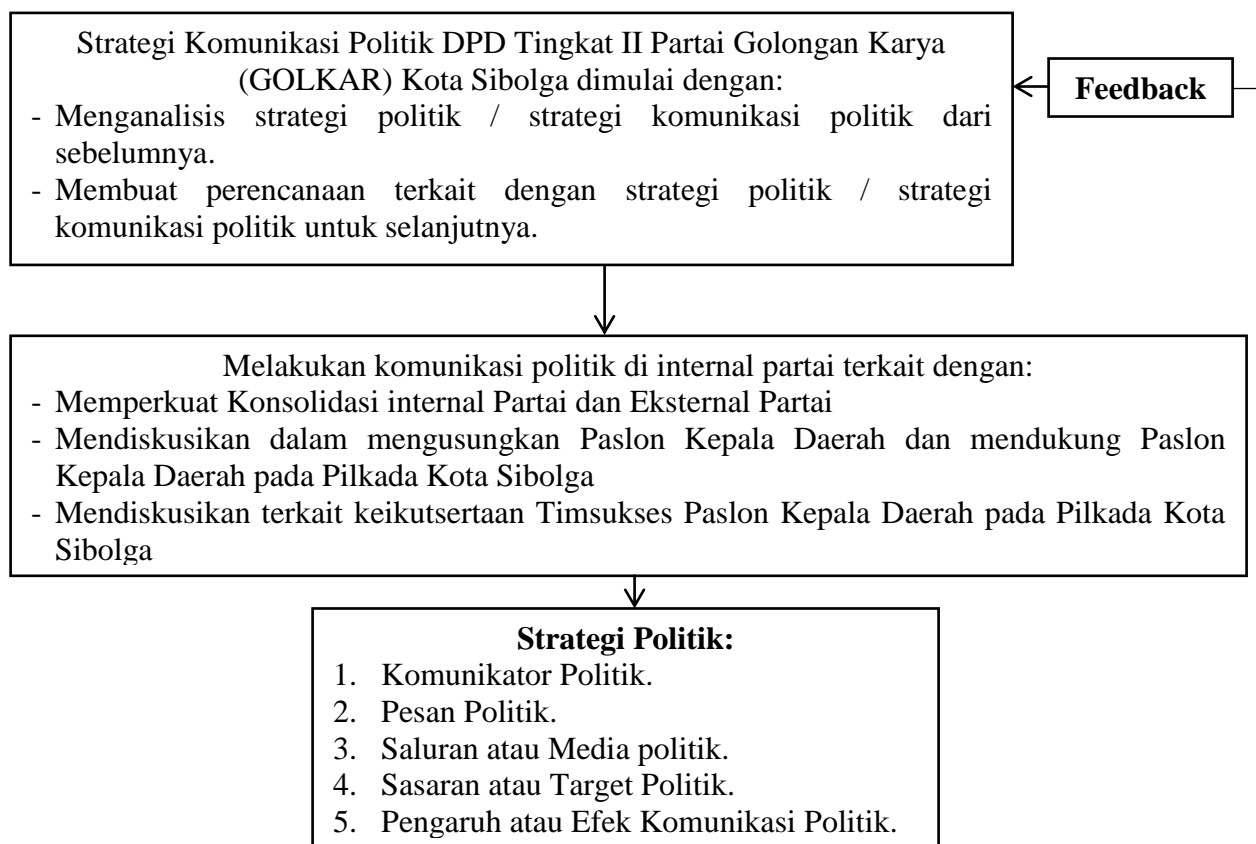
3.1 Metode Penelitian

Dalam memutuskan suatu metode penelitian, perlu dipahami terlebih dahulu jenis penelitian yang akan dilakukan, memahami gambaran penelitian secara keseluruhan, memahami makna sebenarnya dari isi penelitian, dan memudahkan untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Proses analisis data. Menurut Sugiyono (2016: 6), metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah. dapat digunakan untuk pendidikan. Sugishirono (2016: 3) Metode penelitian secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, empat kata kunci yang perlu diperhatikan adalah metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugikino, 2017: 2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dipadukan dengan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian saat ini dengan menggunakan fakta-fakta yang terlihat, dan dengan mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data secara langsung, merupakan metode pembelajaran proses pemecahan masalah. melalui pengamatan langsung. Yang dibutuhkan.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah diagram yang menguraikan alur logis dari sebuah studi penelitian. Kerangka berpikir didasarkan pada pertanyaan penelitian (research question) dan menyajikan seperangkat konsep dan hubungan di antara mereka, sedangkan kerangka berpikir menggabungkan teori dengan fakta, pengamatan, dan tinjauan pustaka, dan digunakan sebagai dasar untuk penelitian. Menurut Unaradjan (2019: 89), kerangka kerja adalah penyimpulan yang berisi gabungan fakta, pengamatan, dan kajian kepustakaan serta teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Di sisi lain, Sugishirono (2017: 60) mengemukakan bahwa kerangka kerja adalah model konseptual tentang bagaimana berbagai faktor dan teori yang diidentifikasi sebagai masalah utama saling terkait.

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran



↓

Melaksanakannya sesuai dengan strategi Politik / strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim sukses dan Paslon Kepala Daerah seperti: melakukan kampanye terbuka secara langsung dan melalui media cetak, sosial media terkait dengan pengenalan paslon Kepala Daerah, menyampaikan visi, misi, dan program agenda kegiatan yang akan dilakukan ketika akan menjadi Kepala Daerah agar masyarakat bisa percaya dengan apa yang disampaikan oleh paslon Kepala Daerah dan yakin dengan janji – janji paslon Kepala Daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. . .

↓

Partisipasi politik yakni keterlibatan warga masyarakat dalam segala tahapan kebijakan mulai dari proses pembuatan keputusan penilaian keputusan sampai pelaksanaan keputusan. Wujud dari partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan masyarakat untuk mendorong perubahan bangsa. Partisipasi politik aktif bisa mencerminkan kesadaran kepercayaan politik secara penuh. Warga dapat menampilkan perilaku politiknya secara tidak langsung melalui penyampaian pendapat secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur lainnya seperti media masaa, media sosial dan lainnya.

↓

Tingkatan Partisipasi Politik Seperti:

Aktivis:

- Pejabat partai sepenuh waktu,
- Pimpinan partai,
- Pimpinan kelompok kepentingan
- LSM.

Partisipan:

- Petugas kampanye / timses,
- Anggota aktif partisipan partai / kelompok kepentingan,
- LSM aktif dalam proyek – proyek sosial lainnya.

Pengamat:

- Menghadiri rapat umum,
- Anggota partai / kelompok kepentingan,
- Usaha meyakinkan orang,
- Memberikan suara dalam pemilu,
- Mendiskusikan masalah politik,
- Perhatian dengan perkembangan politik.

↓

Bentuk - Bentuk Partisipasi Politik:

- Partisipasi politik konvensional misalnya: pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik dan lainnya.
- Partisipasi politik non konvensional misalnya: pengajuan petisi, demonstrasi, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang grilya, kudeta, revolusi dan lainnya.

3.3 Kategorisasi

Kategorisasi memberitahukan bagaimana setiap variabel studi diukur, agar menjadi jelas bagaimana konten diklasifikasikan dan bagaimana studi diklasifikasikan. Pembuatan klasifikasi yang ditentukan didasarkan pada beberapa indikator yang telah ditentukan.

Kategorisasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Tabel Kategorisasi

Keterangan	Kategorisasi
Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikator Politik. 2. Pesan Politik. 3. Saluran atau Media Politik. 4. Sasaran atau Target Politik. 5. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik.
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Sibolga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan diskusi politik 2. Mengikuti kegiatan kampanye terbuka secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media sosial 3. Masuk ke dalam kelompok kepentingan 4. Melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik 5. Pemberian suara (voting) pada saat Pilkada

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Sebuah topik penelitian pada dasarnya adalah apa yang dikenal sebagai kesimpulan dari sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah keseluruhan objek yang didalamnya terdapat beberapa informan atau wasit yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objeknya adalah kasus atau orang yang dibicarakan. Dengan kata lain, objek penelitian adalah fokus penelitian. Suatu tema penelitian dibahas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori yang sesuai dengan tema penelitian. Subyek penelitian ini adalah strategi komunikasi politik Partai Golkar.

3.5 Informan

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi kepada peneliti atau orang yang berkompeten atau yang memiliki informasi mengenai strategi komunikasi politik Partai Golkar untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di kota Sibolga. calon. Pilih Sibolga. Menurut Moleong (2010: 05), penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian non-kualitatif dalam pemilihan studi dari populasi, tetapi penelitian kualitatif erat kaitannya dengan faktor kontekstual.

Sumber data untuk yang memberikan kontribusi informasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Hj. Suryanti Sidabutar, SKM (Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga)
- 2) Bapak AbduRahman (Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga)

- 3) Bapak Adri Christianto Malau (Wakil Ketua Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga)
- 4) Bapak Syamsul Sikumbang (Warga Kota Sibolga)
- 5) Ibu Eni Gusmat (Warga Kota Sibolga)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. metode observasi menurut Mardais, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode interaksi verbal, langsung atau tidak langsung, melalui dialog (tanya jawab) dengan sumber data. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang, penanya (pewawancara) dan penanya (pewawancara). Dalam hal ini peneliti

menggunakan metode wawancara langsung dengan informan. Selain itu, untuk mempercepat proses wawancara dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan wawancara/wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara terbuka (pertanyaan langsung tanpa daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya).

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi tertulis. Dalam metode dokumentasi, peneliti mengkaji bahan tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan peraturan. Dokumen dalam arti luas tidak hanya bersifat linguistik, tetapi dapat berupa peninggalan seperti prasasti dan simbol.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015: 244), analisis data adalah proses mengambil dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menggambarannya ke dalam unit-unit, dan mensintesisnya dan pola apa yang penting dan apa yang penting. penting. dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh Anda dan orang lain. Menurut Moleong (2010: 239), analisis data kualitatif melibatkan manipulasi data, pengorganisasian data, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, mengidentifikasi apa yang penting dan apa upaya untuk menangkap apa yang dipelajari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Penggunaan metode ini mengacu pada kesimpulan bahwa penelitian ini berupaya menganalisis strategi komunikasi politik partai Golkar

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Sibolga. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu interpretasi data yang diperoleh dengan pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.

3.8 Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan sumber data yang ada. Ketika peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk menguji keandalan data sebagai sumber data sekaligus benar-benar mengumpulkan data. Sugishirono (2016: 241) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik yang ada dengan sumber data yang ada. Kami memeriksa keandalan data dan data yang dikumpulkan. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai survei terhadap sumber informasi lain dalam penelitian ini. Bahkan peneliti mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan wakil ketua koordinator kantor pemenang pemilu partai Ghokhar partai Ghokhar di kota Sibolga. Setelah keempat metode di atas diimplementasikan, data yang diperlukan dikumpulkan. Peneliti diharapkan dapat mengorganisasikan dan mensistematisasikan data dan menggunakannya sebagai bahan analisis.

Dalam triangulasi teknis saat menguji reliabilitas data, data diperiksa terhadap sumber data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara divalidasi melalui observasi, dokumentasi, atau angket. Jika

ketiga metode uji reliabilitas memberikan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau pihak lain untuk menentukan data mana yang diyakini benar berdasarkan perspektif yang berbeda, atau apakah semuanya benar. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.

Hasil wawancara dengan triangulator yaitu Bapak Adri Christianto Malau (Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga) yang dilakukan pada tanggal Agustus 2022. Dalam setiap pelaksanaan Pilkada Partai Golkar memiliki Strategi Politik untuk mencapai kemenangan pada Pilkada Kota Sibolga salah satu yang diperlukan adalah memiliki komunikator politik, Pesan Politik, Saluran Atau Media Politik, Sasaran Atau Target Politik dan Pengaruh Atau Efek Komunikasi Politik. Terkait dengan komunikator politik beliau mengatakan bahwa:

"Dimulai dengan Partai Golkar menyeleksi dan mengklasifikasi terlebih dahulu secara selektif tokoh – tokoh yang dikenal di lingkungan masyarakat untuk mencari tokoh – tokoh yang aktif, peduli kepada masyarakat dan berpikir maju ke depan untuk mencapai tujuan dan memperhatikan permasalahan yang ada di masyarakat. Setiap tokoh memiliki kemampuan masing - masing, lalu partai Golkar akan memberikan tugas kepada tokoh-tokoh yang terpilih tidak terkecuali senior partai Golkar dan para pengurus yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, lalu tokoh - tokoh yang sudah diseleksi akan ditempatkan sesuai dengan tugasnya masing – masing untuk menjadi komunikator partai Golkar dalam menyampaikan pesan baik kepada masyarakat".

Terkait dengan pesan politik beliau mengatakan bahwa:

"Isi pesan politik yang sudah disiapkan sebelumnya akan disampaikan oleh tokoh - tokoh yang bertugas untuk menyampaikan mengenai tentang isu pembangunan kota Sibolga dengan cara memahami sistem birokrasi pemerintahan, isu industri perikanan karena Kota Sibolga adalah pusat perikanan dan isu industri pariwisata walaupun para tokoh masih kurang memahaminya akan tetapi harus memahaminya mengenai tentang industri perikanan dan pengembangan pariwisata .Strategi ini yang dilakukan untuk disampaikan kepada masyarakat walaupun belum tentu masyarakat memahami apa yang disampaikan dan memilih pason kepala daerah yang sudah diusung oleh partai Golkar".

Terkait dengan saluran atau media politik beliau mengatakan bahwa:

"Terlebih dahulu partai akan melihat kemampuan dari paslon yang diusung lalu dipublikasikan dengan menggunakan media sosial seperti FB Instagram media online dan juga menggunakan media cetak dan media pendukung lainnya jadi dapat memperluas cakupan daam menyampaikan informasi dan menjadi nilai jual dalam menyampaikan keunggulan dari paslon kepala daerah yang diusung oleh partai kepada masyarakat sehingga media sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat".

Terkait dengan Target atau Sasaran politik beliau mengatakan bahwa:

"Sesuai dengan demografi masyarakat Kota Sibolga yang mendominasi adalah para pemilih pemula sehingga kami harus menarik simpati kaum Milenial karena selain masyarakat umum adalah kaum mienial Kota Sibolga sehingga bisa menang mendudukkan paslon kepala daerah yang diusung untuk menjadi Walikota Sibolga

sehingga mereka berusaha agar pesan politik tersebut tersampaikan walaupun pesan politik yang tersampaikan masih 65% dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak suka membahas tentang politik akan tetapi masyarakat masih merespon dengan positif terkait apa yang kami sampaikan. dan juga masyarakat kita sudah bisa memanfaatkan media khususnya media sosial sehingga menjadi evaluasi bagi partai untuk Pilkada Kota Sibolga selanjutnya".

Terkait dengan efek komunikasi politik beliau mengatakan bahwa:

"Komunikasi politik sangat perlu untuk menyampaikan pesan politik yang disampaikan tentu akan berpengaruh karena masyarakat akan mendapat informasi tentang calon pemimpin yang akan membawa perubahan bagi kota Sibolga sehingga pandangan masyarakat terkait paslon kepala daerah akan berubah sesuai dengan figur pemimpin yang masyarakat harapkan untuk menentukan masa depan kota Sibolga 5 tahun kedepan sehingga karena masyarakat begitu selektif dalam memilih calon pemimpin yang akan membawa perubahan bagi kota Sibolga yang lebih baik lagi".

Wawancara yang dilakukan peneliti secara mendalam mengenai kegiatan – kegiatan menjelang Pilkada Kota Sibolga dan bagaimana pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga beliau mengatakan bahwa: "Kegiatan – kegiatan yang dilakukan saat menjelang Pilkada Kota Sibolga dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni diskusi politik yang dilakukan dengan baik para paslon menampung aspirasi masyarakat dan adanya kegiatan diskusi politik yang kami lakukan sangat baik dan respon masyarakat cukup baik karena kegiatan diskusi politik yang dilakukan oleh partai adalah diskusi terbuka antara Paslon Kepala Daerah dengan masyarakat dan para paslon menanggapi dan

menampung aspirasi serta pendapat masyarakat terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat dilakukan diskusi terbuka dan masyarakat memahami apa yang disampaikan oleh para paslon kepala daerah. Dalam melakukan kegiatan kampanye terdapat beberapa tahapan pelaksanaan kampanye yakni Tim sukses harus disiapkan untuk siap mengkampanyekan paslon kepala daerah dimulai dengan memperkenalkan paslon kepala daerah kepada masyarakat, menyampaikan visi misi terkait dengan janji untuk membangun kota Sibolga yang lebih baik lagi dan menampung aspirasi masyarakat untuk 5 tahun kedepan dan respon masyarakat cukup baik walaupun kebanyakan masyarakat kurang tertarik dengan kampanye lebih tertarik dengan kampanye media akan tetapi terdapat partai politik lain dan partai politik pengusung yang sama serta tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan kami".

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Kota Sibolga Jl. 13 Sutomo, Kota Beringin, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Periode penelitian ini adalah dari Juli 2022 sampai Agustus 2022.

3.9.2 Sejarah Singkat Partai Golkar

Sekretariat Golkar berdiri karena PKI dan ormas-ormasnya menikmati kehidupan politik yang baik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang sedang berkembang. Sekretariat Golkar merupakan forum kelompok fungsional/pokja murni non politik. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena

golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semua anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan Legalitas golongan fungsional jadi MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965. Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Hal ini dimungkinkan karena visi bersama dari semua anggota. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Sekretariat Golkar dikelompokkan dalam tujuh Induk Organisasi Kelompok (KINO). Yaitu :

- 1) Koperasi Gotong Royong (KOSGORO)
- 2) Pusat Organisasi Wiraswasta Indonesia (SOKSI)
- 3) Koperasi Silaturahmi Keluarga (MKGR)
- 4) Organisasi Profesi
- 5) Organisasi Pertahanan dan Keamanan (HANKAM)
- 6) Gerakan Rakyat Indonesia (GAKARI)
- 7) Gerakan Pembangunan

Dalam keputusan bersama tanggal 4 Februari 1970, Pemilihan Umum memiliki nama dan lambang, yaitu kelompok kerja (Golkar) untuk berpartisipasi. Logo dan nama ini dipertahankan sejak pemilihan umum 1971 hingga saat ini. Dalam pemilihan umum 1971, sekretaris Gokar adalah salah satu kandidat. Papol meremehkan partisipasi Golkar sebagai calon pemilih, meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kejayaan dan kejayaan masa lalu, niscaya akan tampil sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari bahwa karakter tersebut telah pindah ke Gawker karena perpecahan internal dan rasa tidak aman. Melebihi harapan. Golkar sukses besar, meraih 34.348.673 suara, atau 62,79% dari total suara yang diberikan. Perolehan suara juga cukup merata di semua negara bagian, berbeda dengan partai-partai yang berpegang pada yayasan tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, di Nusa Tenggara Timur oleh Partai Katolik, di Jawa Tengah oleh PNI, dan di Sumatera Barat di Palmushi dan Aceh.

Sebaliknya, Murba gagal meraih kursi di DPR karena gagal meraih suara signifikan. Kemudian, pada tanggal 17 Juli 1971, sekretaris GOKAR diubah menjadi Golkar/Golongan Karya sesuai dengan ketentuan Ketetapan MPRS tentang Perlunya Reorientasi Kehidupan Politik di Indonesia. Pada tanggal 19 September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayor Jenderal Amir Murtno terpilih sebagai ketua. Integrasi Golkar erat kaitannya dengan terbentuknya forum-forum profesional seperti Himpunan Petani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Seluruh Buruh (FBSI). Pasca peristiwa G30S, dengan dukungan penuh Suharto sebagai panglima militer, Panglima Golkar

melancarkan aksi untuk menetralsir PKI dan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD adalah tulang punggung junta Orde Baru. Semua kebijakan Orde Baru ditulis dan dijalankan oleh pimpinan militer dan Gorkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, hampir semua jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh kader Golkar. Sebuah keluarga besar pokja sebagai jaringan konstituen telah didukung sejak lahirnya Orde Baru oleh sebuah sistem informasi, yaitu Jalur A Jalur Lingkungan Militer.

3.9.3 Visi, Misi dan Tujuan Partai GOKAR

a. Visi Partai GOLKAR: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

b. Misi Partai GOLKAR

Misi partai GOLKAR yakni:

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

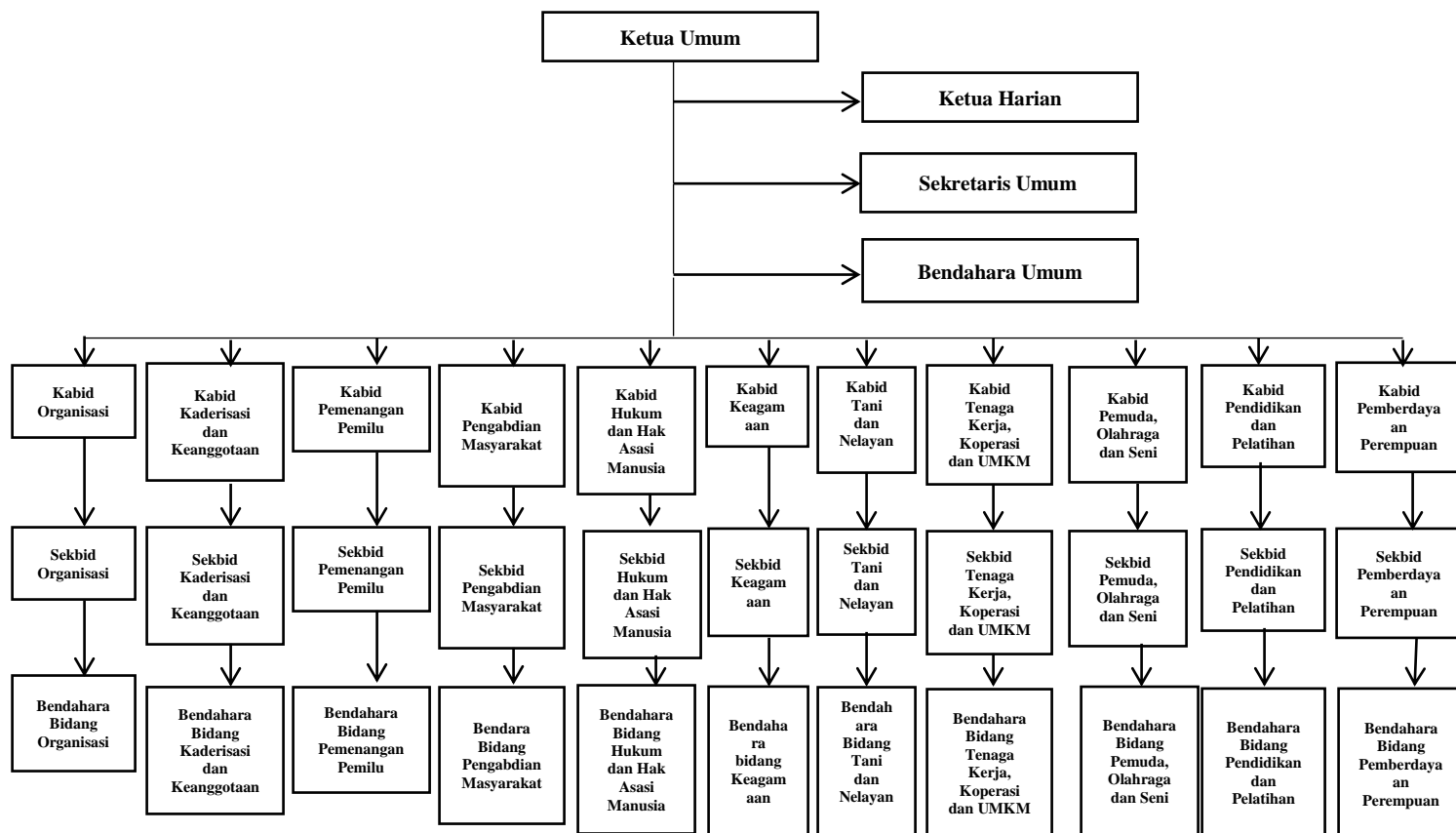
c. Tujuan Partai GOLKAR

Tujuan partai GOLKAR yakni:

1. Mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia .
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

3.9.4 Struktur Organisasi DPD II Partai GOLKAR Kota Sibolga

Struktur organisasi DPD II Partai GOLKAR Kota Sibolga meliputi seluruh sumber daya dan bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran organisasi serta menjamin tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. Struktur organisasi DPD II Partai GOLKAR di Kota Sibolga terbagi menjadi beberapa divisi. Hal ini dapat dilihat pada bagan organisasi partai DPD II GOLKAR di kota Sibolga pada gambar berikut:



Gambar 3.8

Struktur Organisasi DPD II Partai GOLKAR Kota Sibolga

3.9.5 Tugas dan Wewenang dan Tanggung Jawab Masing - Masing Jabatan

DPD II Partai Golkar Kota Sibolga

Terdapat pula Tugas dan Wewenang dan Tanggung Jawab Tiap- masing- masing Jabatan DPD Tingkatan II Partai Gokar Kota Sibolga ialah sebagai berikut:

1. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai GOLKAR dipimpin oleh seorang pemimpin dan bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar merupakan badan eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota dan bersifat kolektif.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Sibolga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Dasar, dan Peraturan Pemerintah. Musyawarah dan keputusan parlemen sebagai aturan organisasi Partai Golkar dan keputusan Komite Sentral Partai Golkar.
- 5) Persetujuan susunan dan staf Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Sibolga.
- 6) Menyetujui komposisi dan personel Dewan Eksekutif Distrik.
- 7) Menetapkan susunan dan kepegawaian DPD Partai Golkar Kota Sibolga.
- 8) Arbitrase perselisihan tentang administrasi kepala daerah.
- 9) Partai GOLKAR Kota Sibolga melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan Partai GOLKAR Kota Sibolga.
- 10) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga mendapatkan anjuran dan masukan dari Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga.

11) Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga dan Sekretaris– Sekretaris Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga

2. Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga ialah:

- 1) Mengetuai dan mengelola urusan kerumah- tanggaan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis teknologi informasi(IT) secara menyeluruh wilayah Kota Sibolga
- 4) Melaksanakan tugas- tugas istimewa sesuai dengan kebijakan yang ditentukan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga
- 5) Mengetuai Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
- 6) Mewakili Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga apabila berhalangan bersumber pada kebijakan pendelegasian;
- 7) Mengetuai Rapat Pleno, Rapat Tiap hari, serta rapat- rapat lain atas penugasan dari Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga
- 8) Mengkordinasikan penyiapan konsep- konsep buat melancarkan pelaksanaan program partai diluar program tiap- masing- masing bidang.

- 9) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga atas pelaksanaan tugas- tugasnya.
- 10) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga dan dibantu oleh Wakil- Wakil Sekretaris Bidang.

3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPD Partai GOLKAR Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin pemantapan organisasi kota Sibolga.
- 2) Menetapkan pedoman dan fokus program pembangunan opini dan citra partai GOLKAR di Sibolga.
- 3) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan keuangan Partai GOLKAR di Kota Sibolga berdasarkan kebijakan DPP Partai GOLKAR. Kebijakan Sekretariat Partai GOLKAR Kota Sibolga
- 4) Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan program di bidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat.
- 5) pengaturan, pengendalian dan pengawasan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan organisasi;
- 6) Pengambilan kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- 7) Mewakili internal dan eksternal Partai Golkar Sibolga.

- 8) Menetapkan kebijakan partai GOKAR di tingkat kabupaten/kota untuk melindungi, memajukan, dan meningkatkan hubungan dengan pemerintah daerah.
- 9) Menetapkan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOKAR Kota Sibolga untuk melindungi, membina dan meningkatkan hubungan dengan ormas, ormas, ormas, ormas dan golongan lainnya.
- 10) Pembentukan pimpinan DPD Partai Golkar di kota Sibolga.
- 11) Mendirikan Markas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di Kota Sibolga.
- 12) Ketua Musyawarah Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota Sibolga.
- 13) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program partai GOKAR di kota Sibolga.
- 14) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Wakil Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
- 15) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program pada Forum Musyawarah Daerah Partai GOLKAR di Sibolga.

4. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wakil- Wakil Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga

- 1) Membantu Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Menjajaki perkembangan di bidangnya tiap- masing- masing secara senantiasa dan menganalisa serta membuat anjuran;

- 3) Melaksanakan kebijakan dan kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di Kota Sibolga pada bidangnya tiap- masing- masing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang tiap- masing- masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga
- 5) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program di bidangnya tiap- masing- masing kepada Dewan Pimpinan Daerah Kota Sibolga
- 6) Melakukan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan organisasi- organisasi sosial/ kemasyarakatan, profesi/ fungsional, dan lembaga lain yang terpaut dengan pelaksanaan tugasnya;
- 7) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan dan lembaga dalam melakukan program Partai GOLKAR di Kota Sibolga bersumber pada tugas dan guna di bidang terpaut;
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya bidang dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang- bidang lain di luar bidang tiap- masing- masing, dan melaporkannya kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga
- 9) Memberikan pertimbangan dan saran- anjuran kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga tentang langkah- langkah yang perlu diambil di bidangnya tiap- masing- masing;
- 10) Mempertanggung- jawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga.

5. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Sekretaris Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan ialah:

- 1) Membantu Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga ddalamaam melakukan konsolidasi organisasi di tingkatan Kabupaten/ Kota;
- 2) Melaksanakan alternatif penyelesaian permasalahan di bidang organisasi dan daerah pada tingkatan Kabupaten/ Kota bersumber pada ketentuan yang ditetapkan DPP Partai GOLKAR;
- 3) Mempersiapkan administrasi pengesahan Personalia Pimpinan Daerah Organisasi Sayap, Dewan Pimpinan Daerah Kota Sibolga, Badan, lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi dan Daerah di Kota Sibolga;
- 5) Membantu Pimpinan dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon- calon Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD DPRD di Kota Sibolga
- 6) Membantu Pimpinan dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon- calon Walikota/ Wakil Walikota;
- 7) Membantu Pimpinan menuntaskan kasus kaderisasi dan keanggotaan Partai GOLKAR di Kota Sibolga;
- 8) Melakukan inventarisasi dan profiling kader dan anggota Partai GOLKAR yang hendak dipromosikan buat menduduki jabatan- jabatan publik di kota Sibolga;

- 9) Melaksanakan penataan sistem administrasi keanggotaan Partai GOLKAR berbasis IT di Kota Sibolga;
 - 10) Mengelola Administrasi Anggota dan Kader Partai GOLKAR dengan sistem teknologi informasi(IT);
 - 11) Melaksanakan Program Kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan militansi kader Partai GOLKAR di Kota Sibolga;
 - 12) Bekerjasama dengan Badan Studi dan Pengembangan dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Partai GOLKAR Kota Sibolga dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di Kota Sibolga;
 - 13) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan di kota Sibolga.
- 6. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur dan Sekretaris Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:**
- 1) Membantu Ketua DPD Partai GOLKAR Kota Sibolga dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kota Sibolga
 - 2) Menyusun rencana kerja bagi masyarakat untuk mengefektifkan kinerja dinas kinerja politik.
 - 3) Implementasi kebijakan DPP Partai Gokar Kota Sibolga di bidang pengabdian masyarakat Implementasi kebijakan DPP Partai GOLKAR di bidang pengabdian masyarakat Kota Sibolga.

7. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah mendengarkan kebijakan Pimpinan Pusat Partai GOKAR dan memenangkan Pilkada serentak pada Pilkada tahun 2020 dan 2024 serta di Siboga tahun 2024.
- 2) Peta politik statis dan dinamis berdasarkan riset, big data, dan daerah, perkiraan provinsi kemenangan Pilkada Partai Golkar 2020 dan 2024 dan Pilkada serentak 2024 di Kota Sibolga, menyusun rencana strategis dan operasional
- 3) Melakukan penggalangan dana, pengarahan dan pengelolaan seluruh sumber daya partai GOLKAR yang terdaftar di organisasi Ormas

8. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, ialah:

- 1) Membantu Pimpinan dalam menuntaskan kasus hukum dan hak asasi manusia di Kota Sibolga
- 2) Melaksanakan program kerja Bidang Hukum dan HAM sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 3) Melaksanakan pokok-pokok benak Partai GOLKAR Bidang Hukum dan HAM di Kota Sibolga
- 4) Menggalang advokat, pegiat/ aktivis hukum dan HAM dan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR di Kota Sibolga

- 5) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum dan HAM di Kota Sibolga
- 6) Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Kota Sibolga di Bidang Hukum dan HAM di Kota Sibolga
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Sibolga.

9. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan, ialah:

- 1) Membantu Pimpinan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kota Sibolga menampung, mengkaji dan menuntaskan kasus Pendidikan dan Pelatihan di Kota Sibolga
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 3) Menggalang pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok cendekiawan, tenaga medis dan berbagai profesi seni dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pendidik, tenaga kependidikan serta berbagai organisasi profesi seni;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

10. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Sekretaris Bidang**Kesehatan dan Zona Hidup, ialah:**

- 1) Membantu Pimpinan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kota Sibolga buat menampung, mengkaji dan menuntaskan kasus Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kota Sibolga
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kesehatan dan Zona Hidup sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 3) Menekan dan memperjuangkan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial yang bermutu dan inklusif di Kota Sibolga
- 4) Menggalang berbagai profesi di bidang kesehatan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi kesehatan di Kota Sibolga
- 6) Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Partai GOLKAR Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Bidang Kesehatan dan Zona Hidup.

11. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Sekretaris Bidang**Pemuda Olahraga dan Seni, ialah:**

- 1) Membantu Pimpinan dalam menuntaskan kasus di Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Partai GOLKAR di Kota Sibolga

- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 3) Menggalang pelajar/ siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dan pecinta Seni dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan kerjasama dengan organisasi pemuda dan organisasi olahraga da pecinta seni di Kota Sibolga
- 5) Bekerjasama dengan lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR Kota Sibolga dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di tingkatan Kota Sibolga
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemuda, Olahraga dan Seni.

12. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, ialah:

- 1) Membantu Pimpinan menuntaskan kasus di Bidang Perempuan Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 2) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pemberdayaan sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan perempuan di Kota Sibolga
- 4) Menekan Peraturan Daerah Kota Sibolga serta kebijakan yang memesatkan tercapainya kesetaraan gender;

- 5) Menekan Peraturan Daerah Kota Sibolga serta kebijakan yang ramah anak;
- 6) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 7) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 8) Melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan di Kota Sibolga
- 9) Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat Partai GOLKAR Kota Sibolga dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 10) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan.

13. Tugas Wakil- Wakil Sekretaris Masing– Masing Bidang Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga ialah:

- 1) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dan/ maupun sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- 3) Melaksanakan tugas- tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- 4) Melaksanakan tugas- tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris.
- 5) Pembidangan tugas diantara Wakil- Wakil Sekretaris Bidang sesuai bersumber pada komposisi dan personalia pengurus.

14. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Bendahara ialah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;

- 2) Menggali, mengelola dan tingkatkan sumber- sumber dan adanya sarana- fasilitas yang lain buat menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR di Kota Sibolga
Menggalang iuran anggota;
- 3) Mengadakan usaha- usaha yang lain yang sah buat mengumpulkan dana buat kepentingan Partai GOLKAR di Kota Sibolga;
- 4) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR di Kota Sibolga
- 5) Mengawasi pemasukan dan konsumsi dana sesuai dengan petunjuk Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga;
- 6) Melaksanakan tugas- tugas istimewa sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga;
- 7) Mewakili Pimpinan apabila berhalangan bersumber pada kebijakan pendelegasian;
- 8) Mengetuai Rapat Pleno, Rapat Tiap hari, serta rapat- rapat lain atas penugasan dari Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga;
- 9) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga atas pelaksanaan tugas- tugasnya.
- 10) Bendahara bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga dan dibantu oleh Wakil- Wakil Bendahara.
- 11) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, dorongan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpananya di Bank dilaporkan oleh Bendahara kepada Pimpinan.

- 12) Usaha lain yang sah buat memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat(
- 1) pasal ini dicoba Bendahara dengan persetujuan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga.
- 13) Cheque dan biyet Giro buat pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara dan Pimpinan maupun Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Sibolga.

15. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wakil- Wakil Bendahara ialah:

- 1) Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mewakili Bendahara apabila berhalangan;
- 3) Melaksanakan tugas- tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
- 4) Melaksanakan tugas- tugas lain yang ditentukan Bendahara;
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil- Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode – metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu, demikian juga hanya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Sibolga. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yakni pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan yang terdiri dari Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga, Wakil Ketua Bidang Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah II DPD Partai Golkar Kota Sibolga, dan beberapa Warga Kota Sibolga. Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan, serta untuk memperoleh data– data yang mendukung dalam penelitian ini. Data– data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian tesis ini. Pengambilan data berlangsung selama kurang lebih 2 minggu.

4.1.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga











Pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan kali pertama bagi penyelenggara Pilkada diselenggarakan dalam keadaan khusus selain bencana. Pilkada serentak, yang idealnya dijadwalkan pada 9 September 2019, diundur menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak diskusi dan refleksi. Situasi ini tidak kurang dari merebaknya wabah pandemi Covid-19 di hampir setiap negara di dunia. Dari April hingga pertengahan 2020, jumlah orang yang terinfeksi virus ini terus meningkat. Pada 14 April 2020, Pemerintah bersama DPR dan KPU menyepakati opsi penundaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 dengan mengubah Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei 2020, dalam Perp Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilu, telah diputuskan Peralihan Pemerintahan. , bupati, walikota. Hal yang sama juga dirasakan Kota Sibolga saat pemilihan umum di masa pandemi Covid-19.

Namun, KPUD tetap menggelar pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada Kota Sibolga 2020. NASDEM, PERINDO, GERINDRA, DEMOKRAT, PKS, GOLKAR, PDIP, PBB, Walikota, Wakil Walikota Jamal dan Pertas, Pasangan Calon Burdin dan Edi, Pasong Suram dan Edward. Semua pemilih yang masuk terdiri dari seluruh RT, RW Kota Sibolga, dan dihitung suara sah dan tidak sah. Pada Pilkada Kota Sibolga tahun 2020, terdapat 51.327 suara sah dan 499 suara tidak sah, sehingga total 51.826 suara. Pada tahun 2020, terdapat suara campuran jenis kelamin dari setiap TPS RT-RW

di Kota Sibolga, dengan total 31.573 suara laki-laki dan 32.756 suara perempuan, dengan total 64.329 suara.

Tabel 4.1

Daftar Kandidat Resmi

No. Urut	Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung	Hasil Persentase	Suara Rakyat
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati			
1	Jamaluddin Pohan (Kader Golkar)	Pantas Maruba Lumbantobing (Kader Demokrat)	<ul style="list-style-type: none"> •  NasDem •  Golkar •  Gerindra •  Demokrat •  Perindo •  PKS 	35,6	27502
	WakiKetuaDPRD Tapanui Tengah (2009–2014)	AnggotaDPRD Siboga (2014-2019)			
2	Bahdin Nur Tanjung (Non-Partisan)	Edi polo Sitanggang (Kader PDI-P)	<ul style="list-style-type: none"> •  PDI-P •  PBB 	27,0	13848
	Rektor Universitas Muhammadiyah SumateraUtara (2003–2010)	Wakil Walikota Sibolga (2016-2021)			
3	Drs. H. Ahmad Sulham Sitompul, M. AP (Non-Partisan)	Edward Siahaan (Kader PSI)	<ul style="list-style-type: none"> •  PSI •  PKB 	19,5	9985

Sumber Data: Data Pilkada Kota Sibolga 2020

Tabel 4.2
Hasil Persentasi Partisipasi Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga
Tahun 2020

KECAMATAN	DPT + DPTb	Pengguna Hak Pilih	% Target	% Capaian	Keterangan
Sibolga Utara	15.605	12.421	77.50	79,60	Tercapai
Sibolga Kota	11.567	9.194	77.50	79,48	Tercapai
Sibolga Sambas	22.852	18.243	77.50	79,83	Tercapai
Sibolga Selatan	15.105	11.968	77.50	79,23	Tercapai
Se-Kota Sibolga	65.129	51.826	77.50	79.57	Tercapai

Sumber: KPUD Kota Sibolga 2020

a. Persiapan – persiapan yang harus dilakukan menjeang Pilkada Kota Sibolga

- a) KPUD akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan di seluruh Kota Sibolga untuk melaksanakan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Ini merupakan program pendidikan pemilih pada fase pra-pemilu di Kota Sibolga. Kegiatan ini merupakan Program Relawan Demokrasi, Pemilu dan Peduli Demokrasi (KPPD) yang dibentuk oleh KPU di Indonesia. Edukasi ini dimaknai sebagai proses pemberian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan pemilihan umum, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

- b) Kota Sibolga bersama KPUD Kota Sibolga menggelar rapat tatap muka Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sibolga 2020. Simulasi penghitungan tugas masing-masing petugas jaga (caraka) di tempat pemungutan suara (TPS) dan hasil pemungutan suara pasangan calon dalam aplikasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga. Jumlah TPS di Kota Sibolga adalah 184 TPS dengan total 64.329 DPT dan pemilih yang terdiri dari 31.573 pemilih laki-laki dan 32.756 pemilih perempuan. Alat pelindung diri (APD) kesehatan yang terdiri dari masker, hand sanitizer, sarung tangan dan face shield.
- c) Verifikasi dengan Tinjauan Kesiapan di tingkat TPS KPUD di Pemco dan Kota Sibolga disebut sempurna karena disebar ke seluruh TPS di Kota Sibolga. Semua undangan pemilu (C6) telah dibagikan. Informasi juga tersedia untuk beberapa TPS yang telah mengembalikan C6, karena beberapa TPS telah mati dan beberapa telah pindah. C6 yang dikembalikan tidak dapat disalahgunakan karena KPPS mengembalikannya ke PPS dan PPS mengembalikannya ke PPK. Semua pemilih yang datang ke TPS harus mematuhi protokol kesehatan.

b. Ada hambatan dalam implementasi dan implementasi yang kurang optimal yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 karena beberapa alasan diantaranya takut menghadapi virus Covid-19.

- b) Jumlah pemilih harus turun secara signifikan. Hal ini karena kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran Covid-19, makanya mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- c) Kedua, anggaran pemilihan kepala negara telah disesuaikan untuk menghadapi pandemi Covid-19, dengan lebih banyak kampanye tatap muka daripada online.
- d) Saya khawatir mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena penyebaran virus corona baru yang sedang berlangsung. Dan banyak pejabat KPPS pada akhirnya akan lebih fokus pada pemantauan protokol kesehatan, membuat antrean panjang di luar, dan kurang memperhatikan prosedur pemilihan. Ini masalah tempat pemungutan suara.
- e) Infrastruktur jaringan internet daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada.
- f) Selain faktor cuaca dan letak geografis Indonesia, penyelenggara Pilkada juga harus beradaptasi sehingga mengakibatkan perubahan pola sosialisasi akibat metode offline-to-online yang dinilai kurang efektif.
- g) Akibat pandemi Covid-19, beberapa kegiatan di Sisdiki dan Palma tidak dilakukan. Banyaknya kasus positif Covid-19 juga menjadi kendala terselenggaranya pilkada. Banyaknya kasus membatasi ruang gerak. untuk kampanye pilkada, serta berita bohong dan hoaks juga masih menjadi kendala pelaksanaan Pilkada 2020.

- h) Kendala lainnya adalah tantangan penyediaan dukungan sumber daya seperti alat pelindung diri (APD), penyediaan rapid test, dukungan tenaga medis, sarana dan prasarana pendukung, sehingga mengakibatkan tersedianya home support.
- i) Adanya ketidakpastian pelaksanaan program Pilkada 2020 karena mungkin masih tertunda karena alasan hukum. Terakhir, keahlian teknis harus digunakan sedapat mungkin untuk menghindari penyebaran Covid-19 di berbagai tahapan pemilu.

c. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berdasarkan enam dimensi berdasarkan hasil laporan pemantauan di TPS.

- a) Aspek pertama dari sisi pandemi membuat protokol kesehatan (Prokes) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berkat sosialisasi penyelenggara Pilkada dan pemerintah terkait pelaksanaan Proquess, ia mampu mempengaruhi kesadaran pemilih dengan cukup positif. Pemilih yang hadir akan berusaha untuk mematuhi aturan, datang pada waktu yang ditentukan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari keramaian setelah menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang hadir di TPS dan pada umumnya menggunakan hak pilihnya diatur dan dikendalikan oleh penyelenggara pemilu dari mulai TPS sampai pemungutan suara ulang. Namun dengan adanya penyelenggara pemungutan suara (picadas) yang sudah dinyatakan reaktif, jumlah penyelenggara TPS akan berkurang namun tidak akan mengganggu proses penyidikan secara signifikan. Hal ini tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap proses pemungutan suara, dan kondisi tersebut mempengaruhi perilaku dan penghitungan suara, serta partisipasi masyarakat.

- b) Dari sisi pelaksanaan, persoalan pelaksanaan di masa pandemi, seperti tidak dicantumkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak berbeda dengan persoalan yang biasa terjadi di pilkada. Perbedaan cara pejabat publik memperlakukan kejadian yang sama.
- c) Keakraban dan independensi penyelenggara pemilukada secara langsung mempengaruhi kualitas pemungutan suara dan penghitungan suara. Pemungutan suara yang tidak memadai atau campuran, penentuan persyaratan pemilihan yang sah dan tidak sah, penentuan penggunaan hak suara oleh administrasi surat suara, penggunaan hak suara orang lain, pemungutan suara ganda, dan penyalahgunaan hak suara oleh petugas pemungutan suara, dll. Saya bermasalah dengan ini masih terjadi.
- d) Penggunaan Sistem Informasi. KPU menggunakan Sirekap (Sistem Informasi Rangkuman) dan Bawaslu menggunakan Siwasu. Saat mendokumentasikan hasil pemungutan suara, Sirekap dan Siwasu menggunakan metode yang hampir sama. Itu berarti memotret C.Hasi-KWK dan mengirimkannya melalui aplikasi Android. Selain pendokumentasian hasil, proses persiapan pelaksanaan pemungutan suara dari masa tenang, persiapan logistik pemungutan suara, kebijakan moneter, dan proses pemungutan suara pada hari pemungutan suara juga akan didokumentasikan. Dari kemarin, Anda dapat melihat hasil pemantauan selama persiapan, selama agregasi, dan setelah agregasi di sistem Siwasu.

- e) Aspek selanjutnya adalah tantangan ringkasan voting. Ia mengatakan rekapitulasi pemungutan suara berdasarkan data seluler KPU menggunakan Sirekap pada 10 Desember 2020 kurang optimal dalam pendataan dari masing-masing TPS. Jika diputuskan proses rekonsiliasi akan dilakukan melalui sistem informasi, maka proses pemasukan data ke dalam Sirekap harus dipercepat. Hal ini dikarenakan keterbatasan jaringan menjadi tantangan utama bagi penggunaan sistem informasi.
- f) Dalam hal peringkasan dilakukan secara manual, KPU segera mengeluarkan kebijakan agar semua PPK (Komisi Pemilihan Umum Daerah) menggunakan model peringkasan. Jika model peringkasan ini tidak segera ditentukan, peringkasan tingkat PPK dapat ditunda sampai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan KPU (PKPU).
- g) Akhirnya, komentar dan penilaian dari aspek tantangan kondisi alam dipertimbangkan. Pilkada Desember saat musim hujan dapat mengganggu tahapan pemilu, terutama terkait pengamanan peralatan pemungutan suara, distribusi logistik, dan proses pemilu. Potensi hujan, angin kencang, dan ombak akhirnya muncul di beberapa wilayah penyelenggara Pilkada 2020. Hal ini menyebabkan keterlambatan logistik karena TPS akhirnya terlambat buka karena pemantauan Bawasul. Itu juga tentunya memiliki TPS, namun akhirnya dipindahkan karena lokasi sebelumnya terendam banjir, sehingga tidak memungkinkan untuk mencoblos dan menghitung di lokasi ini. Penyelenggara pemilu ke depan harus memperhatikan kondisi alam yang dapat mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara. Khususnya dalam pengadaan dan pengiriman logistik, serta

penempatan lokasi TPS, Anda perlu mengantisipasi perubahan cuaca yang tidak menentu.

Tabel 4.3

Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan Dan Usia

No.	Jabatan	Usia
1.	Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga	55 Thn
2.	Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga	48 Thn
3.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga	37 Thn
4.	Warga Kota Sibolga	45 Thn
5.	Warga Kota Sibolga	35 Thn

Sumber: Data DPD Partai Golkar Kota Sibolga Tahun 2020

Informan survei ini adalah Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga, Wakil Ketua Divisi Pemenangan Pemilu Kota Sibolga Partai Golkar Kota Sibolga dan beberapa warga kota Sibolga.

4.1.2 Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Siboga

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang informan yang dimintai keterangan atau keterangan yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Posisi responden mewakili sumber informasi, dan pewawancara adalah

penambang informasi. Gunakan gaya wawancara satu lawan satu. Tindakan yang disiapkan dan terstruktur. Berikut adalah penyajian data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Survei ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian Anda. Penulis mengurutkan berdasarkan klasifikasi penelitian ini, yaitu:

a. Komunikator Politik

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang komunikasi politik beliau menjawab partai Golkar akan menyeleksi terlebih dahulu berdasarkan sudut pandang dari tokoh yang dikenal di lingkungan masyarakat untuk menjadi komunikator partai Golkar.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang komunikasi politik beliau menjawab partai Golkar akan menyeleksi sesuai dengan kemampuan masing-masing tokoh lalu akan diberikan tugas kepada tokoh-tokoh yang terpilih khususnya senior partai Golkar dan para pengurus yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Christianto Malau selaku Wakil Ketua Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang komunikasi politik beliau menjawab partai Golkar akan menyeleksi tokoh yang aktif peduli kepada masyarakat yang berpikir maju ke depan untuk mencapai tujuan dan

mengetahui serta memperhatikan permasalahan yang berkembang di masyarakat sehingga harus selektif dalam menyeleksi tokoh yang memiliki kemampuan tersebut.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai komunikator politik beliau menjawab partai Golkar Kota Sibolga akan melakukan klarifikasi terhadap tokoh yang memiliki kemampuan dan kepewaliannya khususnya dalam politik lalu akan ditempatkan sehingga tokoh-tokoh dapat menyampaikan pesan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang komunikator politik beliau menjawab partai Golkar akan menyeleksi dan memilih tokoh yang dikenal masyarakat yang mampu dalam menyampaikan pesan baik kepada masyarakat.

b. Pesan Politik

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pesan politik beliau menjawab pesan yang akan disampaikan oleh partai Golkar mengenai isi suara dan kultur budaya yang ada di kota Sibolga sehingga hal tersebut akan disampaikan kepada para tokoh yang bertugas untuk menyampaikannya kepada masyarakat walaupun masyarakat belum tentu memahami apa yang disampaikan tersebut.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pesan politik beliau menjawab isi pesan yang akan disampaikan dan sudah disiapkan mengenai isu pembangunan kota Sibolga dengan cara memahami sistem birokrasi pemerintahan yang akan menjadi strategi untuk disampaikan kepada masyarakat walaupun belum tentu masyarakat akan memilih paslon kepala daerah yang sudah diusung oleh partai Golkar.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Christianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pesan politik beliau menjawab isi pesan yang akan disampaikan oleh partai Golkar yakni tentang isu industri perikanan karena kota Sibolga adalah pusat perikanan dan menyangkut industri pariwisata walaupun masih kurang memahaminya akan tetapi harus memahaminya mengenai tentang industri perikanan dan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang pesan politik beliau menjawab isi pesan yang akan disampaikan oleh partai Golkar mengenai isu politik yang mengarah kepada penderitaan masyarakat seperti pangan dengan cara memahami kondisi dan kultur masyarakat walaupun masih minimnya masyarakat yang ikut serta dalam politik.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang pesan politik beliau menjawab isi pesan yang akan yang sudah disiapkan dan akan disampaikan oleh partai Golkar mengenai isu pemerintahan walaupun minimnya pengetahuan masyarakat tentang isu pemerintahan.

c. Saluran Atau Media Politik

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang saluran atau media politik beliau menjawab media yang digunakan oleh partai Golkar adalah media sosial seperti FB, Instagram, dan media online lainnya serta menggunakan media cetak dan media pendukung lainnya sehingga proses penyampaian pesan akan tersampaikan kepada masyarakat sehingga media tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang saluran atau media politik beliau menjawab media yang digunakan oleh partai seperti media sosial seperti FB, Instagram, media online lainnya dan juga menggunakan media cetak sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan dan menjadi nilai jual dalam menyampaikan keunggulan dari paslon kepala daerah yang diusung oleh partai kepada masyarakat.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Christianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang saluran atau media politik beliau menjawab saluran media yang digunakan ataupun dimanfaatkan oleh partai Golkar seperti media sosial FB, Instagram, dan media online lainnya dan juga menggunakan media cetak dapat memperluas cakupan dalam menyampaikan informasi yang sehingga media sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang saluran atau media politik beliau menjawab terlebih dahulu partai akan melihat kemampuan dari paslon yang diusung lalu dipublikasikan dengan menggunakan media sosial seperti FB, Instagram, media online dan juga menggunakan media cetak sehingga media sangat penting sebagai wadah dalam menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang saluran atau media politik beliau menjawab media yang digunakan oleh partai seperti media sosial sehingga informasi dapat disalurkan dengan baik kepada masyarakat.

d. Sasaran Atau Target Politik

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang sasaran atau target politik beliau menjawab karena sasaran politik yang kami tuju adalah masyarakat Kota Sibolga sehingga pesan politik dapat tersampaikan dengan baik dan juga masyarakat kita sudah bisa memanfaatkan media khususnya media sosial walaupun tidak ada respon dari masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan sehingga menjadi tugas bagi kami untuk Pilkada Kota Sibolga kedepannya.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang sasaran atau target politik beliau menjawab sesuai dengan demografi masyarakat Kota Sibolga yang mendominasi adalah pemilih pemula sehingga kami harus menarik simpati kaum milenial Kota Sibolga terkait dengan Pilkada Kota Sibolga dan juga pesan politik yang tersampaikan masih 65% dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak suka membahas tentang politik akan tetapi masyarakat masih merespon dengan positif terkait apa yang kami sampaikan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Christianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang sasaran atau target politik beliau menjawab target politik yang dituju ialah masyarakat kota sehingga pesan politik dapat tersampaikan dengan baik karena banyak masyarakat yang

sudah pintar menggunakan media sosial karena walaupun ada masyarakat yang merespon dengan baik dan ada segelintir orang tidak respon dengan apa yang kita sampaikan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang sasaran atau target politik beliau menjawab target politik yang dituju oleh partai adalah masyarakat sehingga mereka bisa menang mendudukkan paslon kepala daerah yang mereka usung untuk menjadi walikota Sibolga sehingga mereka berusaha agar pesan politik tersebut tersampaikan dan masyarakat memberikan respon yang baik dengan apa yang mereka sampaikan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai sasaran atau target politik beliau menjawab target politik mereka selain masyarakat umum mereka memiliki target kepada kaum milenial sehingga apa yang mereka sampaikan pesan politik tersebut dapat tersampaikan dengan baik walaupun terdapat masyarakat yang tidak merespon apa yang mereka sampaikan.

e. Pengaruh Atau Efek Komunikasi Politik

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pengaruh atau efek komunikasi politik beliau menjawab sangat berpengaruh di mana kita akan dapat melihat informasi terhadap calon kepala

daerah yang diharapkan akan membawa perubahan bagi kota Sibolga sehingga pandangan masyarakat tentang pasangan calon kepala daerah akan memberikan respon yang baik sesuai dengan figur pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pengaruh atau efek komunikasi politik beliau menjawab pasti berpengaruh di mana kita akan melihat informasi tentang calon pemimpin kota Sibolga yang akan membawa perubahan bagi kota Sibolga sehingga masyarakat memberi respon yang baik dan juga mereka dapat melihat sosok figur calon kepala daerah yang akan membawa perubahan dan memimpin kota Sibolga untuk 5 tahun kedepan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan bapak Adri Christianto Malau selaku wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pengaruh atau efek komunikasi politik beliau menjawab pesan politik yang disampaikan tentu berpengaruh karena akan mendapat informasi tentang calon pemimpin yang akan membawa perubahan bagi kota Sibolga sehingga pandangan masyarakat terkait paslon kepala daerah akan berubah sesuai dengan figur pemimpin yang masyarakat harapkan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang Warga Masyarakat Kota mengenai tentang pengaruh atau efek komunikasi politik beliau menjawab pesan politik yang disampaikan sangat berpengaruh kepada masyarakat untuk menentukan masa depan

Kota Sibolga 5 tahun kedepan karena masyarakat begitu selektif dalam memilih calon pemimpin yang akan membawa perubahan bagi kota Sibolga yang lebih baik lagi.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang pengaruh atau komunikasi politik beliau menjawab pesan politik yang mereka sampaikan sangat berpengaruh karena akan merubah pandangan kami terkait dengan calon pemimpin kota Sibolga sesuai dengan yang kami harapkan.

f. Kegiatan Diskusi Politik

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang kegiatan diskusi politik beliau menjawab respon masyarakat terkait dengan kegiatan diskusi politik cukup baik karena kegiatan diskusi politik yang dilakukan oleh partai adalah diskusi terbuka antara Paslon Kepala Daerah dengan masyarakat dan syukurnya masyarakat memahami apa yang disampaikan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang kegiatan diskusi politik beliau menjawab respon masyarakat terkait dengan adanya kegiatan diskusi politik yang kami lakukan sangat baik para paslon menampung aspirasi masyarakat saat melakukan diskusi terbuka walaupun banyak masyarakat yang masih alergi dengan politik.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Crishtianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenang Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang kegiatan diskusi politik beliau menjawab respon masyarakat cukup baik dan para paslon menanggapi dan menampung aspirasi serta pendapat masyarakat terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat dilakukan diskusi terbuka dan syukurnya mereka memahami apa yang disampaikan oleh para paslon kepala daerah.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang kegiatan diskusi politik beliau menjawab respon kami sangat baik karena mereka menampung aspirasi dan pendapat kami terkait dengan permasalahan yang kami rasakan saat dilakukan diskusi politik terbuka walaupun terdapat masyarakat yang paham dan ada yang tidak paham terkait dengan apa yang mereka sampaikan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang kegiatan diskusi politik beliau menjawab respon kami cukup baik karena mereka menampung aspirasi dan pendapat kami terkait dengan masalah yang kami rasakan saat dilakukan diskusi politik terbuka walaupun masih ada di antara dari kami yang masih belum paham tentang apa yang mereka sampaikan tetapi ada juga masyarakat yang paham apa yang mereka sampaikan.

g. Mengikuti Kegiatan Kampanye Terbuka Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Media Cetak Dan Media Sosial

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang mengikuti kegiatan kampanye terbuka secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media sosial beliau menjawab tahapan pelaksanaan kapan yang terbuka yang dilakukan yakni pengenalan paslon kepala daerah serta menyampaikan visi misi kepada masyarakat dan respon masyarakat cukup baik walaupun terdapat partai-partai pengusung yang sma ada yang tidak sejalan dengan kami.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang mengikuti kegiatan kelompok yang terbuka secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media sosial beliau menjawab tahapan pelaksanaan kampanye yakni Tim sukses harus disiapkan untuk siap mengkampanyekan paslon kepala daerah dan respon dari masyarakat cukup baik walaupun terdapat partai-partai lawan serta sesama partai pengusung dan juga para tokoh yang tidak sejalan dengan kami.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Crishtianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang mengikuti kegiatan kampanye terbuka secara langsung maupun tidak langsung melalui

media cetak dan media sosial beliau menjawab tahapan yang dilakukan yakni dimulai memperkenalkan paslon kepala daerah kepada masyarakat menyampaikan visi misi terkait dengan perkembangan kota Sibolga untuk 5 tahun kedepan lalu menampung aspirasi masyarakat dan respon masyarakat cukup baik walaupun terdapat partai politik lain dan partai politik pengusung serta tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan kami.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang mengikuti kegiatan kampanye terbuka secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media sosial beliau menjawab yang saya tahu partai akan memperkenalkan pasangan kepala daerah terlebih dahulu kepada masyarakat serta menyampaikan visi misi terkait dengan janji untuk membangun lebih baik lagi dan respon masyarakat cukup baik walaupun kebanyakan masyarakat kurang tertarik dengan kampanye terbuka dan lebih tertarik dengan kampanye media.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu eni gusmat selaku warga masyarakat kota Sibolga mengenai tentang mengikuti kegiatan kampanye terbuka secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media sosial beliau menjawab yang saya tahu partai politik akan memperkenalkan pasukan kepala daerah kepada masyarakat menyampaikan visi misi terkait dengan janji untuk membangun rotasi boga yang lebih baik lagi dan menampung aspirasi kami sehingga respon kami cukup bagus walaupun diantara kami sebagai masyarakat yang kurang menyukai politik.

h. Masuk Kedalam Kelompok Kepentingan

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang masuk kedalam kelompok kepentingan beliau menjawab yang masuk ke dalam kelompok kepentingan adalah para tokoh-tokoh dan Tim sukses yang telah direkrut tujuannya adalah untuk keuntungan pribadi sehingga mereka tertarik untuk masuk ke dalam kelompok kepentingan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua Dari Partai Golkar Kota Sibolga yang mengenai tentang masuk ke dalam kelompok kepentingan beliau menjawab yang masuk ke dalam kelompok kepentingan adalah tokoh-tokoh yang direkrut bertujuan untuk keuntungan pribadi dan kelompok sehingga mereka tertarik dan juga karena terdapat janji-janji dari paslon yang akan diberikan kepada mereka.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Crishtianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang masuk ke dalam kelompok kepentingan beliau menjawab yang masuk ke dalam kelompok kepentingan adalah tokoh-tokoh dan Tim sukses yang direkrut tujuannya yang pasti untuk keuntungan pribadi maupun kelompok sehingga tentu saja mereka tertarik untuk masuk kedalam kelompok kepentingan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku warga Masyarakat Kota

Sibolga mengenai tentang masuk ke dalam kelompok kepentingan beliau menjawab yang saya tahu yang masuk ke dalam kelompok kepentingan salah satunya adalah kelompok pemerintahan yang bertujuan untuk mempertahankan posisi dan jabatan mereka sehingga mereka tertarik untuk masuk.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang masuk ke dalam kelompok kepentingan beliau menjawab yang saya tahu yang masuk ke dalam kelompok kepentingan itu adalah Tim sukses dan anggota politik terkait yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dan kelompok sehingga mereka tertarik.

i. Melakukan Komunikasi Politik Dengan Pejabat Politik

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Kota Sibolga mengenai tentang melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik beliau menjawab tahapan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat pemuda agama dan tokoh politik pelaksanaannya tergantung muatan politiknya apakah menguntungkan atau merugikan dan yang dibahas terkait dengan Pilkada.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik beliau menjawab tahapan yang dimulai dengan membuat strategi dalam melakukan

pendekatan kepada tokoh masyarakat pemuda agama dan tokoh politik di mana prosesnya tergantung pada muatan politik yang dibahas mengenai janji-janji politik dalam hal ini merupakan konteks pribadi maupun kelompok.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Chrishtianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik beliau menjawab tahapan yang dimulai dengan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat baik itu tokoh agama tokoh politik yang prosesnya tergantung dengan muatan politik dan yang dibahas terkait dengan Pilkada.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik beliau menjawab tahapannya melihat konteks dan efek pengaruh yang disampaikan terkait dengan muatan politik yang dibahas tentu saja tentang pilkada.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik beliau menjawab yang saya tahu tahapannya dimulai dengan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang dibahas terkait dengan Pilkada.

j. Pemberian Suara (Voting) Pada Saat Pilkada

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dengan ibu Hj. Suryanti Sidabutar SKM selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pemberian suara (voting) pada saat pilkada beliau menjawab proses pemberian suara saat pilkada dilakukan secara terbuka dan tertutup dan respon masyarakat cukup baik dan salah satu hambatan nya adalah keuangan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DPD Partai Ke Kota Sibolga mengenai tentang pemberian suara (voting) pada saat pilkada beliau menjawab proses pemberian suara pada saat Pilkada dilakukan secara terbuka dan terarah respon warga sangat bagus dan terjaga dalam menyampaikan suaranya walaupun terdapat hambatan yakni terdapat satu sara dimana kota Sibolga merupakan kota kecil yang banyak suku nya.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan bapak Adri Chrishtianto Malau selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Sibolga mengenai tentang pemberian suara (voting) pada saat pilkada beliau menjawab proses pemberian suara pada saat pilkada bebas, rahasia, dan terarah serta respon masyarakat cukup baik walaupun terdapat hambatan mngebai keuangan.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dengan bapak Syamsul Sikumbang selaku Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang pemberian suara (voting) pada saat pilkada beliau menjawab

negara ini merupakan negara demokrasi yang bebas dalam memberikan pendapat proses pemberian suara pada saat pilkada sangat baik dan respon masyarakat cukup baik dan terjaga dalam memberikan suaranya.

Berdasarkan output wawancara yang sudah dilakukan hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dengan ibu Eni Gusmat selalu Warga Masyarakat Kota Sibolga mengenai tentang pemberian suara (voting) pada saat pilkada beliau menjawab negara kita negara demokrasi yang bebas dalam memberikan pendapat sehingga pada saat pilkada berlangsung dengan tertib walaupun terdapat money politik sebelum melaksanakan pilkada.

Tabel 4.4

Data Jumlah Suara Pada Pilkada Kota Sibolga 2020

No.	Keterangan	Jumlah Suara
1.	Jumlah suara sah	51.327
2.	Jumlah suara tidak sah	499
	Total	51.826

No.	Keterangan	Jumah Suara
1.	laki – laki	31.573
2.	Perempuan	32.756
	Total	64.329

Sumber Data: Data Pilkada Kota Sibolga2020

4.2 Pembahasan

Subbab ini menganalisis hasil wawancara interpretasi data berdasarkan fokus penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara komprehensif, kajian diperoleh melalui wawancara dengan para pelapor mengenai penilaian yang diberikan oleh mereka terkait dengan peningkatan strategi komunikasi politik partai Golkar. Pilkada di kota Sibolga.

4.2.1 Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Sibolga

Komunikasi politik sangat berarti dalam memastikan demokrasi. Komunikasi politik ialah penggerak awal dari perpolitikan yang demokratis walaupun komponen-komponen sosial lainnya tidak di kesampingkan. Dalam proses politik, komunikasi politik ialah hal yang berarti, terutama sebagai jembatan buat mengantarkan pesan-pesan. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang bermuatan politik buat disampaikan kepada khalayak banyak. Komunikasi politik dimaknai selaku perilaku ataupun aktivitas komunikasi melalui media massa yang bertabiat politik, punya akibat politik serta mempengaruhi terhadap perilaku politik. Dengan adanya persaingan kepentingan komunikator politik buat pengaruh memperoleh serta mempertahankan serta memperluas kekuasaan. Kurangnya komunikasi politik antar elit politik dengan warga hendak membatasi tujuan politik itu sendiri serta apa yang di harapkan tidak bisa tercapai. Pesan hendak hingga dengan baik jika komunikator bisa menyampaikannya dengan baik terhadap komunikannya.

Tiap partai politik sangat di perlukan komunikasi politik efisien, pada dasarnya tujuan komunikasi politik sangat berkaitan dengan pesan politik yang mau di informasikan oleh komunikator. Komunikasi politik bisa mendesak partisipasi politik yang diartikan supaya warga turut serta dalam aktivitas politik sehingga sangat diperlukan komunikasi politik supaya pesan politik bisa tersampaikan dengan baik kepada komunikan serta menghasilkan apa yang diharapkan. Oleh karena itu komunikasi politik sangat berarti dalam mengantarkan pesan politik serta pengaruhi khalayak ramai sehingga dapat membagikan hasil yang diharapkan khususnya untuk Partai Golkar demi tingkatkan partisipasi politik warga pada Pilkada Kota Sibolga 2020.

Beberapa bentuk komunikasi politik oleh para aktor politik antara lain selaku berikut:

- a) Retorika politik, ialah seni manipulatif ataupun metode persuasi politik bertabiat transaksional dengan memakai lambang buat mengenali pembicaraan dengan pendengar meawi pidato.
- b) Agitasi politik, ialah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan ataupun tulisan, dengan cara merangsang ataupun membangkitkan emosi khalayak.
- c) Propaganda politik, ialah komunikasi secara berencana sistematis yang dilakukan secara berulang- ulang buat pengaruhi seorang, khalayak ataupun bangsa agar melaksanakan aktivitas tertentu dengan pemahaman sendiri tanpa paksa atau dipaksa untuk kepentingan politik.

- d) Public relations politic, ialah suatu kerja melayani publik dengan membawa sejumlah isu buat jadi atensi publik.
- e) Lobi poitik, ialah sesuatu kegiatan komunikasi oleh aktor politik, politisi ataupun pejabat publik serta pimpinan organisasi aktivitas tersebut berlangsung secara resmi serta tidak formal.
- f) Kampanye politik, ialah segala upaya yang terorganisir bertujuan buat pengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih serta kampanye poitik selalu merujuk kampanye pada pemilihan universal.
- g) Pemasaran poitik, ialah segala aktivitas terencana strategis serta taktis dalam menyebarkan makna politik kepada pemilih buat mensukseskan kandidat ataupun partai politik dengan segala aktivitas politiknya yang dilakukan dengan tata cara pendekatan marketing.
- h) Branding politik, ialah semuapengaaman, kegiatan serta faktor psikoogis dalam menghasilkan brand politik yang unggul, unik, menarik serta sanggup membagikan pengaruh kedalam benak konsumen politik.
- i) Penelitian politik, ialah riset ilmiah yang memfokuskan pada keseluruhan komunikasi politik.

Pada saat Pilkada atau Pemilu tiap Partai Politik perlu memiliki Strategi politik adalah suatu rencana yang sistematis serta mengimplementasikannya dalam menggapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan memiliki strategi politik inilah partai politik sanggup memenangkan dalam tiap momentum perebutan kekuasaan. Namun didalam strategi politik, perlu adanya strategi komunikasi politik. Strategi

politik ialah tentang bagaimana proses komunikasi yang terjalin di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, ataupun secara langsung. Strategi Komunikasi Politik adalah rencana yang meliputi tata cara, metode serta tata hubungan fungsional antara unsur- unsur serta faktor- faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional antara unsur- unsur serta faktor- faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional untuk menggapai tujuan serta sasaran. Melalui strategi politik, kita dapat membuat rencana yang sistematis serta mengimplementasikannya dalam menggapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik sanggup memenangkan dalam tiap momentum perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, berarti kita dapat dicermati bahwa hal tersebut hendak pengaruhi tercapai ataupun tidaknya tujuan. Oleh karena itu strategi politik sangat berarti untuk membuat rencana dan mengenali hasil rencana yang telah dibuat dalam menggapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk memikirkan kembali beberapa hal seperti mendefinisikan strategi politik serta faktor-faktor kepada Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik warga.

Faktor- faktor menurut proses taktik politik merupakan meliputi:

- 1) Komunikator Politik (World Health Organization). Komunikasi terjalin pada sesuatu matrik sosial. Suasana loka komunikasi bermula, tumbuh, dan berlangsung menerus merupakan bagian integral menurut sistem sosial ini. Komunikasi massa menjadi organisasi yang menduduki posisi berarti yang peka pada jaringan sosial, menjawab bermacam tekanan menggunakan menolak dan menentukan data yang semuanya terjadi pada sistem sosial yang bersangkutan. Oleh karenanya

komunikator politik ini memainkan peranan social yang utama, terutama pada proses opini publik. Komunikator mampu dianalisis selaku dirinya sendiri. Artinya melalui sikapnya terhadap khalayak ataupun publik potensial, prestise yg diberikannya pada mereka menjadi manusia.

- 2) Pesan Politik (Say What). Pesan merupakan sesuatu muatan ataupun konten komunikasi yang dikemas ataupun dikonstruksi selaku data yang bermuatan politik dan ditransformasikan pada khalayak menggunakan menggunakan media, baik media massa juga media sosial. Pesan politik merupakan keliru satu faktor berarti pada komunikasi politik yang pada informasikan sang komunikator pada komunikan pada macam pesan mampu berbentuk mulut & non mulut.
- 3) Saluran Ataupun Media Politik (In Wich Chanael). Terus sebagai kompek dan kentara tujuan dan target yg hendak pada bidik maka strategi yang dipakai harus terus sebagai kreatif. Disinilah komunikator politik dituntut untuk kreatif untuk mengantarkan pesan yang inovatif. Dengan Konvergensi media akan menunjukkan efek dan dampak yang akbar pada khalayak. Konvergensi media adalah penggabungan media massa dan teknologi digital.
- 4) Sasaran Ataupun Sasaran Politik (To whom). Khalayak merupakan sesuatu kedudukan yang ada interim sifatnya, penerima pesan hendak menprakarsai penyampaian sesuatu pesan. Dalam komunikasi politik, khalayak yang mendapat pesan-pesan politik merupakan khalayak politik. Jadi Khalayak ataupun masyarakat luas ataupun public yang mendapat, memaknai, dan terbawa- bawa menggunakan

kabar dan data ataupun pesan yang mempunyai muatan politik pada wujud apapun merupakan khalayak politik.

- 5) Pengaruh Atau pun Dampak (what effect). Dampak menurut taktik komunikasi politik yang dipakai sang para calon pada pemilu/pilkada mampu berpengaruh dalam khalayak menggunakan kilat.

Pada saat Pemilu ataupun Pilkada setiap Partai Politik perlu memiliki strategi komunikasi politik yang digunakan selaku cara berkomunikasi dalam penyampaian pesan yang bermuatan politik buat pengaruhi khalayak ramai. Karena strategi politik ialah tentang bagaimana proses yang terjalin di dalam pemenangan satu pertarungan politik oleh partai politik, ataupun secara langsung, oleh seseorang calon legislatif ataupun calon pimpinan wilayah, yang menghendaki kekuasaan serta pengaruh sebesar-besarnya di tengah- tengah warga selaku konstituennya. Hal ini disebabkan peranan strategi komunikasi politik sangatlah berarti dalam merancang, melaksanakan serta turut serta pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan universal. Strategi komunikasi politik selain selaku penentu kemenangan politik, strategi komunikasi politik juga dapat pengaruhi perolehan pada suara suatu partai politik. Strategi komunikasi politik bisa membagikan khasiat dalam membangun serta menghasilkan kekuatan melalui kontinuitas juga konsistensi khususnya Partai Golkar juga harus memiliki strategi komunikasi politik yang baik dalam tingkatkan Partisipasi Politik masyarakat pada Pilkada Kota Sibolga 2020.

Strategi komunikasi politik sangat diperlukan selaku cara seseorang ataupun orang ataupun kelompok dalam berbicara terpaut dengan penyampaian pesan politik

dengan tujuan buat pengaruhi khalayak ramai. Dengan demikian maka kami merasa perlu buat sedikit mengulas terpaut dengan beberapa point semacam defenisi strategi komunikasi politik, elemen– elemen serta tahapan– tahapannya kepada Partai Golkar Dalam Tingkatkan Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada Kota Sibolga 2020.

Ada pula beberapa tahapan perencanaan ataupun strategi komunikasi politik ini yang digagas oleh Gregory (dalam Venus, 2009), di antara lain:

- 1) Analisis Masalah. langkah awal dalam strategi komunikasi politik adalah menganalisis masalah. Dalam analisis masalah perlu adanya identifikasi yang jelas, supaya bisa melakukan identifikasi dengan jelas, maka analisis masalah wajib dilakukan secara sistematis ataupun terstruktur. Dalam analisis masalah juga, ada pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan serta wajib dilakukan secara objektif serta tertulis serta perlu ditinjau secara berkala setiap waktu.
- 2) Menyusun Tujuan/ Sasaran(Planning). Tujuan yang disusun haruslah bertabiat logis serta realistis alias tidak terlihat kalau dibuat-buat. Penataan tujuan ini juga merupakan salah satu elemen dalam proses perencanaan pada suatu komunikasi poitik. Didalam tujuan tersebut ada penyampaian pesan yang berupa pemahaman baru ataupun ideology yang baru, pemahaman, revisi citra, membentuk anggapan ataupun penyamaan komentar, serta mengajak warga buat melakukan suatu yang direncanakannya.
- 3) Segmentasi serta Identifikasi Sasaran ataupun Sasaran. Jika sasaran ataupun sasaran disegmentasi serta diidentifikasi, maka proses perencana ke depannya dapat dijalankan lebih gampang serta pas sasaran ataupun cocok dengan planning. Dalam

melakukan identifikasi sasaran, maka perlu mengenali beberapa lapisan sasaran yang di antaranya sasaran lapis satu, sasaran lapis 2, serta seterusnya yang cocok dengan tujuan perencanaan strategi komunikasi politik.

- 4) Memastikan Pesan. Memastikan pesan dalam perencanaan komunikasi politik ialah suatu yang paing berarti. Karena pesan komunikasi politik ialah sesuatu sarana atau media yang hendak membawa sasaran buat menjajaki apa yang di idamkan oleh penyampai pesan ataupun komunikator dari beberapaprogram komunikasi poitik yang pada akhirnya sampai pada pencapaian tujuan.
- 5) Membuat Strategi serta Taktik. Strategi ataupun lebih dikenal dengan istilah guilding principe, ataupun the big ideal yang ialah sesuatu pendekatan secara keseluruhan yang hendak diterapkan dalam komunikasi politik. Sebaliknya penentuan taktik ini sangat tergantung pada apa dan bagaimana tujuan serta sasaran yang hendak dibidik oleh komunikator. Terus menjadi kompleks serta jelas tujuan serta sasaran yang hendak dibidik maka taktik yang digunakan wajib terus menjadi kreatif serta variatif. Di sinilah si komunikator politik dituntut buat kreatif daam membagikan pesan yang inovatif.
- 6) Alokasi Waktu serta Sumber Dana. Komunikasi politik tentunya dilakukan dalam waktu yang tidak menentu ataupun kapan saja. Apalagi ada kalanya waktu tersebut ditetapkan oleh pihak luar partai ialah Panwaslu. Ada juga yang didetapkan sendiri oleh partai itu sendiri. Pengalokasian dana dan operasionalnya ini didasari secara efektif serta efektif.

- 7) Evaluasi. Evaluasi ini ialah tahapan akhir ini ataupun tahapan setelah strategi dilaksanakan serta sangat berfungsi berarti dalam perencanaan komunikasi politik. Sebab, nantinya hasil dari evaluasi ini hendak digunakan dalam melakukan strategi komunikasi politik selanjutnya, sehingga evaluasi perlu dilakukan secara terstruktur serta sistematis.

Berikut ini beberapa elemen strategi komunikasi politik:

- a) Goal dan Obyektif. Goal merupakan hasil yang utama dan diharapkan dalam strategi komunikasi politik. Sebaliknya obyektifnya merupakan tujuan khusus yang ingin dicapai.
- b) Publik. Public ialah obyek yang dijadikan sasaran ataupun sasaran yang sifatnya umum, tetapi public ini perlu ditetapkan dengan khusus untuk menjauhi terminologi yang universal setelah sasaran ditetapkan, maka perlu adanya pembuatan catatan public secara berurutan sesuai prioritasnya.
- c) Strategi. Strategi ialah tata cara yang paling mendasar dalam melakukan sesuatu aksi. Sebaliknya strategi ini bertubuh universal ataupun dengan kata lain, pendekatannya digunakan untuk mencapai goal dan obyektif.
- d) Taktik. Taktik ini ialah media atau alat yang khusus digunakan dalam mengantarkan suatu yang diucapkan selaku sasaran pesan. Tujuan dari taktik dalam untuk mengkomunikasikan tiap pergantian manajemen.
- e) Anggaran serta Waktu. Semacam biasa, dalam ilmu politik perlu adanya suatu perencanaan yang terencana serta cocok dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

f) Evaluasi. Evaluasi ini diperlukan buat mengenali dari keberhasilan sesuatu perencanaan strategi komunikasi politik. Sehingga, kita tahu kelebihan ataupun kelemahan dari sesuatu perencanaan yang telah terbuat sebelumnya agar ke depannya dapat membuat strategi komunikasi politik yang lebih baik lagi dengan belajar dari sesuatu kelemahan serta mempertahankan ataupun menginovasi dari kelebihan.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek berarti sesuatu demokrasi apalagi pada saat Pemilu ataupun Pilkada. Partisipasi politik ialah karakteristik khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang terbuat serta dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut serta pengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak turut serta menentukan isi keputusan politik. Aktivitas ini mencakup aksi semacam membagikan suara dalam pemilihan universal, menghadiri rapat universal, jadi anggota suatu partai ataupun kelompok kepentingan, mengadakan ikatan (contacting) dengan pejabat pemerintah ataupun anggota parlemen, serta sebagainya. Oleh karena itu, di negara- Negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menampilkan bahwa warga Negara mengikuti serta menguasai masalah politik serta mau melibatkan diri dalam kegiatan- aktivitas itu. Hendaknya, tingkatan partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap selaku tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menyimpan atensi terhadap masalah kenegaraan. Jadi partisipasi politik ialah hal yang berkaitan dengan aktivitas seorang ataupun sekelompok orang dalam hal penentuan ataupun pengambilan

kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin maupun penentuan perilaku terhadap kebijakan publik yang terbuat oleh pemerintah buat di jalankan, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau apalagi dengan kekerasan.

Dengan adanya partisipasi politik seorang ataupun sekelompok orang bisa menjalankan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin maupun penentuan perilaku terhadap kebijakan publik yang terbuat oleh pemerintah buat di jalankan, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau apalagi dengan kekerasan. Oleh karena itu partisipasi sangat berarti buat tercapai ataupun tidaknya tujuan terpaut dengan kemenangan dalam pemilihan. Dengan demikian maka kami merasa perlu buat sedikit mengulas terpaut dengan beberapa point semacam definisi partisipasi politik, aspek, wujud serta jenis kepada Partai Golkar Dalam Tingkatkan Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada 2020.

Partisipasi politik ialah sesuatu kegiatan pasti dipengaruhi oleh beberapa factor:

- a) Aspek pemahaman politik terhadap pemerintah(sistem politik).
- b) Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik.
- c) Berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Bisa disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin serta kepercayaan(agama). Kepribadian seorang bersumber pada faktor- faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif lumayan besar terhadap partisipasi politik.

- d) Meningkatkan watak serta sistem partai tempat orang itu hidup. Seorang yang hidup dalam Negara yang demokratis, partai- partai politiknya cenderung mencari sokongan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
- e) Adanya perbedaan regional. Perbandingan ini ialah aspek lingkungan yang mempengaruhi terhadap perbedaan sifat serta tingkah saya orang.

Secara umum tipologi partisipasi selaku aktivitas dibedakan jadi:

- a) Partisipasi aktif, ialah partisipasi yang berorientasi pada proses input serta output.
- b) Partisipasi pasif, ialah partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam makna hanyamenaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c) Golongan putih(golput) ataupun keompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita- citakan.

Mibrath serta Goeyang dilansir oeh Cholisin(2017: 152) membedakan partisipasi politik jadi beberapa kategori ialah:

- a) Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi serta menarik diri dari proses politik.
- b) Partisipasi politik spectator orang yang setidaknya- tidaknyapernah turut memilih dalam pemilihan universal.
- c) Partisipasi politik gadiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, ialah komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai serta pekerja kampanye serta aktivis warga.

- d) Partisipasi politik pengkritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam wujud yang tidak konvensional. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input serta output politik. Sebaliknya partisipasi pasif terletak pada outputnya saja.

Ada pula rincian wujud partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

1) Partisipasi politik konvensional

- a) Pemberian suara atau voting
- b) Dialog politik meter. Aktivitas kampanye
- c) Membentuk serta bergabung dalam kelompok kepentingan
- d) Komunikasi individual dengan pejabat politik ataupun administrative

2) Partisipasi politik nonkonvensional

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: pengrusakan, pemboman, pembakaran
- f) Aksi kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Rendahnya partisipasi politik warga pada saat Pilkada Kota Sibolga 2020 jadi salah satu penanda tentang masih lemahnya strategi dalam politik yang dijalankan oleh Partai Politik Pengusung Paslon pada Pilkada Kota Sibolga 2020 tidak terkecuali Partai

Golkar. Sehingga membutuhkan Strategi komunikasi politik yang lebih baik lagi buat menanggulangi ini.

Bersumber pada hasil wawancara I dengan beberapa anggota partai yang berfungsi langsung dikala pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga 2020, semacam hasil wawancara penulis tentang komunikator politik bahwa dalam membentuk komunikator politik Partai Golkar menyeleksi serta mengklasifikasi terlebih dahulu secara efektif tokoh- tokoh yang dikenali di lingkungan warga buat mencari tokoh- tokoh yang aktif, peduli kepada masyarakat serta berpikir maju ke depan buat menggapai tujuan serta mengetahui serta mencermati permasalahan yang ada di warga. Tiap tokoh memiliki keahlian, partai Golkar hendak membagikan tugas kepada tokoh- tokoh yang terpilih tidak terkecuali senior partai Golkar serta para pengurus yang memiliki keahlian buat berbicara dengan baik kepada masyarakat, tokoh- tokoh yang telah diseleksi hendak ditempatkan cocok dengan tugasnya masing- masing buat jadi komunikator partai Golkar dalam mengantarkan pesan baik kepada masyarakat.

Buat menggapai kemenangan pada saat Pemilu ataupun Pilkada seperti Pilkada Kota Sibolga 2020 perlu strategi komunikasi politik yang baik bagi para ahli strategi komunikasi politik ialah tentang bagaimana proses yang terjalin di dalam pemenangan satu pertarungan politik oleh partai politik, ataupun secara langsung, oleh seseorang calon pimpinan wilayah, yang menghendaki kekuasaan serta pengaruh sebesar-besarnya di tengah- tengah warga selaku konstituennya. Bersumber pada teori tersebut bisa dikenal bahwa strategi komunikasi politik adalah cara berkomunikasi dalam penyampaian pesan yang bermuatan politik buat pengaruhi khalayak ramai. Hal ini

disebabkan peranan strategi komunikasi politik sangatlah berarti dalam merancang, melaksanakan serta turut serta pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan universal. Strategi komunikasi politik selain selaku penentu kemenangan politik, strategi komunikasi politik juga dapatengaruhi perolehan pada suara suatu partai politik. Strategi komunikasi politik bisa membagikan khasiat dalam membangun serta menghasilkan kekuatan melalui kontinuitas juga konsistensi. Tetapi dalam pelaksanaannya jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa strategi komunikasi politik yang telah dilakukan oleh Partai Golkar Kota Sibolga sudah pas sasaran walaupun hasilnya masih belum efisien karena masih adanya masyarakat yang tidak percaya dengan politik serta anti dengan politik.

Bersumber pada penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Partai Golkar Kota Sibolga sudah melaksanakan strategi komunikasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga dengan adanya komunikator politik, pesan politik, saluran ataupun media politik, sasaran ataupun sasaran politik serta pengaruh ataupun dampak sehingga sesuai dengan tujuan yang mau dicapai dengan beberapa teknik yang dilakukan cocok dengan wujud komunikasi politik semacam:

- a) Retorika(tokoh politik dari Partai Golkar mengantarkan visi- misi Paslon Kepala Daerah dengan meyakinkan warga bahwa paslon kepala daerah bisa membagikan pergantian pada Kota Sibolga),
- b) Agitasi politik(tokoh warga yang direkrut oleh Partai Golkar membuat gebrakan baru buat meyakinkan warga terpaut dengan kelebihan Paslon Kepala Daerah yang di usung oleh Partai Golkar sehingga membuat warga yakin),

- c) Propaganda politik(beberapa tokoh politik mengantarkan data terpaut dengan paslon Kepala Daerah di selingin dengan adanya tujuan tertentu),
- d) Public reations poitic(kader– kader Partai menghasilkan isu poitik tentang Pason Kepala Daerah tertentu buat jadi atensi pubic, bisamenggunakan mediasosiaataupun mediacetak),
- e) lobi poitik (semacam tokoh pemerintah yang jadi kader Partai Golkar yang turut bekerjasamadaam pengaruhi buat keuntungan tertentu),
- f) Kampanye politik (regu berhasil dari Partai Golkar meakukan kampanye terpaut dengan penyampaian visi– misi, program– program yang direncanakan ketika menjadi Kepala Daerah sehingga dapat pengaruhi warga),
- g) Dialog Politik (Pason Kepala Daerah beserta tim berhasil dari Partai Golkar melakukan kunjungan ke warga buat turut serta dalam aktivitas warga bisa diselingi dengan mengantarkan serta mencermati aspirasi dari warga),
- h) Pemasaran politik(Paslon Kepala Daerah yang telah diusung oleh partai Golkar hendak dipublikasikan dengan memakai media sosial seperti FB Instagram media online serta juga menggunakan media cetak serta media pendukung lainnya jadi bisa memperuas cakupan dalam mengantarkan data serta jadi nilai jual dalam mengantarkan keunggulan dari Paslon Kepala Daerah yang diusung oleh partai kepada masyarakat) dan
- i) Branding politik(Partai Golkar mempublikasikan Paslon Kepala daerah yang telah diusung serta diperkenalkan memakai media sosial seperti FB Instagram media

online serta juga menggunakan media cetak serta media pendukung lainnya jadi bisa memperluas cakupan dalam mengantarkan data),

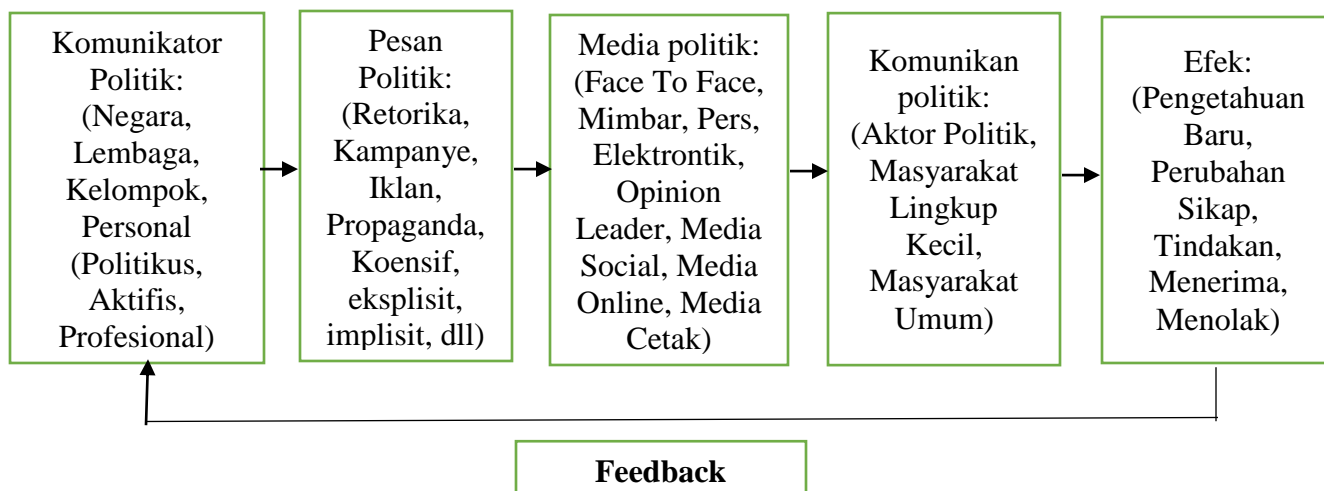
Semua teknik itu dilakukan dengan tujuan supaya warga bisa ikut berpartisipasi dalam berpolitik pada saat Pilkada Kota Sibolga. Ada juga kegiatan lainnya seperti melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat ialah mangulas pentingnya demokrasi di Indonesia dan kedudukan warga dalam tingkatan sistem demokrasi di Indonesia. Buat pendekatannya komunikasi politik dilakukan dengan selalu bekerjasama dengan lembaga terpaut semacam KPUD, Pemerintah, Bawaslu, ataupun civil society lainnya agar bisa dilakukan dengan baik perlu melibatkan kader-kader Partai Golkar serta stakeholder lain guna mendekati diri kepada masyarakat supaya warga bisa percaya dengan partai Golkar, sambil memberikan bimbingan sehingga mereka bisa memahami menimpa Pilkada sesuai dengan harapan warga tentang jenis pemimpin yang mereka inginkan buat pertumbuhan kota Sibolga kedepannya. Buat monitoring serta evaluasinya DPD Partai Golkar Kota Sibolga melakukan pengawasan yang ketat dengan setelah itu ada tindakan yang hendak dilakukan dengan harapan setelah dievaluasi itu hal tersebut tidak terulang kembali. Mengawal jalannya Pilkada Kota Sibolga 2020 tiap orang yang terpaut semacam petugas TPS serta warga senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan serta juga setiap TPS Kelurahan serta Kecamatan tiap-tiap membuat laporan terpaut hasil rekapitulasi suara setelah dilakukan pemilihan universal kepada KPUD Kota Sibolga.

4.2.2 Analisis Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Sibolga

Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada Kota Sibolga 2020 menarik buat dimengerti. Itulah sebabnya penelitian ini diperuntukan buat mengenali bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada Kota Sibolga 2020.

Cocok dengan teori bahwa strategi komunikasi politik partai Golkar Kota Sibolga telah mencermati 5(lima) hal, ialah:

1. Komunikator Politik (World Health Organization).
2. Pesan Politik (Say What).
3. Sauran Ataupun Media Politik(In Wich Chanae).
4. Sasaran Ataupun Sasaran Poitik(To whom).
5. Pengaruh Ataupun Dampak(what effect).



Gambar 4.1 Strategi Komunikasi Politik Partai

Bersumber pada hal tersebut, Partai Golkar Kota Sibolga telah memastikan Komunikator Politik (World Health Organization), mempersiapkan pesan politik(Say What) yang mau di informasikan, memastikan Saluran Ataupun Media Politik(In Wich Chanael), telah memastikan Sasaran Ataupun Sasaran Politik (To whom) yang telah diklasifikasi serta hasilnya telah menampilkan Pengaruh Ataupun Dampak (what effect).

Dalam strategi komunikasi politik wajib memiliki perencanaan ataupun strategi komunikasi politik yang digagas oleh Gregory(daam Venus, 2009), di antara lain:

- a) Analisis Masalah. langkah awal dalam strategi komunikasi politik adalah menganalisis masalah. Dalam analisis masalah perlu adanya identifikasi yang jelas, supaya bisa melakukan identifikasi dengan jelas, maka analisis masaah wajib dilakukan secara sistematis ataupun terstruktur. Dalam analisis masalah juga, ada pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan serta wajib dilakukan secara objektif serta tertulis serta perlu ditinjau secara berkala setiap waktu. Semacam hanya dengan Partai Golkar Sebelum turut serta pada Pilkada Kota Sibolga 2020, terlebih dahulu melakukan analisis dari pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga sebelumnya sehingga bisa di perbaiki buat Pilkada Kota Sibolga 2020.
- b) Menyusun Tujuan/ Sasaran(Planning). Tujuan yang disusun haruslah bertabiat logis serta realistis aias tidak terlihat kaau dibuat- buat. Penataan tujuan ini juga merupakan salah satu elemen daam proses perencanaan pada suatu komunikasi politik. Didalam tujuan tersebut ada penyampaian pesan yang berupa pemahaman baru ataupun ideology yang baru, pemahaman, revisi citra, membentuk anggapan

ataupun penyamaan komentar, serta mengajak warga buat melakukan suatu yang direncanakannya. Sebelum Partai Golkar Turut serta pada Pilkada Kota Sibolga terlebih dahulu menyusun Tujuan ataupun Sasaran yang mau dicapai pada Pilkada Kota Sibolga 2020.

- c) Segmentasi serta Identifikasi Sasaran ataupun Sasaran. Jika sasaran ataupun sasaran disegmentasi serta diidentifikasi, maka proses perencanaan ke depannya dapat dijalankan lebih gampang serta pas sasaran ataupun cocok dengan planning. Partai Golkar telah membuat rencana untuk mengenali ataupun menetapkan sasaran yang mau dituju semacam; pemilih pemula, kalangan milenial dengan harapan supaya menemukan banyak perolehan suara pada Pilkada Kota Sibolga 2020.
- d) Memastikan Pesan. Memastikan pesan dalam perencanaan komunikasi politik ialah suatu yang penting berarti. Karena pesan komunikasi politik ialah sesuatu sarana atau media yang hendak membawa sasaran buat menjajaki apa yang diinginkan oleh penyampai pesan ataupun komunikator dari beberapa program komunikasi politik yang pada akhirnya sampai pada pencapaian tujuan. Partai Golkar mempersiapkan terpaut dengan isi pesan yang hendak diinformasikan oleh tokoh-tokoh yang bertugas buat mengantarkan pesan politik.
- e) Membuat Strategi serta Taktik. Strategi ataupun lebih dikenal dengan istilah guiding principle, ataupun the big idea yang ialah sesuatu pendekatan secara keseluruhan yang hendak diterapkan dalam komunikasi politik. Sebaliknya penentuan taktik ini sangat tergantung pada apa dan bagaimana tujuan serta sasaran yang hendak dibidik oleh komunikator. Sebelum memutuskan buat turut dalam

Pilkada Kota Sibolga 2020, Partai Golkar terlebih dahulu membuat strategi ataupun taktik baru yang berbeda dari sebelumnya dengan meningkatkan dalam menyeleksi stakeholder baru yang bisa yang diajak kerjasama untuk menggapai tujuan bersama lalu membuat taktik buat pengaruhi warga.

- f) Alokasi Waktu serta Sumber Dana. Komunikasi politik tentunya dilakukan dalam waktu yang tidak menentu ataupun kapan saja. Apalagi ada kalanya waktu tersebut ditetapkan oleh pihak luar partai ialah Panwaslu. Ada juga yang ditetapkan sendiri oleh partai itu sendiri. Pengalokasian dana dan operasionalnya ini didasari secara efektif serta efektif. Partai Golkar bersama Partai lain yang pengusung Paslon Kepala Daerah lainnya telah mempersiapkan anggaran serta mempersiapkan waktu yang diperlukan buat aktivitas politik tersebut dengan tujuan buat mencapai kemenangan pada Pilkada Kota Sibolga2020, walaupun anggaran yang diresmikan masih kurang tetapi wajib diduga.
- g) Evaluasi. Evaluasi ini ialah tahapan akhir ini ataupun tahapan setelah strategi dilaksanakan serta sangat berfungsi berarti dalam perencanaan komunikasi politik. Dalam Pilkada Kota Sibolga2020 angkatan udara(AU) ada banyak catatan untuk Partai Golkar karena kekalahan Paslon Kepala Daerah yang diusung bersama dengan partai politik lainnya, sehingga pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga kedepan wajib lebih baik lagi.

Tetapi, bagi analisis peneliti bahwa Partai Golkar belum sepenuhnya sukses dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada Kota Sibolga. Semacam masih ada beberapa warga anti politik tidak suka membahas tentang politik karena terdapat isu-

isu yang tidak jelas semacam money politik serta isu lainnya terkait dengan Pilkada Kota Sibolga sehingga menjadi sesuatu hambatan yang dialami oleh Partai Golkar pada Pilkada Kota Sibolga 2020 angkatan udara(AU), hendak namun warga masih merespon dengan positif terpaut dengan aktivitas yang dilakukan oleh Partai Golkar.

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Pada Pilkada Kota Sibolga ini jadi menarik buat dimengerti. Itulah sebabnya penelitian ini diperuntukan buat mengenali Bagaimana Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Pada Pilkada Kota Sibolga. DPD Partai Golkar Kota Sibolga berupaya dan selalu berupaya Meningkatkan Partisipasi Warga Pada Pilkada Kota Sibolga dengan membuat aktivitas- aktivitas yang melibatkan seluruh kader- kader Partai Golkar, Non Partai, serta bekerjasama dengan lembaga terpaut, stakeholder, Civil Society lainnya di dasar arahan KPUD Kota Sibolga dan Pemerintah Kota Sibolga. Banyak aktivitas yang telah dilakukan semacam melakukan pembelajaran politik, dialog politik kepada masyarakat dengan mengundang lembaga terpaut selaku narasumber, angkatan udara (AU) melakukan Kampanye. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Pada Pilkada Kota Sibolga yakni melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat Kota Sibolga dan melakukan kerjasama dengan stakeholder terpaut supaya warga percaya dan turut berpartisipasi pada Pilkada 2020 terus menjadi percaya dengan Partai Golkar serta paslon Kepala Daerah dengan ditunjukkan dengan beberapa pelaksanaan aktivitas sosial politik kemasyarakatan.

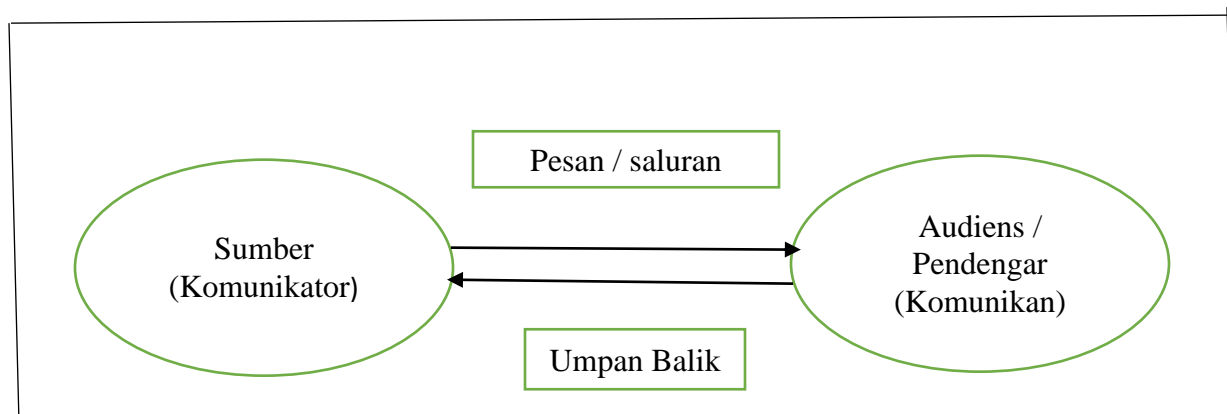
Aspek yang mempengaruhi strategi komunikasi politik:

- 1) Komunikator Politik (World Health Organization). Komunikasi terjalin ke dalam matriks sosial. Suasana di mana komunikasi dimulai, tumbuh dan berlanjut merupakan bagian integral dari sistem sosial ini. Pertama, Partai Golkar menyeleksi orang-orang yang dikenal di masyarakat, pertama secara selektif mengklasifikasi dan mencari mereka. Pribadi yang aktif, peduli terhadap masyarakat, berpikir ke depan untuk mencapai tujuan, mengetahui dan mengamati permasalahan yang ada di masyarakat. Karena setiap tokoh memiliki keahlian tiap-tiap, partai Golkar hendak membagikan tugas kepada tokoh-tokoh yang terpilih karena memiliki keahlian buat berbicara dengan baik hendak jadi komunikator partai Golkar dalam mengantarkan pesan baik kepada masyarakat.
- 2) Pesan Politik (Say What). Pesan ialah sesuatu muatan ataupun konten komunikasi yang dikemas ataupun dikonstruksi selaku data yang bermuatan politik serta ditransformasikan kepada khalayak dengan memakai media, baik media massa maupun media sosial. Partai Golkar mempersiapkan terpaut dengan isi pesan di informasikan oleh tokoh- tokoh yang bertugas buat mengantarkan menimpa tentang isu pembangunan kota Sibolga dengan cara memahami sistem birokrasi pemerintahan, isu industri perikanan karena kota Sibolga adalah pusat perikanan serta isu industri pariwisata walaupun para tokoh masih kurang memahaminya akan namun wajib memahaminya mengenai tentang industri perikanan serta pengembangan pariwisata. Strategi ini yang dilakukan buat di informasikan kepada

masyarakat walaupun belum pasti warga menguasai apa yang di informasikan serta memilih paslon kepala daerah yang telah diusung oleh partai Golkar.

- 3) Saluran atau media politik (Dalam Wich Chanael). Untuk tetap fokus pada tujuan dan sasaran yang kompleks dan terdefinisi dengan baik, taktik yang Anda gunakan harus tetap kreatif. Partai Golkar menerbitkan paslon kepala daerah yang didukung menggunakan media sosial seperti FB, Instagram, dan media online, serta menggunakan media cetak dan media pendukung lainnya untuk memperluas jangkauan penawaran datanya dan mempromosikan Kontribusi besar-besaran untuk memberikan nilai. Media dapat digunakan dengan sangat efektif sebagai forum untuk menyebarkan informasi, karena partai memainkan peran kepemimpinan di masyarakat setempat.
- 4) Tujuan politik (terhadap siapa). Audiens adalah lokasi sementara, dan penerima pesan ingin mengatur penyampaian pesan. Cocok dengan demografi warga Kota Sibolga yang mendominasi adalah pemilih pemula sehingga kami wajib menarik simpati kalangan milenial karena selain warga universal adalah kalangan milenial Kota Sibolga sehingga bisa menang mendudukkan Paslon Kepala Daerah yang diusung buat jadi walikota Sibolga sehingga mereka berusaha agar pesan politik tersebut bisa tersampaikan, walaupun pesan politik yang tersampaikan masih 65% disebabkan masih ada warga yang tidak suka membahas tentang politik hendak namun warga masih merespon dengan positif terpaut apa yang kami sampaikan.
- 5) Pengaruh Ataupun Dampak (what effect). Dampak dari strategi komunikasi politik yang digunakan oleh para paslon Kepala Daerah dalam Pilkada bisa berpengaruh

pada khalayak dengan kilat. Semacam strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam mengantarkan pesan politik pasti hendak mempengaruhi karena masyarakat hendak menemukan data tentang calon pemimpin yang hendak membawa perubahan untuk kota Sibolga sehingga pandangan warga terpaut paslon kepala daerah hendak berganti cocok dengan figur pemimpin yang warga harapkan buat memastikan masa depan kota Sibolga 5 tahun kedepan sehingga karena masyarakat begitu selektif dalam memilih calon pemimpin yang hendak membawa perubahan untuk kota Sibolga yang lebih baik lagi.



Gambar 4.2 Proses Komunikasi Politik

Menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga 2020 Partai Golkar membuat bermacam aktivitas- aktivitas dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warga semacam; dialog politik yang dilakukan dengan baik oleh Partai Golkar, para Paslon Kepala Daerah menampung aspirasi serta pendapat warga terpaut masalah- masalah yang dialami warga dengan mengundang lembaga terpaut buat jadi narasumber, dengan adanya kegiatan dialog politik yang kami lakukan sangat baik serta reaksi warga lumayan bagus karena kegiatan dialog politik yang dilakukan oleh partai adalah dialog

terbuka antara Paslon Kepala Daerah dengan warga serta para Paslon Kepala Daerah menjawab serta menampung aspirasi serta pendapat warga dikala dilakukan dialog terbukadan warga menguasai apayang di informasikan oleh para paslon kepala daerah, aktivitas selanjutnya melakukan kampanye tahapan pelaksanaan kampanye ialah Regu berhasil wajib disiapkan buat siap mengkampanyekan paslon kepala daerah dimulai dengan memperkenalkan paslon kepala daerah kepada masyarakat, mengantarkan visi misi terpaut terpaut dengan janji buat membangun kota sibolga yang lebih baik agi serta menampung aspirasi warga buat 5 tahun kedepan serta reaksi warga lumayan baik walaupun mayoritas warga kurang tertarik dengan kampanye terbuka dan lebih tertarik dengan kampanye media akan namun ada partai politik lain serta partai politik pengusung yang sama serta tokoh- tokoh yang tidak sejalan dengan kami.

Dari aktivitas- aktivitas yang telah dilakukan menjelang Pilkada Kota Sibolga 2020 hasilnya masih belum bertambah secara signifikan serta belum dikatakan berhasil, waaupun sebagian warga memiliki reaksi yang baik terpaut dengan pilkada dan sebagian warga lagi masih tidak percaya yang disebabkan sebagian warga yang masih anti dengan politik karena masyarakat menyangka bahwa apa yang di informasikan hanya janji- janji politik saja yang belum pasti dilakukan serta juga aspirasi- aspirasi yang di bagikan hanya sekedar didengarkan saja tetapi tidak direalisasikan oleh paslon kepala daerah yang diusung oleh partai Golkar jadi sebagian masyarakat menyangka bahwa paslon kepala daerah tersebut tidak cocok dengan figure pemimpin yang diharapkan oleh warga buat membawa perubahan untuk Kota Sibolga sehingga menjadi evaluasi untuk partai buat Pilkada Kota Sibolga selanjutnya. Serta juga ada Partai

Golkar melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik yang dimulai dengan membuat strategi dikala melakukan pendekatan kepada tokoh warga pemuda agama dan tokoh politik pelaksanaannya tergantung muatan politiknya apakah menguntungkan ataupun merugikan serta yang dibahas terpaut dengan janji-janji politik dalam hal ini ialah konteks individu ataupun kelompok setelah menang pada pilkada Kota Sibolga.

Berdasarkan fakta - fakta yang ditemukan dilapangan tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar pada Pilkada Kota Sibolga 2020 ini buat tingkatkan partisipasi politik warga. Hendak namun bersumber pada fakta dilapangan juga menunjukkan masih ada beberapa warga masyarakat yang anti terhadap politik karena menganggap bahwa Paslon Kepala Daerah hanya membuat janji janji saja dan hanya mendengar aspirasi warga saja belum pasti merealisasi janji-janjinya saat kampanye hendak namun warga masyarakat meresponnya dengan baik. Strategi- strategi tersebut sanggup membawa Paslon Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar memperoleh jumlah suara cukup banyak pada Pilkada Kota Sibolga 2020 ini, walaupun mengalami kekalahan pada jumlah suara dengan Paslon Kepala Daerah yang diusung Partai Politik lain yang memiliki jumlah suara yang lumayan banyak. Fakta lain juga menunjukkan terdapat orang – orang yang masuk kedalam kelompok kepentingan tujuannya adalah buat memperoleh keuntungan individu serta juga kelompok serta untuk mempertahankan posisi serta jabatan sehingga mereka tertarik buat masuk ke dalam kelompok kepentingan karena terdapat janji-janji dari Paslon Kepala Daerah yang hendak diberikan kepada mereka. Hal lain yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa Partai Golkar memakai beberapa strategi seperti; pemasangan spanduk/ baliho,

di pinggir- pinggir jalan. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa Pada saat pelaksanaan pilkada berlangsung proses pemberian suara dilakukan secara terbuka, terencana serta leluasa sehingga respon warga lumayan baik, tertib serta terjaga dalam membagikan hak suaranya.

Jadi Partai Golkar telah banyak membuat Strategi-strategi yang digunakan buat tingkatan partisipasi politik warga dalam memenangkan Pilkada Kota Sibolga 2020, dimana beberapa strategi yang dilakukan sangat bervariasi, seperti melakukan kegiatan- kegiatan sosial politik kemasyarakatan dengan konsep yang berbeda. Strategi ini ialah strategi yang sangat universal digunakan oleh Paslon Kepala Daerah ataupun Partai Politik lainnya dengan konsep yang berbeda. Dengan tujuan supaya khalayak/ pemilih bisa menimbang siapa Paslon Kepala Daerah yang sesuai untuk dipilih dalam Pilkada Kota Sibolga 2020. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk memenangkan Pilkada Kota Sibolga 2020. Strategi yang digunakan mulai dari melakukan aktivitas sosial politik kemasyarakatan, pemasangan baliho, spanduk, mempublikasikan melalui media sosial dan media cetak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Tingkatkan Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada Kota Sibolga 2020 bisa di ambil kesimpulan selaku berikut:

- a. Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar
 1. Komunikator Politik: Partai Golkar menyeleksi serta mengklasifikasi terlebih dulu secara seektif tokoh- tokoh yang dikenali di area warga buat mencari tokoh- tokoh yang aktif, hirau kepada warga serta berpikir maju ke depan buat menggapai tujuan dan mengenali serta mencermati kasus yang terdapat di warga. Tiap tokoh mempunyai keahlian tiap- tiap, kemudian partai Golkar hendak membagikan tugas kepada tokoh- tokoh yang terpilih tidak terkecuali senior partai Golkar serta para pengurus yang mempunyai keahlian buat berbicara dengan baik kepada warga,
 2. Pesan Politik: Isi pesan politik yang telah disiapkan serta hendak di informasikan oleh tokoh- tokoh yang bertugas buat mengantarkan menimpa tentang isu pembangunan kota Sibolga dengan metode menguasai sistem birokrasi pemerintahan, isu industri perikanan sebab kota Sibolga merupakan pusat perikanan serta isu industri pariwisata.
 3. Saluran ataupun Media politik: Paslon yang diusung kemudian diterbitkan dengan memakai media sosial semacam FB Instagram media online serta pula memakai media cetak serta media pendukung yang lain serta jadi nilai jual dalam

mengantarkan keunggulan dari paslon kepala wilayah yang diusung oleh partai kepada warga.

4. Sasaran ataupun Sasaran Politik: Warga Kota Sibolga serta yang diprioritaskan merupakan pemilih pendatang baru sebab mendominasi sehingga wajib menarik simpati kalangan Milenial sehingga dapat menang mendudukkan paslon kepala wilayah yang diusung buat jadi Walikota Sibolga.
 5. Pengaruh ataupun Dampak Komunikasi Politik: Pesan politik yang di informasikan pasti hendak mempengaruhi sebab warga hendak menemukan data tentang calon pemimpin yang hendak bawa pergantian untuk kota Sibolga sehingga pemikiran warga terpaut paslon kepala wilayah hendak berganti cocok dengan figur pemimpin yang warga harapkan buat memastikan masa depan kota Sibolga 5 tahun kedepan buat bawa pergantian untuk kota Sibolga yang lebih baik lagi.
- b. Tingkatkan Partisipasi Politik Warga Terhadap Calon Kepala Wilayah Pada Pilkada Kota Sibolga
1. Menjajaki aktivitas dialog politik: melaksanakan dialog politik para paslon menampung aspirasi terdapatnya aktivitas dialog politik menampung aspirasi warga buat 5 tahun kedepan.
 2. Menjajaki aktivitas kampanye terbuka secara langsung ataupun tidak langsung lewat media cetak, media sosial: tahapan penerapan kampanye ialah Regu berhasil wajib disiapkan buat siap mengkampanyekan paslon kepala wilayah diawali dengan

memperkenalkan paslon kepala wilayah kepada warga, mengantarkan visi misi terpaut terpaut dengan janji buat membangun kota Sibolga yang lebih baik lagi.

3. Masuk ke dalam kelompok kepentingan: Ada orang– orang yang masuk kedalam kelompok kepentingan semacam para tokoh- tokoh, anggota poiltik serta Regu berhasil yang sudah direktur tujuannya merupakan buat keuntungan individu serta pula kelompok dan masuknya kelompok pemerintahan yang tujuannya buat mempertahankan posisi serta jabatan sehingga mereka tertarik buat masuk ke dalam kelompok kepentingan sebab ada janji- janji dari paslon yang hendak diberikan kepada mereka.
4. Melaksanakan komunikasi politik dengan pejabat politik melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik yang diawali dengan membuat strategi, melaksanakan pendekatan kepada tokoh warga pemuda agama serta tokoh politik penerapannya bergantung muatan politiknya apakah menguntungkan ataupun merugikan serta yang dibahas terpaut dengan janji– janji politik dalam perihal ini ialah konteks individu ataupun kelompok sehabis menang pada pilkada Kota Sibolga.
5. Pemberian suara (voting) pada dikala Pilkada: Pada dikala penerapan pilkada belangsung proses pemberian suara dicoba secara terbuka, terencana serta leluasa sehingga reaksi warga lumayan baik, tertib serta terpelihara dalam membagikan suaranya. ada salah satu hambatannya ialah ada faktor sara terpaut dengan money politik saat sebelum melakukan pilkada serta pula terpaut keuangan.

5.2 Saran

1. Sepatutnya dalam membuat Pesan– pesan yang mau di informasikan lebih menuju kepada ekonomi kerakyatan guna menolong warga dalam mengalami permasalahan yang mengenai warga.
2. Dalam memakai saluran ataupun media politik semacam media sosial, online serta media cetak terpaut dengan strategi komunikasi politik wajib dicoba secara lebih mendalam buat mengantarkan data yang baik kepada warga Kota Sibolga.
3. Partai politik wajib membuat program aktivitas– aktivitas yang lebih memihak ke warga sehingga membuat warga lebih yakin sehingga memperoleh simpati dari warga spesialnya warga Kota Sibolga.
4. Paslon Kepala Wilayah yang sudah terpilih haruslah merealisasikan terpaut dengan janji– janji dikala kampanye serta aspirasi warga yang ditampung mewujudkan wujud figur Kepala Wilayah yang diharapkan oleh warga Kota Sibolga.
5. Partai Golkar wajib tingkatkan monitoring serta pengawasan saat sebelum serta sesaat pada penerapan Pilkada Kota Sibolga berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2011). *Komunikasi Politik (Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik)*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholisin. 2017. Diktat Civil Society “*Civic Education Corner*”. Jurnal PKn dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Easton, David. 2018. *Canadian Journal of Poitical Science / Revue canadienne de science politique Vo. 1, No. 2*
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Grabe. 2018 *Membongkar Mitos, Neloib,: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, Yogyakarta. INSIST Press
- Haryanto, 2014, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty.
- Kantaprawira, Rusadi. 2013. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Litteljohn, Stephen W dan Karen AFoss. 2014. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Deddy. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT. Rempaja Rosdakarya.
- Pawito, 2017. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: KIS.
- Rush dan Athoff, 2017. *Pengantar Sosial Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sastroadmojo, S. 2015. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, A.P. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Subakti, Raman. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal– jurnal:

- Putra, Aditya. 2020. *Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare)*. Makassar. Universitas Cokroaminoto. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/articel/download/5773/4661>. Di akses pada 20 Mei pukul 20.15
- Faiza, Lailatul. 2019. *Strategi Komunikasi Politik PKS Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Universitas Abdurrab. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/articel/view/946> . Di akses pada 20 Mei pukul 20.35
- Said Nuwrun Thasimmim & Haryati. 2019. *Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Memenangkan Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Karimun Periode 2019-2024*. Karimun. Universitas Karimun <https://e.journal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IKOM/article/view/25>. Di akses pada 21 Mei pukul 08.20

Afnan, Dikhorir. 2017. *Strategi Komunikasi Politik Tim Sukses Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Kuningan*. Cirebon. Universitas Muhammadiyah Cirebon. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/1432> . Di akses pada 21 Mei pukul 10.20

Satrio Hutomo, Ridho. 2014. *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemiihan Pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014*. Semarang. Universitas Diponegoro. <http://www.fisip.undip.ac.id/> . Di akses pada 21 Mei pukul 14.00

